



LAPORAN KINERJA BPDPKS 2022

## **DAFTAR ISI**

BAI	3 I.	PENDAHULUAN	3
A.	GAI	MBARAN UMUM ORGANISASI	3
	1)	PROFIL ORGANISASI	3
	2)	VISI DAN MISI	6
	3)	STRUKTUR ORGANISASI	7
	4)	TUGAS DAN FUNGSI	10
	5)	PROGRAM LAYANAN	11
B.	ASF	PEK STRATEGIS ORGANISASI	11
C.	PEF	RMASALAHAN STRATEGIS (STRATEGIC ISSUES)	12
BAI	3 II.	PERENCANAAN KINERJA	13
A.	DAS	SAR HUKUM PERENCANAAN KINERJA	13
B.	PE	TA STRATEGIS	14
C.	KOI	NTRAK KINERJA ORGANISASI	14
BAI	B III.	AKUNTABILITAS KINERJA	17
A.	CAI	PAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B.	RE/	ALISASI ANGGARAN	78
C.	PEN	NGHARGAAN ORGANISASI	81
D.	PEF	RISTIWA PENTING TAHUN 2022	83
BAI	B IV.	PENUTUP	130
ΙΔΙ	ИРIR	RAN	131

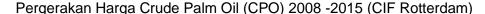
## BAB I. PENDAHULUAN

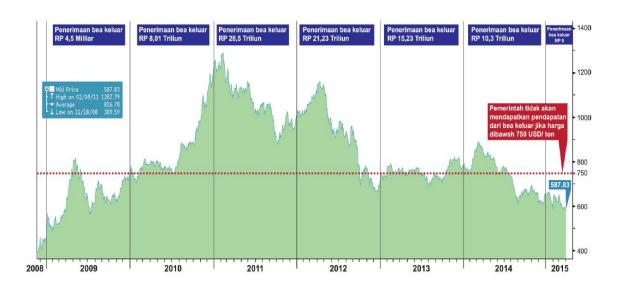
## A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

## 1) PROFIL ORGANISASI

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu merupakan unit organisasi non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Badan ini dibentuk dengan tujuan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui kegiatan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk memberikan fleksibilitas dalam operasionalnya, BPDPKS telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.05/2015.

BPDPKS didirikan pada bulan Juni 2015 sebagai respon Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Pada era tersebut, minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) sebagai produk utama mengalami tren penurunan harga yang cukup tajam, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah.





Sesuai gambar di atas, pada pertengahan 2014, harga CPO mulai mengalami penurunan hingga di bawah USD750/ton yang merupakan threshold pengenaan Bea Keluar. Penurunan tersebut terus berlanjut ke tahun 2015 sehingga tidak ada penerimaan Negara dari Bea Keluar yang dapat digunakan untuk membiayai pengembangan kelapa sawit. Salah satu penyebab penurunan tersebut karena berlebihnya stock, sebagai dampak pertumbuhan produksi yang tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan yang signifikan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Hal ini apabila berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dapat mengancam keberlanjutan perkebunan kelapa sawit karena harga yang optimal merupakan prasyarat tumbuh dan berkembangnya suatu industri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendirikan BPDPKS dengan fokus utama menghimpun dana yang dapat digunakan untuk menciptakan pasar baru guna menyerap kelebihan stock dalam rangka mengembalikan harga minyak sawit pada tingkat harga yang optimal, sehingga keberlanjutan industri kelapa sawit dapat dijaga. Seiring dengan pertumbuhan usia BPDPKS, banyak hal yang telah berubah, yang dapat berdampak pada operasionalisasi BPDPKS maupun pada keberlanjutan perkebunan kelapa sawit Indonesia.

Di dunia yang semakin kompetitif, peran negara dalam mengembangkan industri menjadi semakin penting. Basis kompetisi kini bertumpu pada penciptaan dan asimilasi pengetahuan. Keunggulan kompetitif kini harus diciptakan dan dijaga kesinambungannya melalui proses yang bersifat lokal. Nilai-nilai kebangsaan, budaya, struktur ekonomi, institusi dan sejarah semua berperan dalam keberhasilan negara untuk menjadi kompetitif. Suatu negara dapat sukses di sebuah industri karena lingkungan bisnis domestik yang menaunginya bersifat dinamis, menantang dan berpandangan jauh ke depan.

Sebagai bagian dari regulator, BPDPKS dituntut untuk dapat berperan sebagai katalis yang menantang, memberi semangat maupun mendorong seluruh komunitas industri sawit untuk dapat meningkatkan aspirasi mereka dan bergerak meraih kinerja yang lebih tinggi. BPDPKS diharapkan mampu membantu menciptakan lingkungan bisnis di mana seluruh komunitas industri sawit dapat memperoleh keunggulan kompetitif sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dan terjaga keberlanjutannya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan amanah kepada BPDPKS untuk menggerakkan seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit terlibat dalam penghimpunan dana yang selanjutnya lebih dikenal dengan CPO Supporting Fund. Dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung penciptaan lingkungan bisnis yang kompetitif melalui program-program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Berdirinya BPDPKS dalam rangka mewujudkan pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan tidak lepas dari peran Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia. Saat ini, 86% dari total pasar kelapa sawit dunia dikuasai oleh Indonesia (54%) dan

Malaysia (32%) sebagai produsen terbesar pertama dan kedua kelapa sawit global. Pada tahun 2014 saja, produksi kelapa sawit Indonesia mencapai 33 Juta Ton per tahun, di mana dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan produksi kelapa sawit Indonesia sekitar 11% per tahun secara konstan. Namun demikian, pertumbuhan produksi yang terjadi tidak berbanding lurus dengan sentimen harga sawit dunia yang justru mengalami penurunan sejak tahun 2014 karena tidak diimbangi oleh pertumbuhan pasar. Padahal kelapa sawit memegang peran penting sebagai bahan baku untuk menghasilkan berbagai produk turunan lainnya, seperti minyak masak, margarine, alkohol, lilin, sabun, kosmetik, farmasi, bahkan untuk bahan bakar biodiesel. Selain itu, sisa pengolahan kelapa sawit juga masih dapat dimanfaatkan untuk pupuk kompos dan campuran pakan ternak. Peran strategis dari industri kelapa sawit inilah yang menjadi urgensi pendirian BPDPKS sebagai pengelola dana perkebunan kelapa sawit yang ditunjuk oleh pemerintah. Diharapkan, melalui pengumpulan dana ini, industri kelapa sawit dapat dijaga berkelanjutannya melalui serangkaian program layanan BPDPKS.

BPDPKS diharapkan dapat membantu memberikan stimulus untuk melahirkan permintaan akan produk hasil olahan yang lebih bernilai tambah untuk mengimbangi pertumbuhan produksi, menantang industri untuk mempelopori aplikasi teknologi baru lewat proyek kerjasama, hingga memberi hadiah/bantuan/penghargaan atas pencapaian kualitas ataupun percepatan aplikasi sebuah inovasi.

Seringkali butuh lebih dari satu dekade bagi industri untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Prosesnya melibatkan upaya panjang dalam mengembangkan keahlian/kapabilitas SDM, investasi pada suatu produk dan proses produksi, membangun cluster, hingga melakukan penetrasi pasar luar negeri. Peran BPDPKS adalah mendukung semua ini lewat berbagai upaya yang memicu perubahan, persaingan dan inovasi di dalam komunitas industri sawit seperti:

Mengembangkan program edukasi, infrastruktur dan penelitian yang berfokus pada kebutuhan komunitas industri sawit untuk dapat memiliki daya saing global. Mekanisme dapat dilakukan lewat pembentukan program magang khusus, mendukung penelitian di perguruan tinggi yang terhubung dengan aplikasi industri, mendukung aktivitas asosiasi industri dan memberi stimulus agar perusahaan dalam komunitas industri sawit aktif berinvestasi mengembangkan industrinya.

Membantu penegakan standar produk, keselamatan dan lingkungan yang lebih baik. Hal ini akan menekan komunitas industri sawit untuk meningkatkan kualitas, menerapkan teknologi yang lebih maju, hingga menyediakan fitur/layanan yang responsif terhadap kebutuhan konsumen dan masyarakat. Saat regulasi mampu mengantisipasi standar dunia yang akan datang, penegakannya secara dini akan membuat perusahaan domestik meraih sukses lewat percepatan dalam menghasilkan produk/jasa yang nantinya akan menjadi standar dunia. Namun hal ini harus didukung dengan proses regulasi yang cepat dan konsisten untuk menghindari penundaan ataupun biaya yang tidak perlu.

Mendorong kerjasama penelitian di bidang pengembangan produk dan proses produksi dasar. Kerjasama penelitian ini diposisikan untuk bidang-bidang yang memberi manfaat bagi semua pihak dan tidak menyentuh area khusus yang menjadi spesialisasi dan sumber daya saing suatu perusahaan. Kerjasama penelitian ini juga diposisikan untuk tidak menggantikan/membantu inisiatif research & development suatu perusahaan, sifatnya adalah membantu seluruh komunitas industri sawit, dan dikelola oleh institusi riset independen sehingga akses yang adil untuk semua pihak yang terlibat atas hasil riset dapat terjamin.

Membuka akses pasar di luar negeri bagi komunitas industri sawit. Kebijakan dagang diarahkan untuk aktif membuka pasar di negara manapun di mana hasil produk/olahan komunitas industri sawit memiliki keunggulan daya saing. Selain itu, upaya aktif juga dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul sedini mungkin (misalkan, masalah hambatan dagang, regulasi, tarif, isu praktik dumping, dsb).

Dalam mewujudkan industri sawit berkelanjutan, BPDPKS perlu mengacu kepada target 2024 sebagai berikut:

- 1) Tersedianya insentif fiskal dan pajak dalam negeri dan luar negeri yang berorientasi jangka panjang;
- 2) Tingkat keberterimaan produk sawit Indonesia di pasar global;
- 3) SDM Sawit yang kompeten;
- 4) Ketersediaan infrastruktur yang memadai dari kebun sampai pelabuhan;
- 5) Berkembangnya sektor riil berbasis hasil riset sawit;
- 6) Pemenuhan SDG (Sustainable Development Goals).

#### 2) VISI DAN MISI

Sepanjang perjalanan organisasi sejak 2015, visi BPDPKS untuk menjadi pengelola dana yang berperan dalam pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai salah satu komoditas strategis Indonesia merupakan panduan jelas dalam melakukan penyelarasan dengan sasaran strategis pemerintah secara umum dan menentukan fokus pengembangan bidang yang akan didanai. Pernyataan visi tersebut mengalami penajaman dan menjadi lebih fokus pada tahun 2019, yaitu "menjadi badan pengelola dana yang terpercaya dalam pengembangan sawit yang berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia".

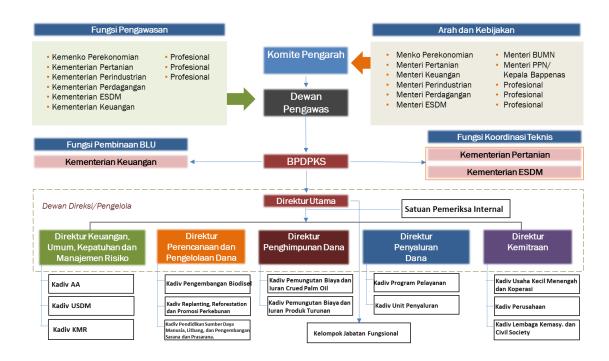
Mengiringi visi, pernyataan misi diperlukan untuk merinci dan menjelaskan visi dalam bentuk lebih konkrit tentang apa yang akan dilakukan, mengapa harus dilakukan, siapa yang akan melakukan, bagaimana caranya, dan untuk siapa inisiatif dilakukan. Misi BPDPKS sejak pendiriannya pada tahun 2015 telah dibuat agar bersifat ringkas namun komprehensif dan sesuai dengan arah perkembangan BPDPKS. Misi BPDPKS pada saat itu yaitu, "mengelola dan menumbuhkembangkan dana perkebunan kelapa sawit secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan program kelapa sawit berkelanjutan sebagai bentuk peningkatan dan stabilitas komoditas

strategis". Namun demikian sama halnya dengan visi pada tahun 2019, misi BPDPKS mengalami penyesuaian menjadi lebih jelas dan lebih terukur mengenai layanan prima yang menjadi fokus penyaluran BPDPKS, yaitu "menjalankan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan melalui penghimpunan, pengembangan, dan penyaluran dana sawit yang terpadu dan tepat guna, secara profesional dan akuntabel, melalui kegiatan:

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Penelitian dan Pengembangan;
- 3) Promosi;
- 4) Peremajaan;
- 5) Sarana dan Prasarana;
- 6) Pemenuhan Kebutuhan Pangan;
- 7) Hilirisasi Industri Perkebunan Kelapa Sawit;
- 8) Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati.

## 3) STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2015 struktur organisasi BPDPKS sebagai berikut:



Susunan organisasi BPDPKS berdasarkan PMK 113/PMK.05/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, terdiri dari 5 Direktorat, 13 Divisi, 1 pengawas internal, dan kelompok jabatan fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan Rencana Bisnis Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan, penyelesaian transaksi (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, pengelolaan risiko organisasi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko terdiri atas:

- 1. Divisi Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan Rencana Bisnis Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran badan, pengelolaan anggaran operasional dan pelaksanaan setelmen, penyusunan sistem dan manual akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan dan kinerja organisasi.
- 2. Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pengembangan sumber daya manusia BPDPKS, penyusunan indikator kinerja, serta pelaksanaan urusan umum dan kerumah tanggaan.
- 3. Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melakukan pengendalian internal melalui serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan rencana pengawasan, penyusunan indikator kontrol, penyusunan standardisasi pengendalian dan perencanaan kebijakan dasar terkait pengawasan dan pengendalian, serta melakukan kontrol secara langsung atas praktik bisnis dan melakukan pengelolaan risiko satuan kerja termasuk penyusunan profil risiko.

#### 2) Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana;

Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan perencanaan usaha berupa Rencana Strategis Bisnis tahunan, rencana pengalokasian kebutuhan Dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana alokasi penyaluran Dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran Dana, riset serta manajemen data. Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana terdiri atas:

- 1. Divisi Pengembangan Biodiesel mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran Dana, riset serta manajemen data terkait pengembangan biodiesel.
- 2. Divisi Replanting, Reforestation dan Promosi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan rencana pengalokasian dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran Dana, riset serta manajemen data terkait peremajaan perkebunan, reforestation, dan promosi perkebunan.
- 3. Divisi Pendidikan Sumber Daya Manusia, Litbang, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pengalokasian Dana, pengelolaan kerjasama pendanaan, penyusunan rencana penyaluran dana, riset serta manajemen data

terkait pendidikan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sarana dan prasarana.

## 3) Direktorat Penghimpunan Dana;

Direktorat Penghimpunan Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penghimpunan Dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, promosi kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang berasal dari pemungutan biaya dan iuran pelaku usaha dan penghimpunan Dana lainnya.

Direktorat Penghimpunan Dana terdiri atas:

- 1. Divisi Pemungutan Biaya dan luran *Crued* Palm Oil mempunyai tugas memungut dan menghimpun Dana berupa biaya ekspor *Crued* Palm Oil dan iuran berkala dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.
- 2. Divisi Pemungutan Biaya dan luran Produk Turunan mempunyai tugas memungut dan menghimpun Dana berupa biaya dari ekspor produk turunan kelapa sawit dan iuran berkala dari pelaku usaha industri berbahan baku kelapa sawit.

### 4) Direktorat Penyaluran Dana;

Direktorat Penyaluran Dana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana penyaluran Dana, verifikasi dan penilaian atas proposal pengembangan komoditas kelapa sawit dan penyaluran Dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran Dana, serta melakukan fungsi kustodian atas Dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan atas penyimpanan Dana.

Direktorat Penyaluran Dana terdiri atas:

- 1. Divisi Program Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana penyaluran Dana, penilaian dan verifikasi terhadap proposal permohonan Dana, pengembangan Dana, penetapan usulan calon penerima Dana.
- 2. Divisi Unit Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyaluran Dana untuk pembiayaan pengembangan, monitoring dan evaluasi penyaluran Dana, menjalankan fungsi kustodian · atas Dana termasuk pencatatan, pengawasan dan pelaporan penyimpanan Dana, dan laporan realisasi penyaluran Dana.

#### 5) Direktorat Kemitraan;

Direktorat Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, perusahaan, Lembaga Kemasyarakatan dan civil society untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

Direktorat Kemitraan terdiri atas:

- 1. Divisi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.
- 2. Divisi Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kemitraan dengan perusahaan -perusahaan untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.
- 3. Divisi Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kemitraan dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society untuk pengembangan kelapa sawit berkelanjutan.

## 6) Satuan Pemeriksaan Intern

Satuan Pemeriksa Internal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan internal terhadap pelaksanaan tugas BPDPKS.

Dalam melaksanakan tugas, Satuan Pemeriksa Internal menyelenggarakan fungsi:

- 1. penyusunan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan audit charter dan audit program;
- pelaksanaan audit berbasis risiko khususnya pada aktivitas usaha Lembaga Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan
- 3. melakukan reviu terhadap laporan keuangan untuk meyakinkan bahwa isi, penyajian, dan pengungkapannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

## 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pejabat Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.

## 4) TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan PMK 113/PMK.05/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang selanjutnya disebut Dana, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

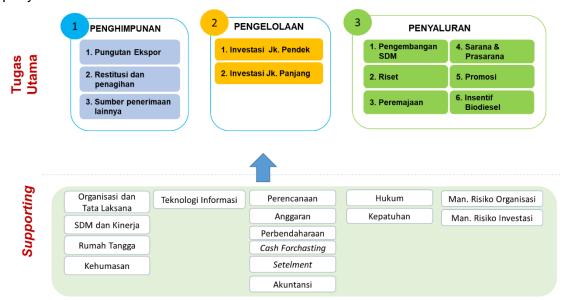
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPDPKS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran tahunan, serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja;
- b. penghimpunan Dana termasuk rencana dan strategi pemungutan biaya dan pengembangan Dana;
- c. pengelolaan Dana yang meliputi penempatan/ investasi Dana;
- d. perencanaan dan penyaluran Dana;

- e. penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan penyelesaian transaksi (setelmen), serta pelaporan; dan
- f. pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehatihatian terhadap pelaksanaan tugas BPDPKS.

## 5) PROGRAM LAYANAN

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018, secara garis besar tugas dan fungsi utama BPDPKS dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana.



### B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri yang sangat penting sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, minyak alkohol, margarin, lilin, sabun, industri kosmetika, industri farmasi, bahkan dapat diolah menjadi bahan bakar. Sisa pengolahan kelapa sawit juga dapat dimanfaatkan menjadi kompos, campuran pakan ternak, biogas, dan lain sebagainya. Dengan begitu banyaknya manfaat yang diberikan, permintaan minyak sawit akan terus tumbuh baik untuk pasar ekspor maupun pasar domestik seiring dengan pertumbuhan penduduk dan hilirisasi produk.

Perkebunan kelapa sawit mempunyai prospek yang masih sangat menjanjikan. Kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir merupakan komoditas unggulan Indonesia yang berkontribusi sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan sumbangan yang cukup besar pada devisa negara melalui ekspor nonmigas, menyerap tenaga kerja, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan khususnya di daerah-daerah sentra perkebunan kelapa sawit. Selain sektor ekonomi, kelapa sawit

juga berperan mendukung program ketahanan energi nasional melalui program mandatory biodiesel.

Dari sisi kompetitor, di pasar global, minyak kelapa sawit akan terus bersaing dengan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, bunga matahari, maupun rapeseed. Produktivitas kelapa sawit yang jauh lebih tinggi jika dibanding dengan minyak nabati lainnya (5,7 kali lebih tinggi dari produk terdekat) dan tanaman tersebut hanya dapat tumbuh dengan baik di Negara beriklim tropis memberikan keunggulan kompetitif perkebunan kelapa sawit Indonesia. Untuk dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif tersebut, perkebunan kelapa sawit harus dikelola secara profesional oleh Pemerintah.

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan, BPDPKS dibentuk Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan perkebunan kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional. Dengan semakin bertambahnya usia perkebunan kelapa sawit, semakin banyak juga permasalahan yang harus diselesaikan untuk melaksanakan amanat tersebut. BPDPKS harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga dapat menangani permasalahan secara holistik, dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir secara seimbang.

## C. PERMASALAHAN STRATEGIS (STRATEGIC ISSUES)

BPDPKS dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 yang menjadi landasan hukum operasional dan tata kerjanya. Seiring dengan bertambahnya usia dan juga perkembangan layanan, terdapat kesenjangan kondisi yang diharapkan dengan kondisi aktual yaitu:

- a. Ketidaksesuaian PMK 113/PMK.01/2015 dengan operasionalisasi;
- b. Beban kerja antar unit yang tidak berimbang;
- c. Belum terdapat unit khusus yang menangani teknologi dan informasi (TI);
- d. Semakin banyaknya perkara hukum pada BPDPKS, namun demikian belum terdapat unit khusus untuk menangani perkara hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Sebagai upaya pemenuhan gap dimaksud, saat ini BPDPKS sedang mengajukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Menteri, menjadi Kondisi yang diharapkan dapat memenuhi dan menjawab kesenjangan yang selama ini terjadi.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

#### A. DASAR HUKUM PERENCANAAN KINERJA

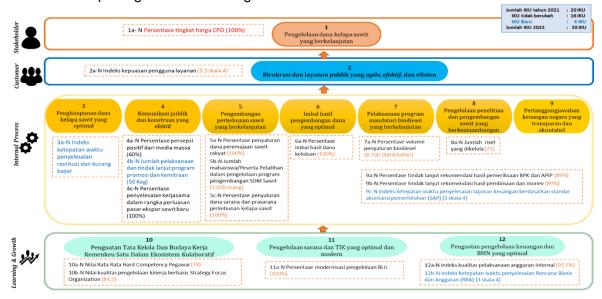
Dalam Perencanaan kinerja, BPDPKS mempunyai landasan hukum pendirian dan operasional sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2018 tentang Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit BLU BPDPKS;
- 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah;

- 16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan
- 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 650/KMK.05/2015 tentang Penetapan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

#### **B. PETA STRATEGIS**

Peta Strategi BPDPKS Tahun 2022 merupakan jabaran atas visi dan misi BPDPKS yang dituangkan dalam bentuk *Balanced Scorecard* (BSC). Peta Strategi BPDPKS untuk tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



#### C. KONTRAK KINERJA ORGANISASI

Kontrak kinerja organisasi BPDPKS Tahun 2022 disusun berdasarkan capaian kinerja periode sebelumnya, serta memperhatikan Target Indikator Kinerja Utama yang realistis, namun tetap menantang dan achievable. Kontrak Kinerja Organisasi BPDPKS ditetapkan melalui Kontrak Kinerja Nomor KK-01/DPKS/2022 yang ditandatangani bersama oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Utama BPDPKS. Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target kinerja untuk tahun 2022 dapat dijabarkan dalam tabel Kontrak Kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	I	a	Target	
(1)	(2)			(4)	
1	Pengelolaan dana kelapa sawit yang berkelanjutan	1a-N	Persentase harga CPO	tingkat	100%

2	Birokrasi dan layanan publik	2a-N	Indeks kepuasan	3.4
2	yang agile, efektif, dan efisien	Za-IN	pengguna layanan	(skala 4)
3	Penghimpunan dana kelapa sawit yang optimal	3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian restitusi dan kurang bayar	3 (skala 4)
4	Komunikasi publik dan kemitraan yang efektif	4a-N	Persentase persepsi positif dari media massa terhadap sawit Indonesia	60%
		4b-N	Jumlah program promosi dan kemitraan yang dikelola	50 Keg
		4c-N	Persentase penyelesaian kerjasama dalam rangka perluasan pasar ekspor sawit baru	100%
5	Pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan	5a-N	Persentase penyaluran dana peremajaan sawit rakyat	100%
		5b-N	Jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Sawit	3.000 orang
		5c-N	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit	100%
6	Imbal hasil pengembangan dana yang optimal	6a-N	Persentase imbal hasil dana kelolaan	100%
7	Pelaksanaan program mandatori biodiesel yang berkelanjutan	7a-N	Volume penyaluran biodiesel	8.700.000 kiloliter
8	Pengelolaan penelitian dan pengembangan sawit yang berkesinambungan	8a-N	Jumlah riset yang dikelola	75 riset
9	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP	89,5%
		9b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPKBLU	90%
		9c-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan berdasarkan	3 (skala 4)

			standar akuntansi pemerintahan (SAP)	
10	Penguatan Tata Kelola Dan Budaya Kerja Kemenkeu	10a-N	Nilai Rata-Rata Hard Competency Pegawai	78
	Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy</i> <i>Focus Organization</i>	84,5
11	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	11a-N	Persentase modernisasi pengelolaan BLU	100%
12	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang	12a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%
	optimal	12b-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)	3 (skala 4)

Adapun dokumen resmi Kontrak Kinerja Organisasi BPDPKS untuk Tahun 2022 yang telah ditetapkan kami sertakan sebagai lampirkan Laporan Kinerja ini.

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun Anggaran 2022, BPDPKS telah menetapkan 12 (Dua belas) Sasaran Strategis yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) SS termasuk dalam Stakeholder Perspective;
- b. 1 (satu) SS termasuk dalam Customer Perspective;
- c. 7 (tujuh) SS termasuk dalam Internal Process Perspective; dan
- d. 3 (tiga) SS termasuk dalam Learning and Growth Perspective.

Sasaran strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana untuk tahun 2022 memiliki Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113.20 lebih kecil dari NKO tahun 2021 sebesar 113.59 lebih besar dari NKO BPDPKS tahun 2020 sebesar 112.45. Dengan capaian NKO tersebut, dari 11 (sebelas) SS yang dimiliki BPDPKS pada tahun 2022 terdapat 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melebihi target yang ditentukan dan 1 (satu) IKU yang tidak sesuai target (kuning).



Gambar 1. Grafik NKO BPDPKS 2020 s.d 2022

Adapun rincian Nilai Kinerja Organisasi BPDPKS Tahun 2022 sebagai berikut:

Nilai Kinerja Organisasi BPDPKS Tahun 2022

No	Perspektif BSC	Bobot	Nilai	Bobot Tertimbang	Nilai Setelah Tertimbang					
1	Stakeholder Perspective	25%	120.00	25%	30%					
2	Customer Perspective	15%	103.53	15%	15.53%					

3	Process Perspective	30%	115.43	30%	34.63%
4	Growth Perspective	30%	110.15	30%	33.05%
NILA	AI NKO				113.20%

Catatan Status NKO:

100 ≤ NKO ≤ 120 = memenuhi ekspektasi

80 ≤ NKO ≤ 100 = belum memenuhi ekspektasi

NKO ≤ 80 = tidak memenuhi ekspektasi

Pada tahun anggaran 2022, dari total 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPDPKS, 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melebihi target yang ditentukan dan 1 (satu) IKU yang tidak sesuai target (kuning). Tabel ringkasan capaian IKU Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU/NSS/NP
I		der Perspektif (25%)			30,00%
1	Pengelol berkelan	aan dana kelapa sawit yang jutan			120,00%
1	1a-N	Persentase tingkat harga CPO	100%	156,14%	120,00%
II	Custome	er Perspektif (15%)			15,53%
2		i dan Layanan Publik yang ktif dan efisien			103,53%
2	2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	3,4	3,52	103,53%
III	Internal I	Process (30%)			34,63%
3	Penghim optimal	punan dana kelapa sawit yang			120,00%
3	3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian restitusi dan kurang bayar	3	3,67	120,00%
4	Komunik efektif	asi publik dan kemitraan yang			117,01%
4	4a-N	Persentase persepsi positif dari media massa terhadap sawit indonesia	60%	69,01%	115,02%
5	4b-N	Jumlah Program Promosi dan Kemitraan yang dikelola	50	148,00	120,00%
6	4c-N	Persentase penyelesaian kerjasama dalam rangka perluasan pasar ekspor sawit baru	100%	116,00%	116,00%
5	Pengeml Berkelan	bangan Perkebunan Sawit Ijutan			100,25%
7	5a-N	Persentase penyaluran dana peremajaan sawit rakyat	100%	81%	80,76%

No	Kode IKU	IKU	Target	Realisasi	Indeks Capaian IKU/NSS/NP
8	5b-N	Jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Sawit	3000	4480	120,00%
9	5c-N	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit	100%	100%	100,00%
6	Imbal ha optimal	si pengembangan dana yang			120,00%
10	6a-N	Persentase imbal hasil dana kelolaan	100%	127%	120,00%
7	Pertango yang aku	gungjawaban pengelolaan dana untabel			119,08%
11	7a-N	volume penyaluran biodiesel	8.700.000	10.359.544	119,08%
8	yang ber	laan Penelitian dan Pengembangar kesinambungan	n Sawit		120,00%
12	8a-N	Jumlah riset yang dikelola	75	115	120,00%
9	Pertango yang aku				111,68%
13	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP	89,5%	93%	103,93%
14	9b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPKBLU	90%	100%	111,11%
15	9c-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP)	3	4,00	120,00%
IV	Learning	and Growth Perspektif (30%)			33,05%
10		an Tata Kelola dan Budaya Kerja K m Kolaboratif	emenkeu Sa	atu Dalam	110,75%
16	10a-N	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	97,10	120,00%
17	10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focus Organization	84,50	85,77	101,50%
11	Pengelol	laan sarana dan TIK yang optimal d	dan modern		116,00%
18	11a-N	Persentase modernisasi pengelolaan BLU	100%	116%	116,00%
12	BMN yar	an Pengelolaan Keuangan dan ng Optimal			103,71%
19	12a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,50%	99%	103,71%
20	12b-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)	3	4,00	120,00%
	CA	APAIAN KINERJA PEGAWAI/ORGA	NISASI		113,20%

Analisis dan penjelasan untuk setiap realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1. IKU Persentase tingkat harga CPO (1a-N)

Dana perkebunan kelapa sawit harus dapat dikelola untuk meningkatkan nilai tambah dari dana penghimpunan yang ada dalam rangka mendukung tujuan penggunaan dana sesuai amanat Perpres 66 tahun 2018.

IKU persentase tingkat harga CPO merupakan persentase harga CPO yang mempengaruhi harga TBS yang masih menguntungkan bagi petani kelapa sawit, untuk periode pengukuran tanggal 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2022. Formula yang digunakan:

## Keterangan:

(Target harga CPO: \$800/MT) harga referensi Kementerian Perdagangan

Tujuan IKU ini adalah Mendukung peningkatan harga CPO yang dapat berimbas pada meningkatnya penerimaan dana BLU dari pungutan sawit dan dalam rangka meningkatkan harga TBS untuk kesejahteraan petani kelapa sawit.

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

	I- Pengelolaan dana kelapa sawit yang optimal										
BPDPKS	(1a-N) I	1a-N) Persentase Tingkat Harga CPO									
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K P			
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Realisasi	168.95 %	214.38 %	191.66 %	141.26 %	166,46 %	99,97%	156.15%	Max / Averag e			
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	99.97%	120%				

Realisasi harga CPO Referensi Kemendag pada bulan Desember 2022 sebesar USD 848,15/MT, naik sebesar USD 49,42 atau 0,06 % jika dibandingkan periode November 2022 sebesar USD 798,73/MT. Sedangkan rata-rata harga CPO Ref Kemendag Periode Triwulan IV sebesar USD 799,98/MT atau mencapai 99,99 % dari target USD800/MT. Kenaikan harga pada Desember 2022 disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1) Cuaca buruk yang melanda Sebagian wilayah negara produsen CPO yang mengakibatkan kegiatan produksi menjadi terganggu

- 2) Kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh kebijakan Rusia menghentikan ekspor kepada negara-negara yang memberlakukan pembatasan harga
- 3) Pemerintah China melakukan pelonggaran kebijakan COVID
- Kenaikan harga minyak nabati dunia yang dipicu oleh cuaca kering yang melanda Amerika Selatan

#### Rata-rata harga CPO:

Rata-Rata CPO (\$)	Jan (2022)	Feb (2022)	Mar (2022)	Apr (2022)	Mei (2022)	Jun (2022)	Jul (2022)	Aug (	2022)	Sept (	2022)	Okt (	2022)	Nov (	2022)	Des (	2022)	Rata-rata
Rata-Rata CPO (\$)								1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31	2022
Rata-Rata CPO (\$)	1307.76	1314.78	1432.24	1787.5	1657.39	1700.12	1615.83	872,27	900,52	929,66	846,32	792,19	713,89	770,88	826,58	824,32	871,99	
Raia-Raia GPO (\$)	1307,70 1314,70	1314,70	1432,24	1/0/,5	1007,39	1700,12	1010,00	886	i,40	887	,99	753	3,04	798	3,73	848	155	1249,16
Triwulan CPO (\$)	1351,59 1715,00			1130,07 799,98														
Target (\$)	800 800			800 800								800						
Realisasi (%)	asi (%) 168,95% 214,38%				141,26%			99,997%				156,15%						
Capaian (%)	paian (%) 120% 120%			120%				100%				120%						



#### Akar masalah sebagai berikut:

- 1. Cuaca buruk
- 2. Kenaikan harga minyak dunia
- 3. Pelonggaran kebijakan COVID
- 4. Kenaikan harga minyak nabati dunia

#### Rekomendasi/rencana aksi berupa:

- 1. Monitoring pergerakan harga CPO
- 2. Melakukan Pemutakhiran data harga CPO dan minyak nabati lainnya sebagai referensi untuk melakukan proyeksi harga CPO.

#### 2. IKU Indeks kepuasan pengguna layanan (2a-N)

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien didefinisikan sebagai persepsi customer terhadap produk atau layanan BPDPKS yang telah memenuhi atau melebihi harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra BPDPKS sebagai BLU pengelola dana perkebunan kelapa sawit yang terpercaya.

Definisi IKU ini adalah Mengukur kepuasan pengguna layanan BPDPKS yang terdiri dari kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana serta pihak-pihak lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan BPDPKS. Pengguna layanan antara lain dari Kementerian/Lembaga, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian, Petani Sawit, Asosiasi Sawit, Lembaga Kemasyarakatan, Perusahaan Sawit, Koperasi, UKM dan Vendor.

### Formula yang digunakan adalah:

 $\frac{\sum \textit{Realisasi hasil survei indeks kepuasan pengguna layanan}}{\sum \textit{Target indeks kepuasan pengguna layanan}} \times 100\%$ 

Target indeks kepuasan stakeholder atas layanan BPDPKS tahun 2022 = 3.4 Tujuan IKU ini untuk mengukur kepuasan stakeholder atas layanan yang diberikan oleh BPDPKS dalam menjalankan program-programnya secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kelapa sawit berkelanjutan

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

	II- Biro	II- Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien									
BPDPKS	(2a-N) IKU Indeks kepuasan pengguna layanan										
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K P			
Target	-	-	-	-	-	3,4	3,4				
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.52	3.52	Max / TLKV			
Capaian						103.52%	103.52%				

Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Pengguna Layanan BPDPKS dengan jumlah populasi responden sebagai berikut:

	Jenis Layanan								
Penghimpun Dana									
	Pemungutan Biaya dan luran Produk Turunan	32							
	Penyaluran Dana Biodiesel	22							
	Penyaluran Dana Riset	38							
Penyalur Dana	Penyaluran Dana Replanting	15							
1 onyalar Bana	Penyaluran Dana Kegiatan Promosi	27							
	Penyaluran Dana Program Pengembangan SDM Sawit	22							
Penyedia Jasa	Pemberian Jasa/Layanan	27							

Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden dalam penelitian sebanyak 194 pengguna layanan dari seluruh total pengguna layanan BPPDKS, hal yang perlu dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik insindental. Sampling insindental adalah penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insindental bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan sebagai sampel, apabila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai sebagai sumber data.

Adapun target capaian indeks kepuasan penggunaan layanan atas layanan BPDPKS tahun 2022 adalah sebesar 3,4 (skala 4).

Capaian indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2022 BPDPKS sebesar 3,52 atau 88% yang artinya secara keseluruhan pengguna sangat puas terhadap layanan yang diberikan oleh BPDPKS.

Akar masalahnya yaitu Beberapa stakeholder sawit belum mengetahui tugas, fungsi dan program BPDPKS dalam mendukung kelapa sawit berkelanjutan.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan yaitu:

- 1. Mengelola Konten Website BPDPKS sebagai wadah penyampaian informasi program BDPPKS kepada stakeholder.
- 2. Penyediaan saluran telepon penerimaan keluhan pengguna layanan melaui Call Center 14036 BPDPKS dan email pada info@bpdp.or.id.
- 3. Pengembangan kapasitas pengelola website melalui Workshop Jurnalistik untuk tingkatkan kemampuan penulisan dan penyampaian informasi ke masyarakat.
- 4. Sosialisasi program-program BPDPKS pada kegiatan yang dilakukan BPDPKS atau mitra kerja sama.

Sedangkan rekomendasi dan rencana aksi meliputi:

- 1. Internalisasi hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan BPDPKS tahun 2022.
- 2. Tindak lanjut rekomendasi hasil survei kepuasan pengguna layanan BPDPKS tahun 2022.
- 3. Diseminasi hasil survei kepuasan pengguna layanan BPDPKS.

#### 3. Indeks ketepatan waktu penyelesaian restitusi dan kurang bayar (3a-N)

Memberikan pelayanan prima berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian dokumen surat ketetapan kelebihan bayar pungutan dalam rangka pengembalian dan ketepatan waktu penyelesaian dokumen dalam rangka penerbitan surat penagihan kurang bayar pungutan untuk periode pengukuran tanggal 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022. Formula:

"Jumlah indeks penyelesaian restitusi dan penyelesaian kurang bayar " / (Jumlah " restitusi dan penyelesaian kurang bayar" )

Keterangan:

Restitusi : Sampai dengan terbit surat ketetapan pengembalian (jangka waktu

sesuai SOP)

Kurang Bayar : Sampai dengan penerbitan surat konfirmasi kebenaran data ke

Ditjen Bea Cukai (DJBC)

Target Indeks : 3 dari skala 4

Indeks 4 : Jika tindak lanjut permohonan restitusi, dan kurang bayar lebih

cepat dari waktu yang ditetapkan sesuai SOP

Indeks 3 : Jika tindak lanjut permohonan restitusi, dan kurang bayar tepat

sesuai waktu yang ditetapkan sesuai SOP

Indeks 2 : Jika tindak lanjut permohonan restitusi, dan kurang bayar terlambat

sampai dengan 5 hari kerja dari waktu yang ditetapkan sesuai SOP

Indeks 1 : Jika tindak lanjut permohonan restitusi, dan kurang bayar terlambat

lebih dari 5 hari kerja dari waktu yang ditetapkan sesuai SOP

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

	III- Per	III- Penghimpunan dana kelapa sawit yang optimal						
BPDPKS	(3a-N) IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian restitusi dan kurang bayar							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K P
Target	3	3	3	3	3	3	3	
Realisasi	3,57	3,71	3,71	3,82	3,82	3,59	3,67	Max/T LK
Capaian	119%	120%	120%	120%	120%	119%	120%	

Dengan diberlakukannya PMK Nomor 154/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan, maka:

- a. Berdasarkan HPE US\$ 770,88/MT (Kemendag 1460/2022), maka Tarif Pungutan produk CPO dan turunannya adalah USD 0 dari tanggal 1 November 2022 sd 15 November 2022.
- b. Terhitung mulai tanggal 16 November 2022 sd 30 November 2022, dengan Harga Referensi US\$ 826,58/MT (Kemendag 1500/2022) berlaku kembali tarif CPO USD 85/MT.

Mengingat saat ini Harmonisasi Peraturan dan SOP masih dalam proses Pembahasan dengan DJBC maka perhitungan penyelesaian layanan terkait Restitusi mengikuti Usulan pada Standar Pelayanan Minimum (SPM), hal ini telah dibahas pada rapat DKO TW I 2022.

Jawaban konfirmasi kebenaran data lebih dan kurang bayar Pungutan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya melebihi batas waktu 7 hari kerja sehingga memperlambat proses pelayanan restitusi dan penagihan.

Surat Ketetapan Lebih Bayar Pungutan Ekspor diterbitkan setelah dilakukan pencocokan data berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Eksportir dengan jawaban konfirmasi dari DJBC dan Bank Pengumpul, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Verifkasi Dokumen Permohonan Pengembalian yang disampaikan oleh Eksportir
- b. Konfirmasi kebenaran data kepada DJBC dan Bank Pengumpul
- c. Pencocokan data pada dokumen permohonan pengembalian dengan jawaban konfirmasi dari DJBC dan Bank Pengumpul
- d. Penerbitan Surat Ketetapan Lebih Bayar Pungutan Ekspor, dalam hal permohonan disetujui.
- e. Penolakan, dalam hal permohonan tidak disetujui

#### Tindakan yang dilaksanakan yaitu:

- Melakukan Perhitungan Validasi berdasarkan hasil Rekonsiliasi Data pada Aplikasi SiBilly dan Dokumen Permohonan Pengembalian yang disampaikan oleh Eksportir.
- 2. Melakukan monitor dan koordinasi dengan Bank atas kewajiban untuk melakukan Upload data ada MT 940.
- Melakukan koordinasi dengan DJBC terkait munculnya kasus gagal bayar pada tanggal 26 November 2022 sebanyak 2 billing, tanggal 28 November 2022 sebanyak 27 billing, dan tanggal 1 Desember 2022 sebanyak 2 billing (telah terselesaikan)
- Telah ditetapkan Peraturan Direktur Utama nomor-5/DPKS/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya tanggal 7 Desember 2022, berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.
- 5. Temuan BPK terkait SKB, BPDPKS telah menyampaikan Nota Dinas kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: ND-557/DPKS/2022, Nota Dinas kepada Direktur sistem Manajemen Investasi Nomor: ND-869/DPKS/2022 perihal Tindak Lanjut Nota Dinas Nomor: ND-1346/PB.4/2022 tanggal 28 November 2022. Penambahan Informasi yang diperlukan BPDPKS dalam mengoptimalkan pendapatan Pungutan Ekspor ke dalam SKB.
- 6. Melakukan Sosialisasi Pembayaran Pungutan atas Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya bersama DJBC Pusat dan KPPBC yang memberikan pelayanan dan pengawasan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan/atau Produk Turunannya, Bank Pengumpul, Asosiasi serta Pelaku Usaha dan Eksportir.

Data Permohonan Lebih Bayar (Januari s.d Desember 2022)

No.	Keterangan	Bulan Januari to Desember 2022				
NO.	Reterangan	Dokumen	Nilai (Rp.)			
1	Telah Dibayarkan	176	277.110.248.729			
2	Tahap Konfirmasi	4	213.226.427			
3	Tahap Pencairan STAP	42	35.539.259.639			
4	Kelengkapan Dokumen					
5	Penolakan	6	176.060.839			
TOTAL		228	313.038.795.634			

## Data Konfirmasi Kurang Bayar Pungutan (Januari s.d Desember 2022)

PERIODE	KURANG BAYAR	NOTA DINAS KONFIRMASI	KETERANGAN
JANUARI	4.661.339.194,05	ND-101/DPKS.3/2022 Perihal: Konfirmasi Kebenaran Data Kurang dan Lebih Bayar Pungutan Ekspor Periode Januari 2022	
FEBRUARI	36.584.364,62	ND-183/DPKS.3/2022 Perihal: Konfirmasi Kebenaran Data Kurang dan Lebih Bayar Pungutan Ekspor Periode Februari 2022	Telah mendapat jawaban konfirmasi dari DJBC melalui Nota Dinas Nomor ND-3733/BC.07/2022
MARET	130.679.755.817,19	ND-264/DPKS.3/2022 Perihal: Konfirmasi Kebenaran Data Kurang dan Lebih Bayar Pungutan Ekspor Periode Maret 2022	
APRIL	5.744.193.342,00	ND-297/DPKS.3/2022 Perihal: Konfirmasi Kebenaran Data Kurang dan Lebih Bayar Pungutan Ekspor Periode April 2022	Telah mendapat jawaban konfirmasi dari DJBC melalui Nota Dinas Nomor
MEI	10.957.124.492,00	ND-354/DPKS.3/2022 Perihal: Konfirmasi Kebenaran Data Kurang dan Lebih Bayar Pungutan Ekspor Periode Mei 2022	ND-4083/BC.07/2022
Juni	7.798.345.941,00	ND-419/DPKS.3/2022 Perihal: Konfirmasi Kebenaran Data Kurang dan Lebih Bayar Pungutan Ekspor Periode Juni 2022	Telah dilakukan Rekonsiliasi
Juli	500.152.886,00	ND-479/DPKS.3/2022 Perihal: Konfirmasi Kebenaran Data Kurang dan Lebih Bayar Pungutan Ekspor Periode Juli 2022	bersama antara BPDPKS dengan DJBC tanggal 14 sd 16 Sept 2022
Agustus	-		PMK 115 tahun 2022 , tarif 0 (nol)
September	-		PMK 130 tahun 2022 , tarif 0 (nol)
Oktober	-		PINK 150 tanun 2022 , tarri 0 (nor)
November	-		
Des ember	ND-820/DPKS.3/2022 Perihal: Konfirmasi Data Tanggal Pemberitahuan Ekspor diterima oleh SKP, Jenis dan Jumlah Barang Ekspor Periode Pengiriman Data CEISA Periode November 2022		PMK 154 tahun 2022
TOTAL	160.377.496.036,86		

# 4. IKU Persentase persepsi positif dari media massa terhadap sawit Indonesia (4a-N)

Penyampaian informasi ke stakeholder dan masyarakat tentang fakta objektif kelapa sawit dan program-program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam mendukung pencapaian kelapa sawit yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan citra nilai produk sawit serta sebagai sarana branding BPDPKS. Kegiatan komunikasi dilakukan secara tepat sasaran dan menggunakan media komunikasi yang efisien dan efektif mencapai sasaran dan tujuan. selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Pasal 11 ayat 1 huruf c bahwa dana yang dihimpun oleh

BPDPKS digunakan untuk kepentingan promosi perkebunan kelapa sawit. Kegiatan promosi harus sesuai dengan strategi pengembangan perkebunan sawit yang ditetapkan pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan para pekebun dan pelaku usaha perkebunan dan industri sawit. Untuk itu, kegiatan promosi perlu dilakukan dengan menjalin kemitraan/hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Sawit, Perusahaan, Petani, UKM, Koperasi, dan badan hukum lainnya. Kemitraan tersebut juga akan memperluas capaian sasaran dari kegiatan promosi sawit.

Definisi IKU ini adalah mengukur sentimen positif pemberitaan di media massa nasional baik cetak maupun online terhadap sawit Indonesia. Tipe media yang diukur adalah media cetak dan media online.

Formula yang digunakan adalah:

%Sentimen Media = 
$$\sum_{i}^{n} (Avg \% Net Sentimen) / n$$

### Keterangan:

i s.d. n = bulan ke i s.d. n n = jumlah bulan dalam triwulan

$$\textit{Avg \% Net Sentimen per bulan per media type} = \frac{\text{\% Sentimen Positif } - \text{\% Sentimen Negatif}}{t}$$

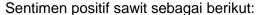
## t = jumlah hari dalam sebulan

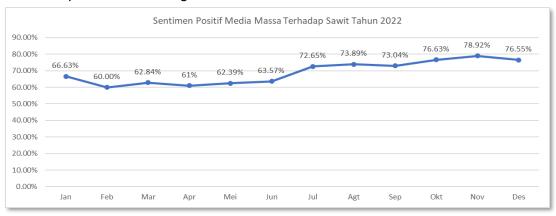
Tujuan IKU ini adalah Untuk mengukur pengaruh kegiatan promosi dan kemitraan dalam meningkatkan citra dan persepsi positif terhadap sawit di masyarakat di dalam negeri.

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

	IV- Koı	IV- Komunikasi publik dan kemitraan yang efektif						
BPDPKS	(4a-N) Persentase persepsi positif dari media massa terhadap sawi Indonesia						sawit	
T/R	Q1	Q1						
Target	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	
Realisasi	63,16 %	62,32 %	62,74%	73,19 %	66,22%	77,37%	69,01%	Max/ AVG
Capaian	105,26 %	103,86 %	104,57 %	120%	110,37 %	120%	115,01 %	

Persentase sentimen positif = [1071/(8573-7174)] x 100% = 76,55%





Pemberitaan dengan sentimen Positif tentang sawit selama Desember 2022 antara lain: Rencana implementasi Biodiesel B35 pada tahun 2023, Peningkatan harga CPO dan TBS, Kontribusi kelapa sawit untuk ketahanan pangan dan energi, Investasi pembangunan pabrik minyak goreng, Rencana produksi minyak sawit merah tahun 2023, Kenaikan indeks NTP petani sawit, realisasi program PSR di daerah, realisasi program Riset BPDPKS, serta publikasi berita kegiatan sawit yang dilakukan oleh BPDPKS dan stakeholder sawit lainnya.

Rekapitulasi Sentimen media massa terhadap Kelapa Sawit bulan Desember 2022:

Keyword	Mention	Positif	Negatif	Netral
Sawit	6962	527	249	6186
BPDPKS	753	290	57	406
Biodiesel	858	254	22	582
Jumlah	8573	1071	328	7174

Pemberitaan dengan sentimen Negatif tentang sawit selama Desember 2022 antara lain: Rencana implementasi RED III oleh Uni Eropa, konflik lahan perusahaan dan petani, Pencemaran sungai oleh limbah pabrik kelapa sawit, dan Kerusakan jalan di daerah karena truk pengangkut CPO yang *over capacity*.

Akar masalah IKU ini adalah:

- 1. Persepsi bahwa perkebunan kelapa sawit penyebab hilangnya hutan (deforestasi) dan penyebab kebakaran lahan masih sangat kuat di masyarakat.
- Persoalan status beberapa lahan perkebunan sawit yang dianggap berada dalam kawasan hutan yang belum selesai, walaupun persentasenya tidak terlalu besar, menjadi bahan bagi aktivis anti sawit melakukan kampanye negatif.

Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Pelaksanaan Media Monitoring.
- 2) Pengelolaan Konten Website dan Media Sosial BPDPKS.
- 3) Publikasi kegiatan BPDPKS di media massa.
- 4) Pelaksanaan beberapa kegiatan promosi dengan asosiasi sawit, media dan mitra lainnya untuk menyampaikan aspek keberlanjutan tentang sawit dan manfaatnya bagi perekonomian, sosial, dan ketahanan energi kepada masyarakat dalam negeri..
- 5) Melanjutkan Program sosialisasi fakta objektif sawit ke generasi Z, Milenial, dan generasi X.
- 6) Produksi TV dokumenter tentang Petani Milenial.
- 7) Kampanye "SawitBaik Menyapa Publik"
- 8) Bimtek dan Sosialisasi Sawit kerja sama anggota DPR RI.
- 9) Pelaksanaan Press Conference tahun 2022.

Rekomendasi rencana aksi sebagai berikut:

- Melanjutkan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022.
- 2) Produksi dan pemasangan Iklan Layanan Masyarakat tentang sawit di Media Promosi Luar Ruang dan Televisi.

## 5. IKU Jumlah Program Promosi dan Kemitraan yang Dikelola (4b-N)

Penyampaian informasi ke stakeholder dan masyarakat tentang fakta objektif kelapa sawit dan program-program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam mendukung pencapaian kelapa sawit yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan citra nilai produk sawit serta sebagai sarana branding BPDPKS. Kegiatan komunikasi dilakukan secara tepat sasaran dan menggunakan media komunikasi yang efisien dan efektif mencapai sasaran dan tujuan. selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Pasal 11 ayat 1 huruf c bahwa dana yang dihimpun oleh BPDPKS digunakan untuk kepentingan promosi perkebunan kelapa sawit. Kegiatan promosi harus sesuai dengan strategi pengembangan perkebunan sawit yang ditetapkan pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan para pekebun dan pelaku usaha perkebunan dan industri sawit. Untuk itu, kegiatan promosi perlu dilakukan dengan kemitraan/hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Sawit, Perusahaan, Petani, UKM, Koperasi, dan badan hukum lainnya. Kemitraan tersebut juga akan memperluas capaian sasaran dari kegiatan promosi sawit.

Definisi IKU ini adalah Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti BPDPKS dari kegiatan promosi sebelumnya. Bentuk tindak lanjut dapat berupa kegiatan promosi sawit lainnya, diplomasi dan advokasi sawit, litigasi terhadap hambatan perdagangan dan diskriminasi sawit, kajian/suvei terkait sawit, serta usulan atau konsep kebijakan/regulasi terkait sawit. Rekomendasi berasal dari mitra Usaha, Kecil, Menengah dan Koperasi, mitra Perusahaan Sawit, mitra Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society, mitra Asosiasi sawit, dan mitra Kementerian dan Lembaga terkait.

Rekomendasi berkenaan dengan isu-isu yang terkait dengan: Sustainability, Aspek Lingkungan Perkebunan Sawit, Peningkatan Produktifitas Sawit, Aspek Kesehatan Produk Sawit, Peningkatan Citra Produk Sawit, dan Peningkatan & Perluasan Pasar Ekspor Sawit. Rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah yang berdampak besar terhadap perkebunan dan industri sawit.

Capaian Kegiatan inisiatif internal dengan formula:  $(\frac{\sum Kegiatan Inisiatif Internal}{15 Kegiatan} \times 50\%)$  dengan maksimal capaian 75%.

Capaian Kegiatan inisiatif eksternal dengan formula:  $(\frac{\sum Kegiatan Inisiatif Eksternal}{35 Kegiatan} \times 50\%)$  dengan maksimal capaian 75%.

#### **Keterangan:**

Formula yang digunakan:

- Kegiatan yang dihitung untuk pencapaian IKU adalah Kegiatan yang dilakukan BPDPKS Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Bentuk kegiatan dapat berupa kegiatan promosi sawit, diplomasi dan advokasi sawit, litigasi terhadap hambatan perdagangan, diskriminasi sawit.
- Rekomendasi kegiatan dapat berasal dari Internal BPDP atau eksternal BPDP (mitra Usaha, Kecil, Menengah dan Koperasi, mitra Perusahaan Sawit, mitra Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society, mitra Asosiasi sawit, dan mitra Kementerian dan Lembaga terkait, dll).
- target 50 Kegiatan (15 Internal dan 35 Eksternal)
- Maksimal Capaian IKU 150%

Tujuan IKU ini Mengukur kesinambungan program promosi dan kemitraan yang dilaksanakan BPDPKS bekerja sama dengan mitra guna memastikan pencapaian tujuan promosi perkebunan kelapa sawit

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

BPD PKS	IV- Komunikasi publik dan kemitraan yang efektif							
FNO	4b-N J	umlah P	rogram Pi	romosi d	lan Kemit	raan yang	Dikelola	
T/R	Q1	Q1						
Target	12	24	24	40	40	50	50	
Realisasi	18	56	56	91	91	146	146	Max/T LK
Capaian	137,5%	150%	150%	150%	150%	150%	150%	

Bentuk tindak lanjut dapat berupa kegiatan promosi sawit lainnya, diplomasi dan advokasi sawit, litigasi terhadap hambatan perdagangan dan diskriminasi sawit, kajian/survei terkait sawit, serta usulan atau konsep kebijakan/regulasi terkait sawit. Rekomendasi dapat berasal dari mitra Petani Sawit, UKM dan Koperasi, Perusahaan

Sawit, Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society, Asosiasi Sawit, dan Kementerian/Lembaga terkait.

Data capaian 2022:

	Realisasi	Target	Capaian	Bobot	Persentase	Ket.
Kog Ekstornal	121	35	150%	50%	75.0%	Maksimum capaian
Keg. Eksternal	121	33	150%	30%	75.0%	150%
Ves Internal	25	15	1500/	50%	75.0%	Maksimum capaian
Keg. Internal	25	15	150%	50%		150%
Jumlah	146	50			150.0%	

Adapun kegiatan selama tahun 2022 sebagai berikut:

NO	un kegiatan selama tahun 2022 sebagai berikut:  KEGIATAN	TANCCAL DELAKCANAAN
NO	REGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
	Usulan Eksternal	
1	Dukungan Pendanaan Webminar & Livestreaming "Peranan Industri Kelapa Sawit dalam Penanganan Perubahan Iklim" kerja sama Media Perkebunan.	25 Januari 2022
2	Dukungan Pendanaan Hari Pers Nasional 2022 kerja sama Persatuan Wartawan Indonesia.	7 s.d. 9 Februari 2022
3	Dukungan pendanaan event Dream Day 2022 pada kerja sama media Dream.co.id.	25 s.d. 27 Februari 2022
4	Dukungan Pendanaan Kegiatan Webinar Mendorong Realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kerja sama Majalah Sinar Tani.	9 Maret 2022
5	Dukungan Pendanaan Jasa konsultan hukum Pemerintah RI sebagai <i>Third Party</i> pada kasus sengketa DS 600 di WTO	Tahun 2022
6	Dukungan Pendanaan Kampanye Positif Sawit di Uni Eropa oleh DCI Group kerja sama dengan GAPKI	Tahun 2022
7	Dukungan Pendanaan Jasa Konsultan Hukum Pemerintah RI dalam kasus sengketa RED II Uni Eropa pada DS 593 di WTO	Tahun 2022
8	Dukungan Pendanaan Roundtable Discussion "Dinamika dan Perkembangan Terkini Terkait Minyak Sawit Nabati Lain di Uni Eropa"	11 Mei 2022
9	Dukungan Pendanaan Webinar Sosialisasi Inovasi Pangan Olahan dari Kelapa Sawit "Hilirisasi Produk Untuk Mendorong Peningkatan Nilai Tambah"	25 Mei 2022
10	Dukungan Pendanaan Kick Off Events "Pangan Indonesia untuk Dunia yang lebih Baik" dalam rangka Sherpa Meeting G20	22 Juni 2022
11	Dukungan pendanaan Webinar Membangun Jembatan Kemitraan Dengan Perusahaan: "Alternatif Dorong Peremajaan Sawit Rakyat"	29 Juni 2022
12	Dukungan Pendanaan kegiatan pameran sawit pada 2nd Sherpa Meeting G20 di Labuan Bajo dan 3rd Sherpa Meeting G20 di Yogyakarta	9 s.d. 12 Juli 2022 dan September 2022
13	Dukungan Pendanaan kegiatan Workshop Daur Ulang Minyak Jelantah Kelapa Sawit bersama Ibu dan Anak	6 Juli 2022

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
14	Dukungan Pendanaan Kegiatan Spesial Dialog PercepatanEkspor CPO: Antara Usaha dan Realita kerja sama Media CNBC	25 Juli 2022
15	Dukungan Pendanaan kegiatan FGD Percepatan Hilirisasi Kebun Sawit Rakyat melalui Kemitraan dengan Pelaku Industri Sawit kerja sama GAPKI Sumut di Medan	3 s.d. 5 Agustus 2022
16	Dukungan Pendanaan Sosialisasi Biodiesel pada ajang GIIAS 2022 kerja sama APROBI	11 s.d. 12 Agustus 2022
17	Dukungan Pendanaan Sosialisasi Biodiesel pada Jambore Nasional Pramuka kerja sama APROBI	14 s.d. 21 Agustus 2022
18	Dukungan Pendanaan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Pelaksanaan Permentan NO 03 Tahun 2022 dan Perdirut BPDPKS No. 4 Tahun 2022 dalam rangka Percepatan Program Peremajaan Sawit di Kalimantan Barat kerja sama GAPKI Kalimantan Barat	20-Sep-22
19	Dukungan Pendanaan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Pelaksanaan Permentan NO 03 Tahun 2022 dan Perdirut BPDPKS No. 4 Tahun 2022 dalam rangka Percepatan Program Peremajaan Sawit wilayah Sumatera Barat, Riau dan Jambi di Padang kerja sama GAPKI Sumatera Barat	30-Sep-22
20	Dukungan Pendanaan Partisipasi Sawit Indonesia pada GlobOil Expo & Conference India kerja sama GAPKI.	21 s.d. 24 September 2022
21	Dukungan Pendanaan Kegiatan Penulisan Program Sawit Pada Warga Tempatan dan Terobosan Baru untuk Petani Sawit kerja sama Media Majalah Gatra	September s.d. November 2022
22	Dukungan Pendanaan kegiatan Kemitraan Promosi Sawit kerja sama dengan Media Elaeis.co	September s.d. November 2022
23	Dukungan Pendanaan kegiatan Penulisan Promois Sawit kerja sama Media Majalah Hortus Archipelago	September s.d. November 2022
24	Dukungan Pendanaan Kegiatan Sosialisasi dan Workshop Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit di Kalimantan Timur kerja sama GAPKI	8 s.d. 9 September 2022
25	Dukungan Pendanaan kegiatan Sosialisasi dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 bersama Anggota DPR RI Ibu Ema Umiyyatul Chusnah Kerja Sama dengan JIM	24 s.d. 25 September 2022
26	Dukungan Pendanaan kegiatan Bimbinngan Teknis dan Expo Sawit Baik 2022 bersama Anggota DPR RI Johan Rosihan	16 s.d. 18 September 2022
27	Dukungan Pendanaan Kegiatan Promosi Sawit Indonesia Melalui Pameran Trade Investment Industry (TII) G20 Exposition	21 s.d. 23 September 2022
28	Dukungan Pendanaan kegiatan Bimbinngan Teknis dan Expo Sawit Baik 2022 bersama Anggota DPR RI Dedi Mulyadi	29-Sep-22
29	Dukungan Pendanaan Kegiatan Pembuatan Video Oleochemical kerja sama APOLIN	30-Sep-22
30	Dukungan Pendanaan Kegiatan Sosialisasi dan Expo Sawit Baik 2022 dengan tema "Hilirisasi Kelapa Sawit Menuju Ketahanan Ekonomi Nasional" bersama Anggota DPR RI Ravindra Airlangga Kerja Sama dengan JIM	6 dan 17 Oktober 2022

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
31	Dukungan Pendanaan Kegiatan Sosialisasi dan Workshop Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Sawit di Bangka Belitung kerja sama GAPKI	20 s.d. 21 Oktober 2022
32	Dukungan Pendanaan Webinar Sawit Baik 2022 bersama Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini Kerja Sama dengan JIM	14 dan 15 Oktober 2022
33	Dukungan Pendanaan kegiatan Sosialisasi dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 Di Papua bersama Anggota DPR RI Sulaeman Hamzah Kerja Sama dengan ASPEKPIR	29 s.d. 30 Oktober 2022
34	Dukungan Pendanaan Kegiatan Indonesian Palm Oil Stakeholders (IPOS) Forum 2022 kerja sama GAPKI SUMUT	20 s.d. 21 Oktober 2022
35	Dukungan Pendanaan Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Pelaksanaan Permentan NO 03 Tahun 2022 dan Perdirut BPDPKS No. 4 Tahun 2022 dalam rangka Percepatan Program Peremajaan Sawit wilayah DI Aceh kerja sama GAPKI Aceh	28 Oktober 2022
36	Dukungan Pendanaan kegiatan Spesial Dialog APKASINDO kerjas sama CNBC Indonesia	27 Oktober 2022
37	Dukungan Pendanaan kegiatan Pendukung Pertemuan Sherpa G20 Ke-4 di Bali	11 s.d. 14 November 2022
38	Dukungan Pendanaan kegiatan Festival Sawit Untuk Bangsa dalam Rangka Peringatan Hari Sawit Nasional 18 November 2022	14 s.d. 15 November 2022
39	Dukungan Pendanaan kegiatan International Conference On Indonesia Palm Biomass Potential di Jepang	17 s.d. 18 November 2022
40	Dukungan Pendanaan kegiatan Palm Oil Marathon tahun 2022	19-Nov-22
41	Dukungan Pendanaan kegiatan Andalas Forum III Tahun 2022 di Jambi	28 s.d. 29 November 2022
42	Dukungan Pendanaan Diskusi Sawit Forum Sawit Indonesia (FoSI) 2022 di Yogyakarta kerja sama Instiper	29 s.d. 30 November 2022
43	Dukungan Pendanaan kegiatan Program Diskusi Sawit kerja sama Tempo Media	30-Nov-22
44	Dukungan Pendanaan kegiatan Promosi Kelapa Sawit melalui Expo Hari Perkebunan Ke-65 di Jakarta.	21 s.d. 23 Desember 2022
45	Dukungan Pendanaan Kegiatan Kemitraan Webinar Demo Pembuatan Makanan Berbahan Sawit	5 Maret 2022
46	Dukungan Pendanaan Kegiatan Kemitraan Webinar Tren Bisnis Pangan dan Kuliner UKMK Berbasis Minyak Sawit Sehat	23 Maret 2022
47	Dukungan Pendanaan Kegiatan Kemitraan Webinar Dan Lomba Kreasi Pangan UKMK Berbahan Sawit	25 Mei 2022
48	Dukungan Pendanaan Kegiatan Aplikasi Coating Berbasis Sawit Kepada Petani Buah Swadaya di Malang	23 - 26 Mei 2022
49	Dukungan Pendanaan Kegiatan Aplikasi Coating Berbasis Sawit Kepada Petani Buah Swadaya di Yogyakarta	21 - 24 Juni 2022

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
50	Dukungan Pendanaan Kegiatan Aplikasi Coating Berbasis Sawit Kepada Petani Buah Swadaya di Cirebon / Bandung	26 - 29 Juli 2022
51	Dukungan Pendanaan Kegiatan Webinar Aplikasi Coating Berbasis Sawit Kepada Petani Buah Swadaya di Jakarta	4 Oktober 2022
52	Dukungan Pendanaan Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat Dan Temu UKMK Petani Sawit NU	4 - 5 Maret 2022
53	Dukungan Pendanaan Launching Kegiatan Kemitraan uKMK Wirausaha Pemuda Berbasis UKMK Sawit di Kawasan Barat Provinsi Aceh	8 Maret 2022
54	Dukungan Pendanaan Kegiatan Seminar Penguatan UKMK Perempuan Pekebun Sawit	23 Maret 2022
55	Dukungan Pendanaan Kegiatan Workshop Kerajinan Berbahan Lidi Sawit	24 - 27 Maret 2022
56	Dukungan Pendanaan Kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat dan Dialog Petani Sawit	24 Februari 2022
57	Dukungan Pendanaan Kegiatan Seminar Nasional Promosi Produk Hilir Kelapa Sawit	6 Juli 2022
58	Dukungan Pendanaan Kegiatan Workshop Teknologi Produksi Produk Hilir Kelapa Sawit di Kabupaten Banjar	21 - 21 September 2022
59	Dukungan Pendanaan Kegiatan Festival UMKM Merah Putih di Madiun	5 - 7 Agustus 2022
60	Dukungan Pendanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI	25 Agustus 2022
61	Dukungan Pendanaan Sponsorhip Kegiatan Workshop dan Exhibition di Banjarmasin dan Bali	25 - 27 Oktober 2022 dan 23 - 25 November 2022
62	Dukungan Pendanaan Kegiatan Bimtek Membangun Usaha UMKM Yang Sejahtera Di Wilayah Provinsi Riau Dengan Pola Kemitraan PIR	21 - 23 November 2022
63	Dukungan Pendanaan Kegiatan Kemitraan UKMK Sawit Program Pemanfaatan Limbah Sawit dalam Rangka Mewujudkan Ekonomi Sirkular untuk Kesejahteraan Masyarakat di Aceh	12 - 22 Oktober 2022
64	Dukungan Pendanaan Kegiatan Sosialisasi & Expo Sawit Baik 2022 dengan Tema "Hilirisasi Sawit Menuju Ketahanan Ekonomi Nasional di Magetan dan Ponorogo"	25 - 26 Oktober 2022
65	Dukungan Pendanaan Kegiatan Kemitraan UKMK Kelapa Sawit "Pengenalan dan Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit melalui UMKM di Yogyakarta"	15 - 16 November 2022

Sosialisasi dan Valuasi Teknologi untuk Komersialisasi Hasil Riset Kelapa Sawit BPDPKS  Ambassador Talkshow  22 Januari 2022  Sawit For People HMVR Hybrid Run  25 Desember 2021 – 10 Januari 2022  Seminar mengenai Aplikasi PSR dan Penggunaan  GPS/GNSS + Drone Operation Mapping  18 – 20 Januari 2022  70 GPS/GNSS + Drone Operation Mapping  18 – 20 Januari 2022  71 Chemical Engineering Special Event (CHEESE)  13 Februari 2022  72 Sosialisasi BPDPKS dalam Program PSR  18 Februari 2022  73 Temu Netizen : Kupas Tuntas Mitos dan Fakta Kelapa Sawit  74 Pertemuan Teknis Percepatan dan Pemetaan PSR  75 Kegiatan Lanjutan Pendampingan Teknis dalam Menghadapi Kebijakan Uni Eropa (RED dan DR) di Dispute Settlerment Body di WTO  FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota  76 Simboingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022  77 Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022  78 FGD Kiat Sukses PSR dalam rangka Mendukung Percepatan Program PSR 500.000 Ha  Promosi Produk Sawit  23 – 25 Maret 2022  80 Promosi Produk Sawit  23 – 25 Maret 2022  81 Expo Border Kaltara Palm Oil  25 – 27 Maret 2022  82 Talkshow MAKSI : Jendela Sawit Nusantara  83 Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit an Republikan Rejakan Materi Kelapa Sawit an Republikan Rejakan Materi Kelapa Sawit di 10 Provinsi  84 Penerbitan IJOP  2022 - 2023  Pembekalan Materi Kelapa Sawit di 10 Provinsi  85 Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta  86 Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  87 Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit unuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  88 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat  9 Juni 2022	NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
Sawit For People HMVR Hybrid Run  25 Desember 2021 – 10 Januari 2022  8eg Expo 2020 Dubai  Seminar mengenai Aplikasi PSR dan Penggunaan GPS/GNSS + Drone Operation Mapping  18 – 20 Januari 2022  71 Chemical Engineering Special Event (CHEESE)  13 Februari 2022  72 Sosialisasi BPDPKS dalam Program PSR  18 Februari 2022  73 Temu Netizen : Kupas Tuntas Mitos dan Fakta Kelapa Sawit  28 Februari 2022  74 Pertemuan Teknis Percepatan dan Pemetaan PSR  2022  75 Pertemuan Teknis Percepatan dan Pemetaan PSR  2022  76 Kegiatan Lanjutan Pendampingan Teknis dalam Menghadapi Kebijakan Uni Eropa (RED dan DR) di Dispute Settlement Body di WTO  77 Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022  78 FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota  8 Impoisium dan FGD Perkelapa Sawitan Indonesia Tahun 2022  80 Promosi Produk Sawit  23 – 25 Maret 2022  81 Expo Border Kaltara Palm Oil  25 – 27 Maret 2022  82 Talkshow MAKSI : Jendela Sawit Nusantara  2022  83 Regikain Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit  84 Penerbitan IJOP  2022 - 2023  85 Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta  2022 - 2023  86 Pempusian Regiatan Sawit Kelapa Sawit di 10 Provinsi  Pempekalan Materi Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  87 Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  2022  88 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  2022  89 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  2022	66		13 Juli 2021 s.d 13 Juli 2022
68 Expo 2020 Dubai 2021 - 100 Januari 2022 2021   70 Seminar mengenai Aplikasi PSR dan Penggunaan GPS/GNSS + Drone Operation Mapping 18 - 20 Januari 2022 2021 2022 2022 2023 2022 2022 2022	67	Ambassador Talkshow	22 Januari 2022
Seminar mengenai Aplikasi PSR dan Penggunaan GPS/GNSS + Drone Operation Mapping  18 – 20 Januari 2022  71 Chemical Engineering Special Event (CHEESE) 72 Sosialisasi BPDPKS dalam Program PSR 73 Temu Netizen : Kupas Tuntas Mitos dan Fakta Kelapa Sawit 74 Pertemuan Teknis Percepatan dan Pemetaan PSR 75 Kegiatan Lanjutan Pendampingan Teknis dalam Menghadapi Kebijakan Uni Eropa (RED dan DR) di Dispute Settlement Body di WTO  FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota  FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota  Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022  76 Simposium dan FGD Perkelapa Sawitan Indonesia Tahun 2022  77 Simposium dan FGD Perkelapa Sawitan Indonesia Tahun 2022  80 Promosi Produk Sawit  Expo Border Kaltara Palm Oil  20 22 25 Alaret 2022  81 Expo Border Kaltara Palm Oil  82 Talkshow MAKSI : Jendela Sawit Nusantara  83 Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit  84 Penerbitan IJOP  85 Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta  Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU  Angkatan ke-70  86 Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  FGD Mempercepat Realisasi PSR, SarPras dan Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  87 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  88 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  89 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  80 Puni 2022	68	Sawit For People HMVR Hybrid Run	
GPS/GNSS + Drone Operation Mapping  18 - 20 Januari 2022  71 Chemical Engineering Special Event (CHEESE)  72 Sosialisasi BPDPKS dalam Program PSR  73 Temu Netizen : Kupas Tuntas Mitos dan Fakta Kelapa Sawit  74 Pertemuan Teknis Percepatan dan Pemetaan PSR  75 Kegiatan Lanjutan Pendampingan Teknis dalam Menghadapi Kebijakan Uni Eropa (RED dan DR) di Dispute Settlement Body di WTO  76 FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota  77 Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 - 3 Maret 2022  78 FGD Kiat Sukses PSR dalam rangka Mendukung Percepatan Program PSR 500.000 Ha  79 Simposium dan FGD Perkelapa Sawitan Indonesia Tahun 2022  80 Promosi Produk Sawit  Expo Border Kaltara Palm Oil  Expo Border Kaltara Palm Oil  81 Expo Border Kaltara Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit Nusantara  82 2022  83 Pemetakhiran Buku Mitos vs Fakta  Pemebekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU  Angkatan ke-70  84 Penerbitan IJOP  Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  FGD Mempercepat Realisasi PSR, SarPras dan Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  85 Pemetitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  86 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  87 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  88 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  89 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  89 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  89 Punchitan Buku Mitos Valama Palma Dalu Perkebunan Sawit  9 Juni 2022	69	Expo 2020 Dubai	2021 - 2022
72 Sosialisasi BPDPKS dalam Program PSR 73 Temu Netizen : Kupas Tuntas Mitos dan Fakta Kelapa Sawit 74 Pertemuan Teknis Percepatan dan Pemetaan PSR 75 Kegiatan Lanjutan Pendampingan Teknis dalam Menghadapi Kebijakan Uni Eropa (RED dan DR) di Dispute Settlement Body di WTO 76 FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota 77 Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022 78 Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022 79 Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022 70 Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022 70 Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022 71 Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022 72 pada 11 – 13 Maret 2022 73 Program PSR 500.000 Ha 74 Program PSR 500.000 Ha 75 Promosi Produk Sawit 76 Samposium dan FGD Perkelapa Sawitan Indonesia Tahun 2022 77 Promosi Produk Sawit 88 Promosi Produk Sawit 89 Penerbitan IJOP 80 2022 - 2023 80 Promosi Produk Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit Nusantara 80 2022 81 Expo Border Kaltara Palm Oil 82 2022 - 2023 82 Talkshow MAKSI : Jendela Sawit Nusantara 83 Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit 84 Penerbitan IJOP 85 Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta 86 Pemetakan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU 87 Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi 88 Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi 89 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit 89 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit 89 Puni 2022	70		18 – 20 Januari 2022
Temu Netizen : Kupas Tuntas Mitos dan Fakta Kelapa Sawit  28 Februari 2022  74 Pertemuan Teknis Percepatan dan Pemetaan PSR  Kegiatan Lanjutan Pendampingan Teknis dalam Menghadapi Kebijakan Uni Eropa (RED dan DR) di Dispute Settlement Body di WTO  75 FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota  76 Sawit di 7 kota  77 Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022  78 FGD Kiat Sukses PSR dalam rangka Mendukung Percepatan Program PSR 500.000 Ha  79 Simposium dan FGD Perkelapa Sawitan Indonesia Tahun 2022  80 Promosi Produk Sawit  23 – 25 Maret 2022  81 Expo Border Kaltara Palm Oil  2022  82 Talkshow MAKSI : Jendela Sawit Nusantara  83 Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit  84 Penerbitan IJOP  86 Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta  87 Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU  Angkatan ke-70  88 Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit tol 10 Provinsi  89 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  80 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  81 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  82 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  83 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  84 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  85 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit	71	Chemical Engineering Special Event (CHEESE)	13 Februari 2022
74 Pertemuan Teknis Percepatan dan Pemetaan PSR 2022  Kegiatan Lanjutan Pendampingan Teknis dalam Menghadapi Kebijakan Uni Eropa (RED dan DR) di Dispute Settlement Body di WTO  FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota  FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota  FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota  FGD Kiat Sukses PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022  2022  FGD Kiat Sukses PSR dalam rangka Mendukung Percepatan Program PSR 500.000 Ha  Simposium dan FGD Perkelapa Sawitan Indonesia Tahun 2022  80 Promosi Produk Sawit  Expo Border Kaltara Palm Oil  Expo Border Kaltara Palm Oil  25 – 27 Maret 2022  81 Expo Border Kaltara Palm Oil  Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit  Relembagaan Petani Kelapa Sawit kepada SESPARLU  Angkatan ke-70  Rengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  Rakyat  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  Rakyat  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  Rakyat	72	Sosialisasi BPDPKS dalam Program PSR	18 Februari 2022
Kegiatan Lanjutan Pendampingan Teknis dalam Menghadapi Kebijakan Uni Eropa (RED dan DR) di Dispute Settlement Body di WTO  FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota  FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota  FGD Kiat Sukses PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022  FGD Kiat Sukses PSR dalam rangka Mendukung Percepatan Program PSR 500.000 Ha  Simposium dan FGD Perkelapa Sawitan Indonesia Tahun 2022  Bi Expo Border Kaltara Palm Oil  Expo Border Kaltara Palm Oil  Talkshow MAKSI: Jendela Sawit Nusantara  Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit  Relembagaan Petani Kelapa Sawit  Penerbitan IJOP  Penerbitan Buku Mitos vs Fakta  Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU Angkatan ke-70  Repugijan Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  Rakyat  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  Pauda 11 – 13 Maret 2022  2022  2022  23 – 25 Maret 2022  25 – 27 Maret 2022  2022  2022  2022  13 Maret 2022  2022  14 Penerbitan IJOP  2022 - 2023  2022  2022  2023  2022  2024  2026  2026  2027  2029  2029  2020  2020  2020  2021  2022  2022  2023  2024  2026  2027  2029  2029  2020  2020  2020  2021  2021  2022  2023  2022  2023  2023  2024  2024  2025  2026  2026  2027  2027  2028  2029  2029  2020	73	Temu Netizen : Kupas Tuntas Mitos dan Fakta Kelapa Sawit	28 Februari 2022
75Kebijakan Uni Eropa (RED dan DR) di Dispute Settlement Body di WTOFebruari – Juli 202276FGD Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Petani Kelapa Sawit di 7 kota202277Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022202278FGD Kiat Sukses PSR dalam rangka Mendukung Percepatan Program PSR 500.000 Hapada 11 – 13 Maret 202279Simposium dan FGD Perkelapa Sawitan Indonesia Tahun 202213 Maret 202280Promosi Produk Sawit23 – 25 Maret 202281Expo Border Kaltara Palm Oil25 – 27 Maret 202282Talkshow MAKSI : Jendela Sawit Nusantara202283Kelembagaan Petani Kelapa Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit202284Penerbitan IJOP2022 - 202385Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta2022 - 202386Angkatan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU Angkatan ke-7018 Mei 202287Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi25 Mei 202288Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan202289Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat9 Juni 2022	74	Pertemuan Teknis Percepatan dan Pemetaan PSR	2022
76Sawit di 7 kota202277Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022202278FGD Kiat Sukses PSR dalam rangka Mendukung Percepatan Program PSR 500.000 Hapada 11 – 13 Maret 202279Simposium dan FGD Perkelapa Sawitan Indonesia Tahun 202213 Maret 202280Promosi Produk Sawit23 – 25 Maret 202281Expo Border Kaltara Palm Oil25 – 27 Maret 202282Talkshow MAKSI : Jendela Sawit Nusantara202283Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit202284Penerbitan IJOP2022 - 202385Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta2022 - 202386Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU Angkatan ke-7018 Mei 202287Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi25 Mei 202288FGD Mempercepat Realisasi PSR, SarPras dan Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan202289Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat9 Juni 2022	75	Kebijakan Uni Eropa (RED dan DR) di Dispute Settlement	Februari – Juli 2022
FGD Kiat Sukses PSR dalam rangka Mendukung Percepatan Program PSR 500.000 Ha  pada 11 – 13 Maret 2022  Simposium dan FGD Perkelapa Sawitan Indonesia Tahun 2022  Promosi Produk Sawit 23 – 25 Maret 2022  Expo Border Kaltara Palm Oil 25 – 27 Maret 2022  Talkshow MAKSI : Jendela Sawit Nusantara 2022  Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit 2022  Penerbitan IJOP 2022 - 2023  Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta 2022 - 2023  Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU Angkatan ke-70 18 Mei 2022  Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi 25 Mei 2022  FGD Mempercepat Realisasi PSR, SarPras dan Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan 2022  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat 9 Juni 2022	76		2022
Program PSR 500.000 Ha  Simposium dan FGD Perkelapa Sawitan Indonesia Tahun 2022  Promosi Produk Sawit  Expo Border Kaltara Palm Oil  Talkshow MAKSI : Jendela Sawit Nusantara  Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit  Penerbitan IJOP  Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta  Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU Angkatan ke-70  Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat  Pada 11 – 13 Maret 2022  13 Maret 2022  23 – 25 Maret 2022  25 – 27 Maret 2022  2022  2022  2022  2022  2022  2022  2023  2022 - 2023  2022 - 2023  2022 - 2023  2022 - 2023  2022 - 2023  2022 - 2023  Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi 25 Mei 2022  2022  Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  2022	77	Bimbingan Teknis PSR Banten pada 2 – 3 Maret 2022	2022
79 2022 13 Maret 2022  80 Promosi Produk Sawit 23 – 25 Maret 2022  81 Expo Border Kaltara Palm Oil 25 – 27 Maret 2022  82 Talkshow MAKSI: Jendela Sawit Nusantara 2022  83 Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit 2022  84 Penerbitan IJOP 2022 - 2023  85 Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta 2022 - 2023  86 Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU Angkatan ke-70 18 Mei 2022  87 Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi 25 Mei 2022  88 FGD Mempercepat Realisasi PSR, SarPras dan Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan 2022  88 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit 9 Juni 2022	78		pada 11 – 13 Maret 2022
Expo Border Kaltara Palm Oil  25 – 27 Maret 2022  Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit  2022  Remutakhiran Buku Mitos vs Fakta  Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU Angkatan ke-70  Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Pluni 2022  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Pluni 2022	79		13 Maret 2022
Talkshow MAKSI : Jendela Sawit Nusantara  Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit  Penerbitan IJOP  Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta  Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU Angkatan ke-70  Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat  Pauri 2022	80	Promosi Produk Sawit	23 – 25 Maret 2022
Rangkaian Kegiatan Sawit Goes to School & FGD Penguatan Kelembagaan Petani Kelapa Sawit  2022  84 Penerbitan IJOP  85 Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta  2022 - 2023  86 Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU  Angkatan ke-70  87 Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  88 FGD Mempercepat Realisasi PSR, SarPras dan Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  2022  88 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  Rakyat  89 Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit  Rakyat	81	Expo Border Kaltara Palm Oil	25 – 27 Maret 2022
Kelembagaan Petani Kelapa Sawit  Penerbitan IJOP  Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta  Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU Angkatan ke-70  Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat  Panerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit	82	Talkshow MAKSI : Jendela Sawit Nusantara	2022
Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta  Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU Angkatan ke-70  Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  FGD Mempercepat Realisasi PSR, SarPras dan Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat  Panari Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  25 Mei 2022  Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi 25 Mei 2022	83		2022
Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU Angkatan ke-70  Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi  FGD Mempercepat Realisasi PSR, SarPras dan Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat  Panis Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat	84	Penerbitan IJOP	2022 - 2023
Pembekalan Materi Kelapa Sawit kepada SESPARLU Angkatan ke-70 18 Mei 2022  Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi 25 Mei 2022  FGD Mempercepat Realisasi PSR, SarPras dan Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan 2022  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat 9 Juni 2022	85	Pemutakhiran Buku Mitos vs Fakta	
FGD Mempercepat Realisasi PSR, SarPras dan Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat  9 Juni 2022	86		18 Mei 2022
Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki Tata Kelola Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan  Penerbitan dan Pendistribusian Buku Perkebunan Sawit Rakyat  9 Juni 2022	87	Pengujian Rendemen TBS Kelapa Sawit di 10 Provinsi	25 Mei 2022
89 Rakyat 9 Juni 2022	88	Pengembangan SDM Pekebun Sawit untuk Memperbaiki	2022
90 Promosi Sawit Untuk Kehidupan 2022	89		9 Juni 2022
	90	Promosi Sawit Untuk Kehidupan	2022

FGD Penggunaan Aplikasi PSR dan GPS/GNSS + Drone Operation Mapping dalam rangka Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Banten  7 s.d 9 Juni 2022  Penggunaan Aplikasi PSR Drone Mapping  22 s.d 24 Juni 202  Regiatan Bimbingan Teknis & Expo Sawit Baik Indonesia Juni 2022  2022 – Anggota DPR Andi Akmal  Juni 2022  1 s.d 3 Juli 2022  Palm Movement Good and Sustainable Palm Oil For Indonesia's Future  22 & 24 Juli 202  International Conference on Biomass and Bioenergy (ICBB) 2022  Seminar: Penguatan Kapasitas SDM Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani  2 Agustus 2022  FGD Mewujudkan Perkebunan Sawit Rakyat Berkelanjutan Melalui Pola Inti Plasma di Provinsi Riau  FGD "Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Melalui Revisi Permentan 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Pekebun"  Seminar Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Pekebun Sumut (ISPO)  101 FGD Menuju Indonesi Sustainable Palm Oil  PGD Peningkatan Kapasitas Petani dan Tenaga Kerja di Sektor Kelapa Sawit  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  103 DPR Salim Fakhry  104 Kesejahteraan Petani  105 Agustus 2022  106 Bimtek dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  107 Anggota DPR Suhardi Duka  108 Bimtek dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  109 Bimtek dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  100 Bimtek dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  101 Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  102 Anggota DPR Suhardi Duka  103 Bimtek dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  104 Anggota DPR Suhardi Duka  105 Bimtek dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan  Rozak  107 Alaksasa	SANAAN
Kegiatan Bimbingan Teknis & Expo Sawit Baik Indonesia 2022 – Anggota DPR Andi Akmal	022
93 2022 – Anggota DPR Andi Akmal  94 20th Indonesia Agrofood Tahun 2022  Palm Movement Good and Sustainable Palm Oil For Indonesia's Future  95 International Conference on Biomass and Bioenergy (ICBB) 2022  1 s.d 2 Agustus 202  Seminar: Penguatan Kapasitas SDM Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani  2 Agustus 2022  FGD Mewujudkan Perkebunan Sawit Rakyat Berkelanjutan Melalui Pola Inti Plasma di Provinsi Riau  11 s.d 12 Agustus dan 21 Agustus 2022  FGD "Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Melalui Revisi Permentan 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Pekebun"  Seminar Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Pekebun Sumut (ISPO)  100 Bromiul Indonesi Sustainable Palm Oil  7 – 9 September 201  Workshop Membangun Citra Positif Kelapa Sawit Melalui Peningkatan Kapasitas Petani dan Tenaga Kerja di Sektor Kelapa Sawit  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 - DPR Salim Fakhry  FGD Penguatan Kemitraan dalam Pelaksanaan PSR untuk Kesejahteraan Petani  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 - Anggota DPR Suhardi Duka  Bimtek dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan Rozak  Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry	2022
Palm Movement Good and Sustainable Palm Oil For Indonesia's Future  22 & 24 Juli 2022  International Conference on Biomass and Bioenergy (ICBB) 2022  1 s.d 2 Agustus 202  Seminar: Penguatan Kapasitas SDM Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani  2 Agustus 2022  FGD Mewujudkan Perkebunan Sawit Rakyat Berkelanjutan Melalui Pola Inti Plasma di Provinsi Riau  11 s.d 12 Agustus dan 21 Agustus 2022  FGD "Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Melalui Revisi Permentan 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Pekebun"  Seminar Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Pekebun Sumut (ISPO)  101 FGD Menuju Indonesi Sustainable Palm Oil  102 Workshop Membangun Citra Positif Kelapa Sawit Melalui Peningkatan Kapasitas Petani dan Tenaga Kerja di Sektor Kelapa Sawit  103 DPR Salim Fakhry  104 FGD Penguatan Kemitraan dalam Pelaksanaan PSR untuk Kesejahteraan Petani  105 Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  106 Bimtek dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan Rozak  Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry	
95	)22
Seminar: Penguatan Kapasitas SDM Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani 2 Agustus 2022  FGD Mewujudkan Perkebunan Sawit Rakyat Berkelanjutan Melalui Pola Inti Plasma di Provinsi Riau 11 s.d 12 Agustus dan 21 Agustus 2022  FGD "Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Melalui Revisi Permentan 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Pekebun" Agustus 2022  Seminar Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Pekebun Sumut (ISPO) 2 - 4 September 20  Workshop Membangun Citra Positif Kelapa Sawit Melalui Peningkatan Kapasitas Petani dan Tenaga Kerja di Sektor Kelapa Sawit Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 - DPR Salim Fakhry 17 - 19 September 2022  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 - 15 Anggota DPR Suhardi Duka 13 Oktober 2022  Bimtek dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 - 13 dan 16 Oktober 2023  Bimtek dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan Rozak 50 Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry	022
97 Sawit Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani 2 Agustus 2022  98 FGD Mewujudkan Perkebunan Sawit Rakyat Berkelanjutan Melalui Pola Inti Plasma di Provinsi Riau 11 s.d 12 Agustus dan 21 Agustus 2022  99 FGD "Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Melalui Revisi Permentan 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Pekebun" Agustus 2022  100 Seminar Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Pekebun Sumut (ISPO) 2 - 4 September 20  101 FGD Menuju Indonesi Sustainable Palm Oil 7 - 9 September 20  102 Workshop Membangun Citra Positif Kelapa Sawit Melalui Peningkatan Kapasitas Petani dan Tenaga Kerja di Sektor Kelapa Sawit Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 - DPR Salim Fakhry 17 - 19 September 2022  103 DPR Salim Fakhry 17 - 19 September 2022 - DPR Salim Fakhry 13 Oktober 2022  105 Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 - Anggota DPR Suhardi Duka 13 dan 16 Oktober 2022  106 Bimtek dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan Rozak 22 Oktober Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry	2022
Melalui Pola Inti Plasma di Provinsi Riau  FGD "Peningkatan Kesejahteraan Pekebun Melalui Revisi Permentan 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Pekebun"  Seminar Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Pekebun Sumut (ISPO)  101 FGD Menuju Indonesi Sustainable Palm Oil  102 Workshop Membangun Citra Positif Kelapa Sawit Melalui Peningkatan Kapasitas Petani dan Tenaga Kerja di Sektor Kelapa Sawit  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 - DPR Salim Fakhry  104 FGD Penguatan Kemitraan dalam Pelaksanaan PSR untuk Kesejahteraan Petani  105 Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  106 Bimtek dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  107 Bimtek dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  108 Bimtek dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  109 Bimtek dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan Rozak  Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry	22
Permentan 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Pekebun"  Seminar Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk Pekebun Sumut (ISPO)  101 FGD Menuju Indonesi Sustainable Palm Oil  102 Workshop Membangun Citra Positif Kelapa Sawit Melalui Peningkatan Kapasitas Petani dan Tenaga Kerja di Sektor Kelapa Sawit  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 - DPR Salim Fakhry  104 FGD Penguatan Kemitraan dalam Pelaksanaan PSR untuk Kesejahteraan Petani  105 Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  106 Bimtek dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan Rozak  Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry  Agustus 2022  1 4 September 20  1 2 - 9 September 20  1 2 s.d 14 September 20  1 3 - 19 September 20  1 3 Oktober 2022  1 3 dan 16 Oktober 2022  1 3 dan 16 Oktober 2022  1 3 dan 16 Oktober 2022	
100 Berkelanjutan untuk Pekebun Sumut (ISPO)  101 FGD Menuju Indonesi Sustainable Palm Oil  102 Workshop Membangun Citra Positif Kelapa Sawit Melalui Peningkatan Kapasitas Petani dan Tenaga Kerja di Sektor Kelapa Sawit  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 - DPR Salim Fakhry  104 FGD Penguatan Kemitraan dalam Pelaksanaan PSR untuk Kesejahteraan Petani  105 Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  106 Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  107 Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  108 Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  109 Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  100 Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan 100 Rozak  100 Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry	?2
Workshop Membangun Citra Positif Kelapa Sawit Melalui Peningkatan Kapasitas Petani dan Tenaga Kerja di Sektor Kelapa Sawit  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 - DPR Salim Fakhry  FGD Penguatan Kemitraan dalam Pelaksanaan PSR untuk Kesejahteraan Petani  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 Anggota DPR Suhardi Duka  Bimtek dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan Rozak  Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry	· 2022
Peningkatan Kapasitas Petani dan Tenaga Kerja di Sektor Kelapa Sawit  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 - DPR Salim Fakhry  FGD Penguatan Kemitraan dalam Pelaksanaan PSR untuk Kesejahteraan Petani  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 Anggota DPR Suhardi Duka  Bimtek dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan Rozak  Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry	2022
DPR Salim Fakhry  17 – 19 September 2  FGD Penguatan Kemitraan dalam Pelaksanaan PSR untuk Kesejahteraan Petani  13 Oktober 2022  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 Anggota DPR Suhardi Duka  13 dan 16 Oktober 2  Bimtek dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan Rozak  Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry	er 2022
104 Kesejahteraan Petani  13 Oktober 2022  Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022  Anggota DPR Suhardi Duka  13 dan 16 Oktober 2  13 dan 16 Oktober 2  Bimtek dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan Rozak  Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry	ər 2022
105 Anggota DPR Suhardi Duka  13 dan 16 Oktober 2  Bimtek dan Expo Sawit Baik 2022 - dengan DPR RI Hanan Rozak  Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry	)22
106 Rozak tanggal 15 & 22 Oktobe Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Fachry	er 2022
	ober 2022
107 Pahlevi 17 Oktober 2022	)22
108 Trade Expo Indonesia ke-37 19 – 23 Oktober 20	2022
Seminar indonesian Sustainable Palm Oil dan Expo UMKM berbahan Sawit 23 - 25 Oktober 20	2022
110 Sosialisasi dan Expo Sawit baik 2022 - DPR RI Muhtarom 23 dan 27 oktober 2	r 2022

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
111	Plantation Festival 2022: Peran Mahasiswa Perkebunan dalam Mengawal secara langsung Perkembangan Dunia Industri Kreatif Indonesia Pada Masa Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19	24 Oktober 2022
112	Seminar Peran Pemuda Dalam Transisi Energi Berkelanjuatan Berbasis Sektor Kelapa Sawit	25 - 27 Oktober 2022
113	International Conference on Natural Resources and Environmental Conservation (ICNREC)	27 Oktober 2022
114	Indonesian Palm Oil Conference (IPOC)	2 - 4 November 2022
115	COP-27 UNFCCC	6 – 18 November 2022
116	Sustainable Innovation Forum (SIF)	6 – 13 November 2022
117	FGD Indonesia Sustainable Palm Oil	7 – 10 November 2022
118	Seminar dengan tema Sosialisasi kepada Masyarakat Petani di Sumatera Utara Tentang Peran dan Fungsi BPDPKS	13 November 2022
119	Indonesian Cooking Festival	November 2022
120	2nd Indonesian Palm Oil Smallholders Conference & Expo	29 – 30 November 2022
121	Sosialisasi Bimtek dan Expo Sawit 2022 – Anggota DPR Endang Setyawati	12 November 2022
122	FGD Indonesia Sustainable Palm Oil Petani Kelapa Sawit Rakyat	13 – 15 November 2022
123	Sosialisasi Replanting dan Produk Turunan Sawit – Anggota DPR T.A Khalid	16 November 2022
124	Sosialisasi Sawit Baik 2022 – Anggota DPR Djarot Saiful Hidayat	21 November 2022
125	Sosialisasi dan Expo Sawit Baik 2022 – Anggota DPR Mohammad Syafrudin	23 November 2022
126	Sosialisasi Sawit Baik 2022 – Anggota DPR Nuraeni	24 November 2022
127	Sosialisasi Bimtek dan Expo Sawit 2022 – Anggota DPR Teti Rohatiningsih	26 November 2022
128	Sosialisasi Sawit Baik 2022 – Anggota DPR Endrp Hermono	30 November 2022
129	Expo Border Kaltara Palm Oil	6 – 7 Desember 2022
130	Valuasi dan Komersialisasi Hasil Riset Kelapa Sawit 2015 - 2021	2022 -2023
131	Sosialisasi dan Expo Sawit Baik 2022 – Anggota DPR Kamarussamad	Desember 2022
132	FGD Indonesia Sustainable Palm Oil Petani Kelapa Sawit Rakyat	1 – 3 Desember 2022
	Inisiatif Internal	

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Website BPDPKS, Media Sosial BPDPKS, dan Media Monitoring BPDPKS	Tahun 2022
2	Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Call Center BPDPKS 14036 tahun 2022	Januari s.d. September 2022
3	Pelaksanaan kegiatan Promosi Sawit Palm Oil Edu Talk Wilayah Jawa Timur	17 s.d. 19 Maret 2022
4	Pelaksanaan kegiatan promosi sawit Talkshow GenSawit Eps. I	28 Maret 2022
5	Pelaksanaan Kegiatan Talkshow Sawit GenSawit Corner Eps. II "CPO Untuk Pangan dan Energi, Cukupkah Pasokan Dalam Negeri" ?	28-Apr-22
6	Pelaksanaan kegiatan Promosi Sawit Palm Oil Edu Talk Wilayah Sulawesi Selatan	17 s.d. 19 Juni 2022
7	Pelaksanaan Kegiatan Talkshow Gen Sawit Corner Episode III "Sawit Komoditas Ekspor Strategis & Peluang Startup dalam Ekspor Sawit dan Turunannya"	29 Juni 2022
8	Pelaksanaan kegiatan Program Wakil Rakyat Bicara Sawit Tahun 2022 dengan Tema "Strategi Menaikkan dan Menjaga Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Nasional"	18 s.d. 19 Agustus 2022
9	Pelaksanaan kegiatan Talkshow Gen Sawit Corner Episode IV "Apa yang Mempengaruhi Harga CPO"	26 Agustus 2022
10	Pelaksanaan Kegiatan Publikasi Petani Milenial Sawit pada program Lentera NET TV kolaborasi dengan Divisi Umum dan SDM	September s.d. Oktober 2022
11	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Sawit melalui media sosial Tik Tok	Oktober 2022
12	Pelaksanaan Kegiatan Talkshow Gen Sawit Corner Episode V "Keutamaan & Aspek Sustainability Minyak Sawit Untuk Consumer Goods"	31 Oktober 2022
13	Pelaksanaan Kegiatan Workshop Promosi Digitalisasi & Hilirisasi Produk Sawit Skala UKMK Batch I di Balikpapan	1 - 3 Maret 2022
14	Pelaksanaan Kegiatan Workshop Promosi Digitalisasi & Hilirisasi Produk Sawit Skala UKMK Batch II di Padang	30 Maret - 1 April 2022
15	Pelaksanaan Kegiatan Workshop Promosi Prosedur, Pembiayaan Serta Penerapan Digitalisasi Proses Ekspor Produk UMKM Sawit Batch III di Batam	6 - 8 Juli 2022
16	Pelaksanaan Kegiatan Talkshow dan Pameran Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu Di Jakarta	7 - 8 Juni 2022
17	Pelaksanaan Kegiatan Talkshow dan Pameran Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu Di Prov. Riau	23 - 25 Agustus 2022
18	Pelaksanaan Kegiatan Talkshow dan Pameran Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu Di Prov. Jawa Timur	28 - 30 September 2022
19	Pelaksanaan Kegiatan Talkshow dan Pameran Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu Di Prov. Lampung	18 - 19 Oktober 2022

NO	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
20	Pelaksanaan Kegiatan FGD Sosialisasi PERMENTAN No 03 Tahun 2022	31 Maret 2022
21	Pelaksanaan Kegiatan Dokumentasi Foto Perkebunan Kelapa Sawit	Mei 2022
22	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Sawit pada 20th Indonesia Agrofood Tahun 2022	1 s.d 3 Juli 2022
23	Pelaksanaan Kegitaan Editing Video dan Pemasangan Iklan pada platform media social dalam rangka optimalisasi Kampanye Digital BPDPKS	Juli 2022
24	Pelaksanaan Kegiatan Usulan Riset Inisiatif Pengembangan Teknologi Produksi Percontohan Mix Industrial Vegetable Oil (MIVO) sebagai Bahan Baku Bensin Sawit dan Minyak Sehat	Juli 2022
25	Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Kampanye Digital BPDPKS Melalui Pemasangan Iklan Pada Tiktok, Dan Instagram	Oktober - November 2022
26	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Sawit pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37	19 – 23 Oktober 2022
27	Pelaksanaan Kegiatan Booth Pameran BPDPKS pada Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2022	2 - 4 November 2022
28	Pelaksanaan Kegiatan Press Conference BPDPKS 2022	22 Desember 2022

Tindakan yang telah dilaksanakan:

Penetapan standar laporan kegiatan Promosi dan Kemitraan yang mencantumkan rekomendasi tindak lanjut kegiatan.

Rekomendasi atau rencana aksi berupa Pemantauan perkembangan isu-isu yang terkait sawit, khususnya yang dapat berdampak pada penurunan ekspor sawit dan penurunan permintaan di dalam negeri dan melaksanakan tindak lanjut rekomendasi kegiatan promosi sawit sebelumnya atau rekomendasi kegiatan strategis terkait sawit dari Kementerian anggota Komite Pengarah BPDPKS.

# 6. IKU Persentase penyelesaian kerjasama dalam rangka perluasan pasar ekspor sawit baru (4c-N)

Penyampaian informasi ke stakeholder dan masyarakat tentang fakta objektif kelapa sawit dan program-program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dalam mendukung pencapaian kelapa sawit yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan citra nilai produk sawit serta sebagai sarana branding BPDPKS. Kegiatan komunikasi dilakukan secara tepat sasaran dan menggunakan media komunikasi yang efisien dan efektif mencapai sasaran dan tujuan. selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Pasal 11 ayat 1 huruf c bahwa dana yang dihimpun oleh BPDPKS digunakan untuk kepentingan promosi perkebunan kelapa sawit. Kegiatan promosi harus sesuai dengan strategi pengembangan perkebunan sawit yang ditetapkan pemerintah dan sesuai dengan kebutuhan para pekebun dan pelaku usaha perkebunan dan industri sawit. Untuk itu, kegiatan promosi perlu dilakukan dengan

menjalin kemitraan/hubungan kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Sawit, Perusahaan, Petani, UKM, Koperasi, dan badan hukum lainnya. Kemitraan tersebut juga akan memperluas capaian sasaran dari kegiatan promosi sawit.

Definisi IKU ini adalah mengukur capaian kegiatan promosi, misi dagang, negosiasi bilateral, dan negosiasi forum multilateral yang didukung atau diikuti oleh BPDPKS yang menghasilkan komitmen perdagangan atau pengurangan hambatan regulasi terkait produk kelapa sawit dan turunannya di negara-negara yang bukan merupakan negara tujuan ekspor utama produk kelapa sawit Indonesia. Bentuk komitmen dapat berupa Nota Kesepahaman (MoU, MoC, MoA), Perjanjian Bilateral maupun Multilateral, maupun Transaksi yang dilakukan secara Business to Business, Business to Government, dan/atau Government to Government. Termasuk dalam kategori perluasan ekspor adalah pengenalan/penjualan jenis produk turunan sawit ke suatu negara yang bukan merupakan jenis produk ekspor utama komoditas sawit di negara tersebut.

# Formula yang digunakan yaitu:

% Peny. Kerja Sama Perluasan Pasar Ekspor =  $\frac{\sum_{i}^{n}(Indeks\ Capaian\ Kegiatan\ Perluasan\ Ekspor\ Sawit)}{N}$   $x\ 100\%$ 

# Keterangan:

Notorangan.	
Persentase capaian kegiatan perluasan ekspor sawit:	
Tersusunnya rencana kegiatan perluasan pasar ekspor sawit	= 60
2. Pengusulan pelaksanaan kegiatan perluasan pasar ekspor sawit	= 80
Kegiatan perluasan pasar ekspor sawit terlaksana	= 100
4. Kegiatan menghasilkan Nota Kesepahaman dan/atau komitmen transaksi	= 110
5. Kegiatan menghasilkan Perjanjian Kerja Sama (bilateral/multilateral) dan/atau transaksi ekspor	= 120
N = Jumlah kegiatan	

Tujuan IKU ini adalah Mengukur kualitas kegiatan promosi sawit yang bertujuan mengembangkan pasar ekspor sawit di negara-negara yang bukan merupakan negara-negara utama tujuan ekspor produk sawit dan turunannya.

## Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

	IV- Komunikasi publik dan kemitraan yang efektif							
4c-N IKU Persentase penyelesaian kerjasama dalam rangk perluasan pasar ekspor sawit baru						rangka		
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K P
Target	-	-	ı	-	-	100%	100%	
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	133%	133%	Max / TLKV
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	133%	133%	

#### Isu utama IKU ini adalah:

- 1) Mengukur kualitas kegiatan promosi, misi dagang, negosiasi bilateral, dan negosiasi forum multilateral yang didukung atau diikuti oleh BPDPKS.
- 2) Penilaian kualitas kegiatan secara bertahap dari Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, Kegiatan yg menghasilkan Nota Kesepahamana dan/atau komitmen transaksi, dan Kegiatan yang menghasilkan Perjanjian Kerja Sama yg mengikat dan/atau Transaksi Ekspor.
- 3) Target capaian IKU adalah implementasi 6 (enam) kegiatan perluasan ekspor sawit, yang perhitungannya dilakukan pada triwulan IV 2022.
- 4) Sampai dengan bulan November 2022, telah dilakukan koordinasi dengan K/L dan KBRI terkait potensi dan peluang pengembangan pasar CPO dan turunannya ke negara-negara tujuan perluasan ekspor serta pelaksanaan kegiatan perluasan pasar.
- 5) Realisasi kegiatan sampai dengan Desember 2022 sebanyak 8 kegiatan, yaitu:
  - a) Dukungan Pendanaan kegiatan *International Conference on Biomass and Bioenergy (ICBB)* 2022
  - b) Partisipasi sebagai *Partner Country* pada pameran dan konferensi GlobOil India 2022 di Agra pada 21 s.d. 24 September 2022.
  - c) Dukungan pendanaan *International Palm Oil Conference* (IPOC) tahun 2022 pada 2 s.d. 4 November 2022.
  - d) Dukungan pendanaan Vegetable Oil Summit pada 3 November 2022.
  - e) Dukungan pendanaan partisipasi Sawit Indonesia pada COP 27 di Mesir pada 6 s.d. 13 November 2022.
  - f) Dukungan pendanaan partisipasi Sawit Indonesia pada SIF 2022 di Mesir pada 6 s.d. 12 November 2022.
  - g) Dukungan pendanaan kegiatan Trade Expo Indonesia 2022.
  - h) Dukungan Pendanaan partisipasi promosi cangkang sawit pada International Biomass Expo di Osaka, Jepang pada 15 s.d. 17 November 2022.

#### Tindakan yang telah dilaksanakan:

- 1. Melanjutkan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan KBRI untuk informasi peluang pengembangan pasar sawit di negara-negara target.
- 2. Dukungan pendanaan kegiatan promosi sawit bertaraf internasional di dalam negeri.

### Rekomendasi rencana aksi berupa:

- 1. Penyusunan rencana kegiatan perluasaan pasar tahun 2023.
- 2. Penerbitan artikel promosi sawit di media massa negara tujuan perluasan pasar dengan kerja sama dengan kantor berita resmi negara tersebut.

# 7. IKU Persentase penyaluran dana peremajaan sawit rakyat (5a-N)

Pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk program peremajaan, sarana prasarana, pendidikan dan pelatihan SDM, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit secara tepat sasaran dan tepat waktu sesuai amanat Perpres Nomor 61 Tahun 2015.

Persentase penyaluran dana PSR dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomtek Dirjenbun Kementan yang telah disalurkan dananya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomtek yang telah diterima oleh BLU BPDPKS.

## Formula yang digunakan yaitu:

 $\frac{\underline{\Sigma}\text{rekomtek yang telah disalurkan dananya Tahun 2022}}{\underline{\Sigma}\text{rekomtek yg diterima dr DitjenBun Kementan}} \ \ x \ 50\% \ \ + \frac{\underline{\Sigma}\text{Luasan lahan yang disalurkan 2022 (Luasan Ha)}}{50.000 \ \text{Ha}} \ \ x \ 50\%$ 

## Data yang diperlukan:

- Laporan Monev Peremajaan Sawit Rakyat (replanting)
- Laporan Keuangan Tahun 2022
- Daftar Rekomtek Direktorat Jenderal Perkebunan

## Tujuan dari IKU ini adalah:

- 1. Peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit
- 2. Peningkatan luasan lahan sawit yang diremajakan.

# Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

BPDPKS	V- Pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan										
BFDFRS	5a-N IKU Persentase penyaluran dana peremajaan sawit rakyat										
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K P			
Target	50%	60%	60%	75%	75%	100%	100%				
Realisasi	60,,18 %	63,83%	63,83%	64,96%	64,96%	80,76%	80,76%	Max / Averag e			
Capaian	120%	106%	106%	86,6%	86,6%	80,76%	80,76%	Ü			

### Realisasi:

			Target /		
No	Uraian	Realisasi	diselesaikan	%	Capaian
1	2	3	4	5	6= ((3/4)x5)
1	Rekomtek	185	185	50%	50,00%
2	Luasan Lahan (ha)	30.759	50.000	50%	30,76%
Total					80,76%

Dari tahun 2016 s.d 2022 realisasi penyaluran dana PPKS seluas 273.666 Ha untuk Pekebun Sebanyak 120.168 Orang dengan dana PPKS sebesar Rp7,53 Triliun



Tabaaa	Tabaaa	R Per Tahun				
Tahun Penyaluran	Tahun Rekomtek	Proposal	Pekebun (org)	Luasan (Ha)	uasan (Ha) Total Luas Dana PSR (Rp)	
2016	2016	1	116	254	254	6,350,000,000
2017	2017	6	1,409	3,308	3,308	82,698,960,000
2018	2017	35	4,446	10,277	12,609	315,214,072,500
	2018	11	1,234	2,331		
2019	2018	164	14,263	32,292	90,491	2,262,279,735,000
	2019	321	25,731	58,200		
2020	2019	182	12,887	30,127	94,033	2,670,343,163,000
	2020	353	27,820	63,906		
2021	2020	149	11,512	27,084	42,212	1,266,360,684,000
	2021	74	6,266	15128		
2022	2021	108	6,318	12,966	30,759	922,781,640,000
	2022	77	8,166	17,793		
TOTAL		1,481	120,168	273,666	273,666	7,526,028,254,500

# Rendahnya capaian IKU PSR disebabkan oleh:

- a. Kendala proses PSR via Dinas, yaitu verifikasi status lahan yang cukup lama dan berjenjang. Terdapat regulasi baru (Permentan 03/2022) bahwa lahan PSR tidak dalam lahan gambut dan tidak status HGU, sementara status lahan perlu diverifikasi secara berjenjang dari Dinas Pertanian di Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi dan Ditjen BUN.
- b. Kendala proses PSR via Jalur Kemitraan, yaitu tersendatnya proposal pengajuan PSR. Regulasi yang mengatur belum sempurna dan diperlukan perbaikan serta persyaratannya juga menyertakan bahwa lahan tidak dalam lahan gambut dan tidak status HGU. Kurangnya peran mitra di dalam mendukung Lembaga pekebun memenuhi dokumen persyaratan
- Isu terkait pencapaian target PSR akan dilaksanakan strategi yaitu:
- Koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan mitra kerja (Menko dan Ditjen BUN)
- b. Peningkatan volume sosialisasi melalui Program Kemenkeu Satu dan Legislatif
- c. Simplifikasi persyaratan dan pembangunan aplikasi
- d. Monitoring secara periodik dan tindak lanjut lapangan dalam hal dibutuhkan

#### Analisis Risiko:

Dalam pengajuan PSR terdapat persyaratan "tidak berada di kawasan lindung gambut" yang cukup sulit untuk dipenuhi dan **target kinerja PSR tidak menjadi target kinerja Ditjen BUN secara formal** membuat BPDPKS memiliki risiko tidak tercapainya **luasan lahan yang ditargetkan**.

## 8. IKU Jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Sawit (5b-N)

Pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk program peremajaan, sarana prasarana, pendidikan dan pelatihan SDM, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit secara tepat sasaran dan tepat waktu sesuai amanat Perpres Nomor 61 Tahun 2015.

Definisi dari IKU ini adalah Merupakan persentase pencapaian target penyaluran dana pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit yang berupa paket pelatihan dan pendidikan meliputi beasiswa, vokasi, magang, pelatihan petugas/pendamping, pelatihan petani/kelompok tani, dan koperasi.

Formula yang digunakan yaitu:

Σrealisasi orang yang dibiayai pengembangan SDM Target Jumlah Peserta x 100%)

## Keterangan:

- Target jumlah mahasiswa dan jumlah peserta kegiatan pengembangan SDM sawit yang dibiayai sebanyak 3.000 orang/peserta.
- Maksimal Capaian IKU 150%

Tujuan IKU ini yaitu Memberikan pelatihan/penyuluhan/pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat pekebun dan pendidikan kepada anak pekebun guna meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit.

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

	V- Pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan									
BPDPKS	5b-N IKU Persentase pengelolaan program pengembangan SDM Sawit									
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Υ	Pol /KP		
Target	1000	1500	1500	2250	2250	3000	3000			
Realisasi	1488	2059	2059	3491	3491	4480	4480	Max/ Average		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%			

Isu utama IKU ini adalah:

 Telah terbit Peraturan Menteri Pertanian no. 03 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dan

- Kepdirjenbun no. 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Program Pengembangan SDM PKS dalam Kerangka Pendanaan BPDPKS.
- 2. Telah diterima Rekomtek Beasiswa Pendidikan SDM PKS 2022 dari Ditjenbun sebanyak 1000 orang dari 21 provinsi.
- 3. Sampai Bulan Desember 2022, BPDPKS telah menerima Rekomtek Pelatihan SDM PKS 2022 dari Ditjenbun sebanyak 3241 orang dari 9 provinsi (Sumsel, Jambi, Riau, Sumut, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Sulsel dan Sulteng)
- 4. Total jumlah orang/peserta program pengembangan SDM PKS yang dikelola dan biayai selama tahun 2022 adalah 4480 orang.

Akar masalah IKU ini adalah Penyusunan data rekomtek yang masih berjenjang dari tingkat kabupaten, propinsi dan pusat (ditjenbun) dan penyesuaian dengan kondisi riil

## Tindakan yang telah dilaksanakan:

- 1. Telah terbit Surat Keputusan Dirut No. KEP-359/DPKS/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang 1000 orang Penerima Dana Beasiswa Pendidikan Kelapa Sawit
- 2. Telah ditandatangani Perjanjian Kerjamasa BPDPKS PRJ No. 377-388/DPKS/2022 tanggal 21 September 2022 dengan 7 Lembaga Pendidikan
- 3. Telah terbit Surat Keputusan Dirut No. KEP-490/DPKS/2022 tanggal 16 Desember 2022 Tentang 3.241 Penerima Dana Pelatihan untuk 9 provinsi (Sumsel, Jambi, Riau, Sumut, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Sulsel dan Sulteng).

## Rekomendasi rencana aksi:

- 1. Koordinasi dengan Ditjen Perkebunan terkait Rekomtek 2023
- 2. Persiapan Seleksi Lembaga Pelaksana Pelatihan tahun 2023

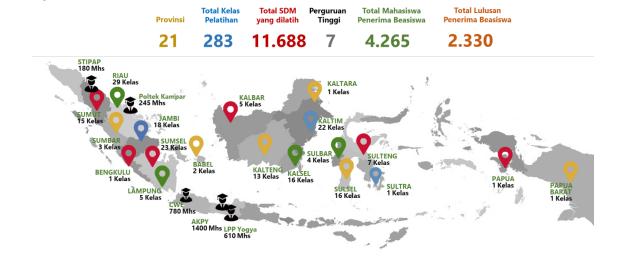
#### Capaian:

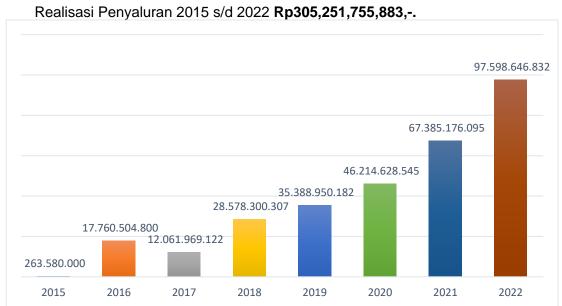
Target	:	3.000 orang/peserta
Realisasi	:	4.480 orang/peserta
Persentase	:	149.33%

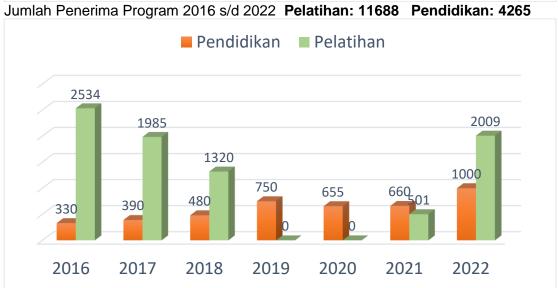
Lembaga Pendidikan	Jumlah Mahasiswa/Peserta Pelatihan
Program D1 AKPY	553
Program D2 LPP	30
Program D3 LPP	428
Program D4 LPP	105

Program D3 CWE	386
Program D4 CWE	119
Program D2 POLKAM	29
Program D3 POLKAM	332
Program D4 ITSI	236
Program S1 ITSI	120
Program D3 ITSB	76
Program S1 INSTIPER	57
Pelatihan petani di Sulsel	300
Pelatihan petani di Sulteng	34
Pelatihan petani di kalteng (AKYP)	50
Pelatihan petani di kalteng (SIB)	50
Pelatihan petani di kalsel (SIB)	188
Pelatihan petani di Sumsel	122
Pelatihan petani di Kaltim	248
Pelatihan petani di Jambi	200
Pelatihan petani di Sulteng	27
Pelatihan petani di Riau (LAN)	48
Pelatihan petani di Sumsel (BPP Jambi)	257
Pelatihan petani di Sulteng 99 peserta (IPB)	99
Pelatihan petani di Riau (IPB)	35
Pelatihan petani di Sumsel 231 (IPB)	231
Pelatihan petani di Sumsel (PPKMP Ciawi)	62
Pelatihan petani di Riau (PPKMP Ciawi)	58
Total	4480

Capaian Program Pendanaan Pengembangan Sawit sejak 2015 s.d. 31 Desember 2022







# 9. IKU Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit (4c-N)

Pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan merupakan dana yang disalurkan dalam bentuk program peremajaan, sarana prasarana, pendidikan dan pelatihan SDM, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit secara tepat sasaran dan tepat waktu sesuai amanat Perpres Nomor 61 Tahun 2015.

Definisi IKU ini adalah Persentase penyaluran dana bantuan sarana dan prasarana yang tepat waktu dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomtek Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2020 yang telah

disalurkan dananya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomtek yang telah diterima oleh BLU BPDPKS.

Formula yang digunakan yaitu:

∑paket rekomtek Tahun 2022 yang telah terbit persetujuan pembiayaan ∑paket rekomtek Tahun 2022 yg diterima dari DitjenBun Kementan x100%

Apabila penyaluran sarana dan prasarana telah tersalurkan 100% dari rekomtek dan sebanyak 30 paket atau lebih, maka formula perhitungan menjadi sebagai berikut:

∑paket rekomtek Tahun 2025 yang telah terbit persetujuan pembiayaan x100% 50 paket

## Keterangan:

- Target Penyelesaian: 50 Paket
- Rekomtek yang dihitung untuk pencapaian IKU adalah Rekomtek yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Periode 1 Nopember 2021 sampai dengan 31 Oktober 2022.
- Kelebihan capaian kinerja dihitung apabila target penyelesaian melebihi 30 Paket dihitung secara proporsional
- Capaian diperhitungkan 0% apabila tidak terdapat rekomtek dari Ditjen Perkebunan

Tujuan IKU ini adalah Memberikan bantuan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit dalam upaya untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit.

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

BPDPKS	V- Pen	V- Pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan									
		5c-N IKU Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit									
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Υ	Pol /KP			
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLKV			
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				

Perkembangan Program Sarpras

No.	Kelembagaan Tani	Kabupaten	Provinsi	Tahun Terbit SK Dirut
1	Koperasi Perkasa Nalo Tantan	Merangin	Jambi	2021
2	Koperasi Perkasa Nalo Tantan	Merangin	Jambi	2022
3	Koperasi Dimensi Mandiri Tani	Mamuju	Sulawesi Barat	2022
4	Kelompok Tani Sukses	Tanjung Jabung Barat	Jambi	2021
5	Kelompok Tani Bangun Makmur	Muaro Jambi	Jambi	2021
6	Koperasi Himpunan Kerukunan Petani Perkebunan	Rokan Hilir	Riau	
7	Koperasi Dimensi Mandiri Tani	Mamuju	Sulawesi Barat	2021
8	Kelompok Tani Maju Bersama	Bengkulu Utara	Bengkulu	2022
9	Kelompok Tani Karya Makmur	Bengkulu Utara	Bengkulu	2022
10	Kelompok Tani Pudu Tani Berkah	Sanggau	Kalimantan Barat	2022
11	Koperasi Produsen Sejahtera Bersama	Sukamara	Kalimantan Tengah	2022
12	Kelompok Tani Mekar Tani	Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	2022
13	Kelompok Tani Karya Tani	Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	2022
14	Gapoktan Agrojaya	Tanah Bumbu	Kalimantan Selatan	2022
15	Gapoktan Jaya Bersama Bungku	Batanghari	Jambi	2022
16	Kelompok Tani Hudep Baroe	ACEH JAYA	ACEH	
17	KSU Kaum Beak	ACEH SINGKIL	ACEH	2022
18	Kelompok Tani Sungai Kinandi	DHARMASRAYA	SUMATERA BARAT	
19	KPS Makmur	PASAMAN BARAT	SUMATERA BARAT	
20	KPS Maju	PASAMAN BARAT	SUMATERA BARAT	
21	KUD MAKARTI TAMA	SIJUNJUNG	SUMATERA BARAT	
22	KUD KAMANG	SIJUNJUNG	SUMATERA BARAT	2023
23	Koperasi Tinera Jaya	SIAK	RIAU	
24	Koperasi Mutiara Bumi	BATANG HARI	JAMBI	
25	Gapoktan Saiyo Sakato	BUNGO	JAMBI	

No.	Kelembagaan Tani	Kabupaten	Provinsi	Tahun Terbit SK Dirut
26	Kelompok Tani Suka Maju I	BUNGO	JAMBI	
27	Koperasi Muda Tani Maju	SAROLANGUN	JAMBI	
28	Kelompok Tani Tani Sumber Rejeki	TEBO	JAMBI	
29	Gapoktan Sejahtera	BANYUASIN	SUMATERA SELATAN	
30	Kelompok Tani Emborok Raya Dusun Semadu	SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	
31	Kelompok Tani Palm Bungkukan Sejahtera	KOTA BARU	KALIMANTAN SELATAN	
32	Koperasi Unit Desa Ngudi Rahayu Sejahtera	SUKAMARA	KALIMANTAN TENGAH	
33	Gapoktan Laburan Bersatu	PASER	KALIMANTAN TIMUR	
34	Gapoktan Jafloresia jaya	PASER	KALIMANTAN TIMUR	
35	Koperasi Unit Desa Sinar Mulya	SANGGAU	KALIMANTAN BARAT	

#### Isu utama IKU ini adalah:

- Telah disalurkan dana Sarana Prasarana untuk koperasi Nalo Tantan untuk jenis sarpras peningkatan jalan kebun sebesar Rp1,35 M atau 40% dari total dana yang akan disalurkan Rp3,37 M
- 2) Telah disalurkan dana Sarpras sebesar Rp929.380.000 untuk 40% tahap pertama peningkatan kualitas jalan kebun sepanjang 5,9 Km di KT Sukses, Tanjung Jabung Barat Jambi.
- 3) Untuk rekomtek program ekstensifikasi di Mamuju yang telah mendapatkan SK Dirut saat ini masih menunggu dilakukan pengadaan benih, pupuk, pestisida oleh PPK dan Tim ULP. Kesepakatan dengan pihak Koperasi Januari 2022 benih sudah disalurkan mengingat telah dilakukan land clearing.
- 4) Atas 4 rekomtek yang belum diterbitkan SK Dirut, berdasarkan hasil kunjungan surveyor ke lapangan BPDPKS akan meminta Dirjenbun meninjau kembali rekomtek serta meminta penambahan rekomendasi atas jenis spesifikasi, dan nilai barang yang disalurkan. Surat pengembalian Rekomtek telah disampaikan.

#### Tindakan yang telah dilaksanakan:

- 1. Pembangunan aplikasi sarpras online.
- 2. Koordinasi dengan Ditjenbun dalam rangka peningkatan kualitas verifikasi dan rekomendasi teknis serta mekanisme monitoring pelaksanaan sarpras.
- 3. Perencanaan kegiatan penyaluran sarpras dalam dokumen swakelola Ditjenbun
- 4. Melibatkan surveyor dalam proses monitoring.
- 5. Koordinasi dengan Tim Sarpras Ditjenbun pada 20 September 2022 di Jakarta.
- 6. pembahasan usulan dan penyusunan 21 rekomendasi teknis sarpras yang dilakukan oleh ditjenbun pada 28-30 September 2022.

7. Rekon Swakelola Sarpras triwulan III tahun 2022 telah dilakukan pada 3-5 November 2022 di Bogor.

Rekomendasi rencana aksi adalah:

- 1. Penyusunan standar biaya dan spesifikasi.
- 2. Penginputan dokumen rekomtek yang disampaikan sebelum aplikasi (manual)

# 10. IKU Persentase imbal hasil dana kelolaan (6a-CP)

Dana perkebunan kelapa sawit harus dapat dikelola untuk meningkatkan nilai tambah dari dana penghimpunan yang ada dalam rangka mendukung tujuan penggunaan dana sesuai amanat Perpres 66 tahun 2018.

Deskripsi IKU tersebut yaitu Mengukur capaian imbal hasil pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit berdasarkan target imbal hasil referensi. Imbal hasil atas dana kelolaan yang diperoleh dari kegiatan investasi, untuk periode pengukuran tanggal 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022.

Formula IKU : ROI/ (rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah buku IV + 0,4 %) ROI = (imbal hasil investasi/rata-rata dana kelolaan diinvestasikan) x 100%

$$\frac{\text{Return on Investment (ROI)}}{(\text{Rata-rata suku bunga deposito Bank Pemerintah BUKU IV} + 0,6\%)} \times 100\%$$

• ROI = 
$$\frac{\text{imbal hasil investasi}}{\text{rata-rata dana kelolaan diinvestasikan}} \times 100\%$$

Tujuan IKU ini Meningkatkan jumlah dana kelolaan dari hasil investasi sehingga diharapkan mampu mendukung upaya dalam menciptakan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

BPDPKS	VI- Imb	VI- Imbal hasil pengembangan dana yang optimal									
	6a-CP IKU Persentase imbal hasil dana kelolaan										
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Υ	Pol /KP			
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	I.			
Realisasi	107,14%	109,55%	109,55%	112,47%	112,47%	126,71%	126,71%	Max/ Average			
Capaian	107,14%	109,55%	109,55%	112,47%	112,47%	126,71%	126,71%				

Perhitungan Imbal Hasil Portofolio Dana Investasi

Dana Kelelolaan s/d 31 Desember 2022

No.	Uraian	Pendapatan s.d Desember 20			
1	Bunga Deposito	Rp	810,928,186,589		
2	Kupon SUN	Rp	48,757,175,000		
3	Capital Gain SUN	Rp	-		
	Jumlah Total	Rp	859,685,361,589		

No	Saldo Akhir		Deposito		SUN	Total
1	Januari 2022	Rp	18,316,000,000,000	Rp	508,406,776,776	Rp 18,824,406,776,776
2	Februari 2022	Rp	22,116,000,000,000	Rp	508,406,776,776	Rp 22,624,406,776,776
3	Maret 2022	Rp	24,316,000,000,000	Rp	508,406,776,776	Rp 24,824,406,776,776
4	April 2022	Rp	25,016,000,000,000	Rp	508,406,776,776	Rp 25,524,406,776,776
5	Mei 2022	Rp	27,016,000,000,000	Rp	508,406,776,776	Rp 27,524,406,776,776
6	Juni 2022	Rp	27,016,000,000,000	Rp	508,406,776,776	Rp 27,524,406,776,776
7	Juli 2022	Rp	27,216,000,000,000	Rp	508,406,776,776	Rp 27,724,406,776,776
8	Agustus 2022	Rp	22,216,000,000,000	Rp	793,755,076,776	Rp 23,009,755,076,776
9	September 2022	Rp	20,566,000,000,000	Rp	793,755,076,776	Rp 21,359,755,076,776
10	Oktober 2022	Rp	20,199,000,000,000	Rp	793,755,076,776	Rp 20,992,755,076,776
11	November 2022	Rp	20,199,000,000,000	Rp	793,755,076,776	Rp 20,992,755,076,776
12	Desember 2022	Rp	22,899,000,000,000	Rp	1,000,580,076,776	Rp 23,899,580,076,776
		Rp 23,735,453,985,109				

#### Isu utama IKU ini adalah:

- 1) Realisasi *annualized weighted average* ROI s.d 31 Desember 2022 sebesar 3,62% p.a. Rata-rata dana investasi selama periode tersebut sebesar Rp23,73 Triliun dengan total pendapatan sebesar Rp859,68 Miliar. Dengan rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah KBMI 4 s.d Desember 2022 sebesar 2,26% p.a, maka capaian kinerja persentase imbal hasil dana kelolaan s.d 31 Desember 2022 sebesar 126,71%.
- 2) The Fed pada Triwulan I Tahun 2023 diperkirakan akan bersifat hawkish dalam menaikkan suku bunga acuan The Fed Funds Rate paling banyak sebesar 50 bps jika dibandingakan dengan Tahun 2022 yang sudah menaikkan sampai 425 bps. Diharapkan dengan kebijakan slow down The Fed tersebut membuat kondisi pasar stabil. Yield SBN tenor 10 tahun sebesar 6,90% pada penutupan tanggal 31 Desember 2022. Sehingga, pada penutupan pasar Obligasi tanggal 31 Desember 2022 SUN yang BPDPKS miliki pada tenor diatas 10 tahun kembali mengalami tren kenaikan sedangkan tenor dibawah 10 tahun cenderung stabil jika dibandingakan dengan harga penutupan bulan November.
- 3) Pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 21-22 Desember 2022, BI memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7DRRR sebesar 25 bps menjadi level 5,50%. Diperkirakan BI masih akan membuka opsi untuk menaikkan suku bunga acuan pada Triwulan I tahun 2023 paling besar 25bps dengan melihat kondisi pasar keuangan domestik yang cenderung membaik. Inflasi pada tahun 2023 diperkirakan masih berada dikisaran 6% dibawah 7%

dampak kenaikan harga komoditas, sedangkan tekanan pada mata uang rupiah terhadap Dollar AS masih terus berlanjut pada tahun 2023 sampai menyentuh angka Rp15.500/USD

Tindakan yang telah dilaksanakan yaitu:

- 1) Bunga 7-days REPO rate BI
- 2) Daily monitoring SUN market price serta pergerakan YTM melalui Bloomberg
- 3) Rebalancing Portofolio Investasi BPDPKS Tahun 2022 dan revisi RIT Tahun 2022
- 4) Penyusunan RIT 2023

# Rencana aksi yaitu:

- Pemenuhan Mendapat Sertifikasi di Bidang Pasar Modal/ Investasi dan Keuangan
- 2) Pembelian/Penjualan Surat Utang Negara (SUN)

# 11. IKU Persentase volume penyaluran biodiesel (7a-N)

Pelaksanaan program mandatori biodiesel yang berkelanjutan adalah upaya BPDPKS mendukung program pemerintah untuk menciptakan kestabilan harga CPO dan/atau mengurangi terjadinya fluktuasi harga yang tajam sehingga dapat menjamin keberlangsungan industri sawit yang berkelanjutan.

Definisi IKU ini adalah Jumlah volume Biodiesel yang dibiayai dengan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Tahun Anggaran 2022. Target untuk tahun 2022 adalah sebanyak 8.700.000 kilo liter.

## Data yang diperlukan:

- Data Dashboard Biodiesel TA 2022
- Laporan Keuangan TA 2022

#### Kriteria Ketercapaian IKU:

Volume biodiesel yang disalurkan dalam skema pembiayaan BPDPKS	Capaian Kinerja
< 8.700.000 kiloliter	Sesuai proporsi capaian
≥ 8.700.000 kiloliter	Proporsional, max. 150%

#### Formula perhitungan sebagai berikut:

$$[\frac{\text{Volume Biodiesel yang disalurkan}}{8.700.000 \text{ KL}} \times 100\%]$$

Apabila volume penyaluran biodiesel melebihi 8.700.000 kiloliter, maka formula perhitungan menjadi sebagai berikut:

$$100\% + [\frac{\text{Volume Biodiesel yang disalurkan - 8.700.000 KL}}{\text{Aloaksi Kemen ESDM - 8.700.000 KL}} \ x \ 50\%]$$

Tujuan IKU ini adalah memberikan insentif biodiesel kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN) guna mendukung program penggunaan bahan bakar biodiesel secara luas di masyarakat.

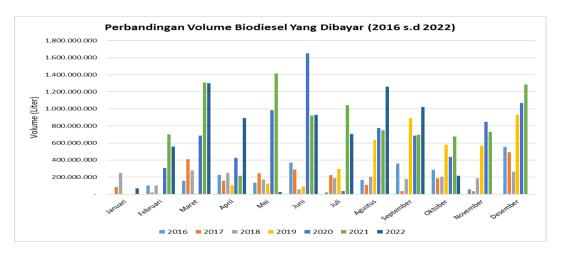
Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

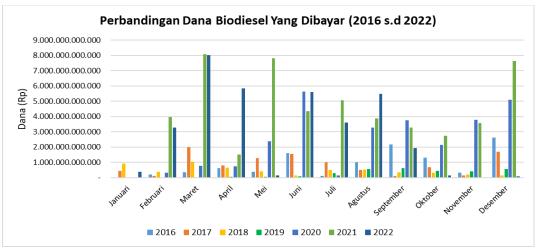
	VII-Pel	VII-Pelaksanaan program mandatori biodiesel yang berkelanjutan									
BPDPKS	7a-N IKU Persentase volume penyaluran Biodiesel										
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol /KP			
Target	1.5 jt kL	3 jt kL	3 jt kL	5 jt kL	5 jt kL	8.7 jt kL	8.7 jt kL				
Realisasi	2.3 jt kL	4.8 jt kL	4.8 jt kL	7,5 jt kL	7,5 jt kL	10.35 jt kL	10.35 jt kL	Max/TL KV			
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	114 %	119.08%				

Target	:	8.700.000 kL
Alokasi	•	11.025.604 kL
Realisasi		10.359.544 kL
Persentase	:	119.08 %

Capaian Penyaluran Dana Biodiesel (2016 sd 2022)

Tahun	Volume Biodiesel Yang Dibayar (KI)	Dana Biodiesel Yang Dibayar (Rp Milyar)
2016	2.407.079	10.680
2017	2.287.270	10.310
2018	2.336.481	5.658
2019	4.221.258	3.069
2020	7.906.807	28.007
2021	9.743.684	51.863
2022	6.971.435	34.567

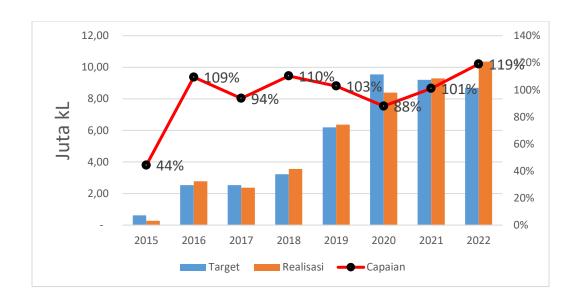


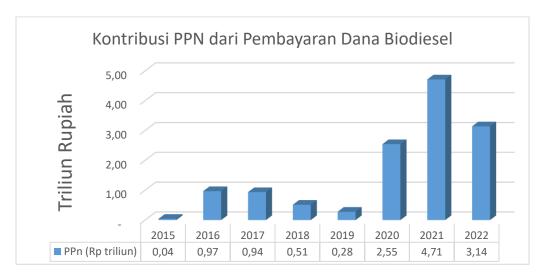


# Realisasi Volume Penyaluran Biodiesel 2015-2022

(berdasarkan tahun pembayaran Status: 31 Desember 2022)







## Isu utama IKU ini adalah:

- Volume penyaluran Biodiesel s.d 31 Desember 2022 sebesar 10.359.544 KL ~ 10,36 Jt KL berdasarkan aplikasi https://program-biodiesel.bpdp.or.id/
- 2. Untuk bulan Desember 2022 selisih HIP BBM jenis minyak Solar lebih besar dari HIP BBN jenis Biodiesel sebesar (-Rp580,49)/liter (diluar OA dan PPn) sehingga BPDPKS tidak melakukan Pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel (kecuali untuk tagihan dengan besaran OA > Rp580,49/liter).
- 3. Jumlah pembayaran dana pembiayaan biodiesel tahun 2022 sebesar Rp34,57 Triliun.
- Kepmen alokasi tahun 2023 telah ditetapkan pada akhir Desember 2022, dengan Alokasi 13.148.594 KL, dengan pencampuran B30 pada periode januari 2023 dan pencampuran B35 mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023

Akar masalah dalam IKU ini adalah:

- Selisih HIP Biodiesel dan Solar pada bulan Desember 2022 turun sebesar (-Rp580,49)/liter (diluar OA dan PPn) dikarenakan masih naiknya harga solar mengikuti kenaikan harga minyak mentah dunia serta akibat konflik rusia dan ukraina yang masih berlangsung dan turunnya harga CPO hasil dari lelang KPBN akibat stok dalam negri yang melimpah.
- 2. Kenaikan demand solar mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap alokasi biodiesel.

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- Memantau terus selisih kurang HIP Minyak Solar dengan HIP Biodiesel, dan berkoordinasi dengan Dit KUKMR, Dit PPD, PPK dan KPA terkait kecukupan dana penyaluran Biodiesel.
- 2) BPDPKS melakukan Penandatangan perjanjian pembiayaan pengadaan BBN untuk pencampuran jenis BBM periode Januari s.d Desember 2023 dengan BUBBN

Rekomendasinya adalah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.

## 12. IKU Persentase jumlah riset yang dikelola (8a-N)

Pengelolaan penelitian dan pengembangan sawit yang berkesinambungan merupakan pengelolaan dana yang disalurkan dalam bentuk program penelitian dan pengembangan s perkebunan kelapa sawit secara tepat sasaran dan tepat waktu sesuai amanat Perpres Nomor 61 Tahun 2015.

IKU Jumlah riset yang dikelola dihitung berdasarkan jumlah kegiatan riset yang didanai pada tahun 2022, untuk periode pembayaran tanggal 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022.

Formula IKU tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\sum riset\ yang\ dibiayai}{75\ riset}\ x\ 100\%$$

Target: 75 Riset

Tujuan IKU tersebut Mendukung penelitian dan pengembangan perkebunan sawit serta industri pendukungnya yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sedangkan untuk kriteria riset sebagai berikut:

No.	Pokok Riset	Indikator	Keterangan
1.	R&D dalam rangka pengembangan produk baru berdasarkan <i>roadmap</i> hilirisasi sawit yang berorientasi komersil	Profil investasi produk hilir sawit	Mencakup 9 produk hilir sawit
2.	R&D dalam rangka mencari scientific evidence guna mendukung antinegative campaign dan pengembangan citra positif minyak sawit Indonesia	Laporan hasil penelitian (scientific evidence)	Mencakup isu kandungan senyawa kontaminan 3-MCPD Ester, Glycidyl Ester, logam berat, serta isu lingkungan terkait emisi pada lahan gambut
3.	Pengembangan sarana pendukung dalam rangka keberlanjutan industri sawit dan turunannya serta rekomendasi yang diperlukan oleh pemerintah	Dokumen analisis	Mencakup substansi: a. Pengembangan keberlanjutan dan efisiensi rantai pasok pada perkebunan kelapa sawit b. Kajian efektivitas instrumen fiskal terhadap program hilirisasi industri sawit. c. Kajian yang diperlukan pemerintah (kementerian terkait) dalam pengembangan industri kelapa sawit di bidang budidaya, bioenergi/ biohidrokarbon, pangan lingkungan dan pasar

# Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

		VIII- Pengelolaan penelitian dan pengembangan sawit yang berkesinambungan									
BPDPKS		8a-N IKU Persentase jumlah riset yang dikelola (Target Q4: 65 riset/100%)									
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Υ	Pol /KP			
Target	35	45	45	55	55	75	75				
Realisasi	44	74	74	114	114	115	115	Max/ TLKV			
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%				

# Data yang diperlukan:

- Laporan Keuangan TA 2022
- Rekapitulasi Profil Riset Sawit

## Penjelasan:

- 1. Telah terbit Peraturan Menteri Pertanian no. 03 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- 2. Diatur bahwa pelaksanaan Litbang di lingkup Kementan akan dilakukan melalui rekomendasi Dirjen Perkebunan sedangkan di luar lingkup Kementan pelaksanaannya diatur oleh BPDPKS

- 3. Terdapat penelitian yang memerlukan addendum perpanjangan kontrak karena belum optimalnya hasil yang diharapkan, adanya kendala operasional baik dari internal maupun eksternal.
- 4. BPDPKS selama tahun 2022 mengelola sebanyak 115 penelitian.

#### Akar masalah:

- Adanya perubahan pengaturan lembaga litbang kementerian pertanian yang bergabung dengan BRIN sehingga tidak lagi melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan.
- Masih sedikitnya usulan litbang dari Kementerian Pertanian yang seharusnya dapat dimanfaatkan dalam dukungan peningkatan produktivitas kelapa sawit melalui jalur riset inisiatif.

#### Tindakan yang telah dilaksanakan:

- 1. Telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama BPDPKS atas 47 Penelitian GRS K22.
- 2. Telah dilaksanakan penyusunan topik prioritas untuk *Call for Proposal* GRS K23 pada tanggal 18 November 2022.
- 3. Telah dilaksanakan rapat pembahasan re-evaluasi GRS K22 pada tanggal 7 Desember 2022.
- 4. Telah dibuka kembali Call for Proposal GRS K23 pada tanggal 22 Desember 2022 s.d 28 Februari 2023.

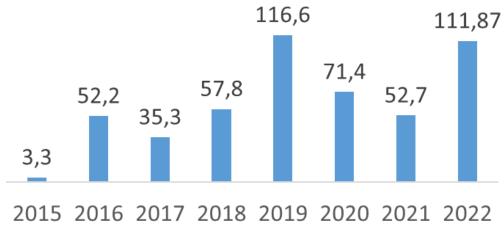
# Rekomendasi yang akan dilaksanakan:

- 1. Sosialisasi Call for Proposal GRS K23 pada tanggal 22 Desember 2022 s.d 28 Februari 2023.
- 2. Final Lomba Riset Sawit Tingkat Mahasiswa 2022-2023
- 3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama skema Swakelola dengan BRIN.

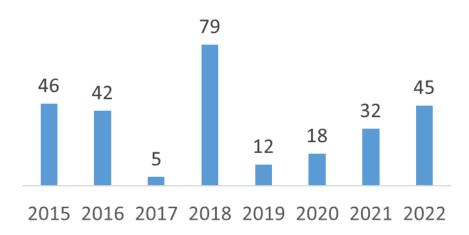
# Capaian Program Pendanaan Pengembangan Sawit sejak 2015 s.d. 31 Desember 2022



Realisasi Penyaluran Dana 2015-2022 (Rp501.17 Milyar)



# **Jumlah Perjanjian (279 Kontrak)**



# 13. IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang telah ditindaklanjuti (9a-N)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana yang Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *Good Governance*.

Definisi dari IKU ini adalah IKU mengukur kepatuhan unit di lingkungan BPDPKS menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, Itjen Kemenkeu, dan KAP. Tindaklanjut dari tiap unit kerja dilakukan dengan supervisi dari SPI.

## Formula:

Tujuan IKU ini adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPDPKS.

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

	IX- Pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akuntabel										
BPDPKS		9a-N IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP									
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Υ	Pol /KP			
Target	20%	40%	40%	65%	65%	89,5%	89,5%				
Realisasi	62,16%	86,48%	86,48%	79,07%	79,07%	93,02%	93,02%	Max / TLKV			
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	103,93%	103,93%				

# Penjelasan capaian:

### a. BPK (20/21)

- LHPDTT BPK 2020 (3/3 Selesai):
  - Penentuan OA lebih ekonomis (selesai), Pengembalian kelebihan penyaluran dana PSR (selesai), & verifikasi atas perbedaan volume ekspor kelapa sawit, CPO dan produk turunannya & menyelesaikan jika terdapat kekurangan (selesai)
- LHP LK 2020 (12/12 closed BPK), sisa 1 rekom telah selesai TL: Revisi PKS 3 Pihak dengan pengaturan Klausul Penggunaan Dana PPKS
- LHP LK 2021 (5/6 Rekomendasi):

## b. ITJEN (20/22)

- LHA 2019 (1/2): Pengembalian uang saku rapat (perpanjangan ke Itjen terhadap Installment pengembalian dana), pengembalian insentif (selesai)
- LHA 2021 (19/20): 19 Rekomendasi telah berstatus closed (Per 30 Juni Closed 17) SMT 2 closed 2) (Aplikasi Teamcentral) & 1 rekomendasi terkait "Koordinasi dan Penerapan Perlakukan PPh 21" dilakukan perpanjangan

## Isu Kritis:

Rekomendasi temuan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana yang disepakati/timeframe yang ditentukan, sehingga belum dapat menghasilkan output sebagai bukti dukung tindak lanjut.

### Implikasi Periode Selanjutnya:

Belum dapat dipastikannya sisa tindak lanjut rekomendasi temuan dapat tuntas sesuai *time frame* rencana aksi yang disepakati

Tindakan yang telah dilaksanakan:

#### Triwulan I:

- Koordinasi (UND-3/DPKS.100/2022 tgl 26 Jan 2022) & penyampaian seluruh temuan yang harus di TL (ND-25/27-01-22, ND-26/2-3-22) sesuai rencana aksi ke Dit. Teknis BPDPKS.
- 2. TL Temuan LHA Itjen 2019: Pelaksanaan Pengembalian dana insentif (closed).

#### Triwulan II:

- Rapat Pembahasan Kajian OA Biodesel (30-31 Mei 2022) terkait Laporan Kajian OA Biodiesel dengan Dit Teknis dan Pengkaji (Und-42/2022): output Laporan Kajian telah selesai.
- Rapat PTL Temuan dengan Dit. Teknis (ND-44/DPKS.1/2022 tgl 2 Juni 2022) dg hasil konfirmasi 1 Rekomendasi Temuan LK (Revisi 27 PKS) telah selesai dan 5 Rekom. Temuan itjen selesai TL.

#### Triwulan III:

- 1. Telah dilakukan koordinasi terkait penyetoran kelebihan penyaluran dana PSR (telah disetor)
- 2. Pembahasan Temuan Pengembangan Aplikasi PSR dengan hasil Rekonsiliasi BA Cleansing Data dengan Ditjenbun
- 3. Koordinasi pembahasan PTL dengan Rocankeu dan KI DJPb pada21 September 2022

#### Triwulan IV:

- 1. Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut 4 Rekomendasi PSR pada BPK LK 2021
- 2. Revisi Perdirut 13 terkait PE telah dilakukan: Perdirut-5/2022 tgl 7 Des 2022.
- 3. Koordinasi dg Dit SMI d& Rocankeu (Und-547/PB.4/2022) terkait rekom. temuan: penambahan informasi pada SKB (28-12-22)
- 4. Koordinasi terkait TL Temuan BPK APIP dengan Direktorat Teknis tanggal 29-12-2022

### HAMBATAN PENYEBAB ISU UTAMA (PRIORITAS BERSIFAT INTERNAL)

- 1. Respon yang lambat dari pihak-pihak terkait (terutama bila menyangkut pihak ketiga yang diwajibkan mengembalikan sejumlah dana dan mekanisme teknis).
- 2. Tindak Lanjut Temuan Menunggu Kepastian Temuan Tidak Dapat Ditinjaklanjuti (TPTD).

### **RENCANA AKSI DALAM KENDALI BPDPKS:**

- 1. Pelaksanaan Rapat Pembahasan secara khusus mengenai temuan yang berstatus sedang proses di BPDP dan belum memiliki output.
- 2. Koordinasi dengan Pihak Terkait UIC Temuan yang belum terselesaikan dan konfirmasi ke Auditor (temuan belum dinyatakan selesai sesuai rekomendasi, sehingga berlanjut ke periode selanjutnya).

# 14. IKU Persentase rekomendasi hasil pembinaan dan monev pembina teknis dan pembina keuangan yang telah ditindaklanjuti (9b-N)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana yang Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip Good Governance.

IKU mengukur kepatuhan unit di lingkungan BPDPKS dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi hasil pembinaan dan monev yang dillakukan oleh Direktorat PPKBLU dan Direktorat SMI. Tindaklanjut dari tiap unit kerja dilakukan dengan supervisi dari SPI.

## Formula:

Persentase Tindak Lanjut = 
$$\frac{\sum Realisasi\ Tindak\ Lanjut\ Hasil\ Monitoring\ dan\ Evaluasi}{\sum Rekomendasi\ Monitoring\ dan\ Evaluasi}\ X\ 100\%$$

Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPDPKS.

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

•	IX- Pertanggungiawahan pengelolaan dana yang akuntahel											
	IX- Perta	IX- Pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akuntabel										
BPDPKS	9b-N IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pembinaan dan monev pembina teknis dan pembina keuangan											
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol /KP				
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	90%					
Realisasi	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max / TLKV				
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	111,11%	111,11%					

Isu utama IKU ini adalah:

## LHM 2021 (12):

- Data Sementara dari Rekomendasi Monev yang didapatkan dari KHP Dit. PPK BLU (ND-109/PB.55/PB.553/2021 yaitu sejumlah 12 Rekomendasi
- Dari 12 Rekomendasi, telah dilakukan tindak lanjut sejumlah 12 rekomendasi.

#### Isu Kritis:

- Rekomendasi Temuan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana yang disepakati timeframe yang ditentukan
- Output atas koordinasi dengan pihak-pihak terkait didapatkan dalam jangka waktu melebihi jangka waktu rencana aksi.

## Implikasi Periode Selanjutnya:

Belum dapat dipastikannya sisa tindak lanjut rekomendasi temuan dapat tuntas sesuai timeframe rencana aksi yang disepakati

# Tindakan yang telah dilaksanakan:

- ND-2/DPKS.100/2022 tanggal 8 Januari 2022 Koordinasi Tanggapan Konsep Laporan Hasil Monev PPKBLU 2021 (zoom meeting: https://zoom.us/j/95824698167?pwd=MnlzQVN4amgyWmVKVzZIY05kYm5hdz09)
- 2. Menyampaikan Data Rekomendasi Temuan secara bulanan s.d. kepada Direktorat Teknis (ND-25/27-01-22, ND-26/2-3-22) untuk ditindaklanjuti
- 3. Melakukan Rapat Pembahasan PTL Temuan Bersama Dit Teknis bulan Juni pada tanggal 3 Juni 2022 (ND-44/DPKS.1/2022 tgl 2 Juni 2022)
- 4. Lap Audited telah disajikan, diinput di BIOS sesuai nilai temuan BPK LK tahunan 2021.
- 5. Kebijakan Investasi BPDPKS berpedoman pada Perdirut nomor PER-15/DPKS/2021 (dengan batas optmal giro Rp 1 Triliun dengan mempertimbangkan rencana pencairan bulan berkenaan
- Penempatan dana BPDPKS pada investasi jangka panjang dengan imbal hasil yang lebih maksimal sudah dimasukkan ke dalam Rencana Investasi Tahunan untuk Tahun 2022
- 7. Pelaksanaan training WMI dengan menyertakan Pembina teknis dan Pembina keuangan telah dilaksanakan
- 8. Sudah dilakukan pengembangan data dan bussiness intelligent melalui aplikasi AMANDASARI yang saat ini sedang dalam tahap input data
- 9. Penerapan Pajak Progresif PPh 21 telah dilakukan di tahun 2022
- 10. Perhitungan CKP dan Dokumen Pendukung capaian kinerja menjadi satu kesatuan pelaporan CKP
- 11. Koordinasi dengan Ditjenbun dalam penyusunan standar biaya layanan belanja program sarpras

#### Akar masalah:

### HAMBATAN PENYEBAB ISU UTAMA (PRIORITAS BERSIFAT INTERNAL)

- 1. Adaptasi penggunaan BIOS dan Langkah-Langkah modernisasi BLU yang disyaratkan membutuhkan adaptasi untuk tim yang baru dibentuk.
- 2. Kesempatan pembahasan kelayakan tindak lanjut dengan Pembina Keuangan membutuhkan penjadwalan ulang.

## Rencana Aksi

- 1. Pelaksanaan Rapat Pembahasan secara khusus mengenai temuan yang berstatus sedang proses di BPDP dan belum memiliki output.
- 2. Koordinasi dengan Pihak Terkait UIC Temuan yang belum terselesaikan dan konfirmasi ke Auditor.

# Detail rekomendasi monev Dit. PPKBLU

NO	REKOM. TEMUAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT	UIC		
	I. PENGELOLAAN KEUANGAN				
1.a.	Agar BLU BPDPKS segera berkoordinasi dengan KPP mitra kerja BPDPKS terkait dengan perlakuan pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran insentif tahun 2020 dan 2021	<ol> <li>Tindak Lanjut Koordinasi Teknis dengan KPP Menteng telah disampaikan. Pajak Progresif diterapkan untuk pembayaran di tahun 2022.</li> <li>Output Hasil: Telah dilakukannya potongan Pajak Progresif.</li> <li>Telah dilakukan koordinasi dengan Dit PPKBLU dan Dit. SMI dalam rangka pembahasan membahas tgl 13-17 Juni 2022</li> </ol>	DIT. KUKMR		
1.b. 1	a. Mencatat kurang dan lebih bayar pungutan pada laporan keuangan sehingga informasi pendapatan pungutan tepat saji	<ol> <li>Pencatatan kurang dan lebih bayar pungutan Sudah dilaksanakan, Lap Audited telah disajikan.</li> <li>Data telah diinput di BIOS sesuai nilai temuan BPK LK tahunan 2021.</li> </ol>	DIT. KUKMR		
1.b. 2	b. Berkoordinasi dengan Dit. APK terkait dengan penyajian investasi jangka panjang BLU	terkait dengan perlakuan akuntansi, saat dibeli menggunakan AFS (short term). Dibutuhkan management letter utk menunjukkan			
1.c.	Menerapkan kontrol yang lebih tegas atas ketepatan pertanggungjawaban uang muka dan pembayaran tagihan dengan memasukkan ketepatan pertanggungjawaban uang muka dalam IKU pegawai yang bersangkutan	Pertanggungjawaban Uang Muka/ kegiatan menjadi IKU Mandatory yang diberikan kepada pegawai yang menjadi PIC Kegiatan.	DIT. KUKMR		
2.a. 1	Pada prinsipnya rekening giro dipakai dalam rangka pembayaran kegiatan operasional BPDPKS. BPDPKS agar menyesuaikan besaran saldo pada giro Bank Mandiri sesuai dengan proyeksi pemakaian kas jangka pendek dalam bentuk juknis investasi	a dalam IKU pegawai bersangkutan  Kebijakan Investasi BPDPKS berpedoman pada Perdirut nomor PER-15/DPKS/2021 (terlampir) dengan batas optmal giro Rp 1 Triliun dengan mempertimbangkan rencana pencairan bulan berkenaan. Untuk tahun 2022 nilai saldo pada Mandiri Penyaluran berada pada level minimal. Dok dukung terlampir: <a href="https://bpdp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zulkifly_bpdp_or_id/Ek8">https://bpdp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zulkifly_bpdp_or_id/Ek8</a> rMUEXOURKgOXKI-5FE4oBGoe-ZYhOnqC9MHjRWMlukA			

NO	REKOM. TEMUAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT	UIC
2.a. 2	Mengevaluasi penempatan kas pada instrumen lain sehingga dapat diperoleh imbal hasil yang lebih besar dengan tetap berpedoman pada kebijakan investasi BPDPKS	Kebijakan Investasi BPDPKS berpedoman pada Perdirut nomor PER-15/DPKS/2021 (terlampir) dengan batas optmal giro Rp 1 Triliun dengan mempertimbangkan rencana pencairan bulan berkenaan. Untuk tahun 2022 nilai saldo pada Mandiri Penyaluran berada pada level minimal.	DIT. PPD
2.b.	Mereviu kebijakan penempatan dana cadangan pada deposito dan menempatkannya pada investasi jangka panjang dengan imbal hasil yang lebih maksimal	Penempatan dana BPDPKS pada investasi jangka panjang dengan imbal hasil yang lebih maksimal sudah dimasukkan ke dalam Rencana Investasi Tahunan untuk Tahun 2022. Dok dukung terlampirhttps://bpdp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zulkifly_bpdp_or_id/Ek8 rMUEXOURKgOXKI-5FE4oBGoe-ZYh0nqC9MHjRWMlukA	DIT. PPD
3.a	Agar BPDPKS melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui sertifikasi di bidang pengelolaan dana atau merekrut pegawai dengan kemampuan khusus di bidang pengelolaan dana	Pelaksanaan training WMI dengan menyertakan Pembina teknis dan Pembina keuangan telah dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dg ujian sertifikasi WMI dan akan dilaksanakan pelatihan lanjutan utk menunjang kompetensi SDM pengelolaan dana	DIT. KUKMR
3.b	Melampirkan bukti dukung capaian kinerja sebagai lampiran pada perhitungan capaian kinerja pegawai	Perhitungan CKP dan dokumen pendukung atas capaian Kinerja menjadi satu kesatuan terlampir dalam pelaporan CKP. Data terlampir ke BIOS	DIT. KUKMR
	IV. PENYALURAN DANA		
4.a	Segera menyusun pedoman teknis terkait standar biaya layanan untuk masing-masing komponen dalam pelaksanaan pembayaran sarana dan prasarana	BPDPKS telah berkoordinasi dengan Ditjenbun untuk menyusun standar biaya layanan belanja program Sarpras.	DIT. PENGHI MPUNA N DANA

NO	REKOM. TEMUAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT	UIC
4.b	Mengevaluasi biaya dan manfaat penggunaan outsourcing call center oleh pihak ketiga	Layanan call center dikonfirmasi Kembali	DIT. KUKMR
	V. TATA KELOLA ORGANISASI		
5.a	Agar BPDPKS melakukan review pengembangan manajemen data dan business intelegent atau berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam pengembangan manajemen data, serta membentuk tim khusus yang bertugas menjalankan business intelegent di bidang kelapa sawit	<ul> <li>Sudah dilakukan pengembangan data dan bussiness intelligent melalui aplikasi AMANDASARI yang saat ini sedang dalam tahap input data. Launching dlm waktu 1-2 bulan ke depan. Diharapkan dapat membantu dalam penyusunan Perencanaan.</li> <li>Lampiran dokumen pendukung berupa kontrak dan notula pembahasan</li> </ul>	DIT. KUKMR

# 15. IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) (9c-N)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana yang Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dalam suatu organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip Good Governance

IKU ini mengukur ketepatan waktu penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan BPDPKS berdasarkan PSAP.

#### Formula:

Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan SAP disampaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan = 4;

Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan SAP disampaikan tepat pada batas waktu yang ditetapkan = 3;

Penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan SAK disampaikan lebih lambat dari batas waktu yang ditetapkan = 2

Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPDPKS.

# Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

	IX- Pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akuntabel										
BPDPKS	9c-N Indeks ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP)										
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Υ	Pol /KP			
Target	-	3	3	-	-	3	3	Max/			
Realisasi	-	4	4	-	-	4	4	Aver			
Capaian	-	120%	120%	-	-	120%	120%	age			

#### Penjelasan IKU ini adalah:

- 1. Mengukur ketepatan waktu penyelesaian penyusunan Laporan Keuangan BPDPKS berdasarkan PSAP.
- 2. Secara mandatori Laporan Keuangan SAP disusun untuk periode semesteran dan tahunan.

#### Tindakan yang telah dilaksanakan:

- Menyampaikan Laporan Keuangan Semester I melalui ND-402/DPKS.1/2022 tgl. 20 Juli 2022 sebelum batas waktu pengiriman laporan keuangan berakhir yaitu pada tgl. 22 Juli 2022.
- 2. Penyajian nilai belanja dibayar dimuka belanja penyaluran dana PSR pada Laporan Keuangan Semester I menggunakan nilai belanja dibayar dimuka belanja penyaluran dana PSR sesuai nilai rekonsiliasi data triwulan 1.

Akar masalah Penyajian nilai belanja dibayar dimuka belanja penyaluran dana PSR belum dapat disajikan tepat waktu.

#### Rekomendasi:

- 1. Persiapan penyusunan LK Tahunan 2022.
- 2. Penyajian nilai belanja dibayar dimuka pada LK Tahunan 2022 menggunakan nilai hasil rekonsiliasi data s.d. Triwulan IV.
- 3. Menyampaikan LK Tahunan 2022 sebelum batas waktu pengiriman LK berakhir yaitu pada tgl. 22 Januari 2023

# 16. IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai (unit pemilik peta strategi) terhadap tugas dan fungsi yang dijalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai.

Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan.

Realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai di (unit pemilik IKU).

Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available).

Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol).

Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan."

#### Formula:

Jumlah nilai hasil tes hard competency pegawai (unit pemilik IKU) / Jumlah pegawai (unit pemilik IKU) yang mengikuti tes hard competency

Tujuan IKU ini bertujuan mendorong Kepala (unit pemilik IKU) sebagai atasan langsung agar secara berkelanjutan selalu melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi para pegawai.

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

BPDPKS	_	X- Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif									
	10a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai										
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Υ	Pol /KP			
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	78	78				
Realisasi	N/A	-	-	-	-	97,1	97,1	Max / TLKV			
Capaian	N/A	-	-	-	-	120%	120%				

Tingkat Pemahaman setiap pegawai berbeda-beda terhadap tugas dan fungsi yang diembannya, sehingga perlu dilakukan konseling oleh atasan masing-masing. Adapun pada tahun 2022, BPDPKS berupaya agar seluruh pegawai dapat memiliki kemampuan *hard competency* dan *soft competency* dengan mengadakan kegiatan rutin berupa sawit belajar, diklat-diklat dan pelatihan.

Pada tanggal Dua Puluh Satu, bulan Nopember Tahun 2022, telah dilaksanakan Tes Online Hard Competency Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada unit kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Keterlibatan pegawai dalam tes online adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai yang melaksanakan tes online 65 pegawai.
- b. Jumlah pegawai yang tidak melaksanakan tes online 1 pegawai dengan alas an cuti melahirkan.

Nilai rata-rata yang diperoleh sebagai berikut:

No	Direktorat	Rata-Rata Nilai
1	Direktorat Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen	98.2
	Risiko	
2	Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana	99.2
3	Direktorat Penghimpunan Dana	95.1
4	Direktorat Peyaluran Dana	97.2
5	Direktorat Kemitraan	95.7
6	Satuan Pengaasan Intern	94
	Capaian Dirut	97.1

Nilai ini diperoleh berkat upaya seluruh Pejabat dan Pegawai BPDPKS untuk meningkatkan kualitas diri dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi, sehingga mampu mendapatkan nilai yang memuaskan ketika dilaksanakan test *hard competency*.

# 17. IKU Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis *Strategy Focus Organization* (10b-N)

Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antar personal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masingmasing.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

BBBB1/0	IX- Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi									
10b-N Persentase kematangan penerapan Manajemen Risiko										
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Υ	Pol /KP		
Target	-	-	-	-	-	84	84	Max/		
Realisasi	-	-	-	-	-	85,77	85,77	TLKV		

Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85,77	85,77	
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	--

Strategy Focused Organization (SFO merupakan prinsip-prinsip yang dijalankan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja yang sudah menjadi komitmen pimpinan dan seluruh pegawai.

Prinsip-prinsip SFO antara lain

- a) Menggerakkan Perubahan Dari Tingkat Pimpinan
- b) Menerjemahkan Strategi Kedalam Terminologi Operasional
- c) Menyelaraskan Organisasi Dengan Strategi
- d) Cara Memotivasi Sehingga Strategi Adalah Pekerjaan Setiap Individu
- e) Kendali Untuk Membuat Strategi Sebagai Proses Berkelanjutan

Beberapa kegiatan yang harus dilakukan yaitu:

- a) Menyusun Strategi Organisasi berdasarkan tools STEP, SWOT, dan TOWS.
- b) Melaksanakan dan menghadiri rapat untuk membahas Peta Strategi, IKU, Inisiatif Strategis, Penetapan target dan Manual IKU-nya.
- c) Melaksanakan dan menghadiri DKO secara rutin untuk membahas isu-isu strategis organisasi dan mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian, dan merumuskan langkah tindak lanjutnya.

IKU SFO baru diterapkan pada BPDPKS pada tahun 2022, sehingga kurangnya pengalaman dalam penyusunan laporan SFO

Tindakan yang telah dilakukan:

- 1. Menyusun Strategi Organisasi per triwulan berdasarkan tools STEP, SWOT, dan TOWS.
- 2. Melaksanakan dan menghadiri DKO secara rutin (bulanan) untuk membahas isuisu strategis organisasi dan mengevaluasi capaian IKU, proyeksi capaian, dan merumuskan langkah tindak lanjutnya.
- 3. Berkoordinasi dengan kampus untuk Sosialisasi ttg Kontrak Kinerja dan Penialain SFO.

## 18. IKU Persentase modernisasi pengelolaan BLU (11a-N)

Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki BPDPKS.

Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

Modern adalah pengelolaan sarana dan TIK mengikuti kebutuhan perkembangan zaman.

Modernisasi Pengelolaan BLU dalam tahun 2022 adalah upaya untuk menerapkan tekonologi informasi dalam pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan kinerja, yang antara lain mencakup pemanfaatan BIOS, penggunaan Office Automation (OA) atau aplikasi persuratan dan pemrosesan yang setara, dan pengembangan aplikasi untuk meningkatkan layanan utama BLU; selama kurun waktu 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022.

Formula: Capaian Kelengkapan Tahapan

No	Variabel IT	Nilai
1.	Operasionalisasi Aplikasi BIOS	25
2.	Penyediaan website yang representative	10
3.	Memiliki Database Terpusat	15
4.	Memiliki Dashboard Internal dan Eksternal	10
5	Memiliki webservice untuk transfer data ke Kementerian	30
	Keuangan	
6	Memilki SOP terkait dengan Sistem IT	10
7	Memiliki dan menggunakan Sistem Aplikasi untuk pengelolaan	10
	Tata Naskah Dinas secara elektronik	
8	Memilki inovasi di bidang IT untuk peningkatan layanan dan	15
	pengelolaan keuangan	
	Total	125

Capaian maksimal untuk IKU ini adalah 125%, sesuai dengan kertas kerja dari Direktorat PPKBLU.

Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

BPDPKS	XI- Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern										
	11a-N Persentase modernisasi pengelolaan BLU										
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol /KP			
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%				
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	116%	116%	Max/ TLKV			
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	116%	116%				

Capaian IKU 2022 sebagai berikut:

Deskripsi Modernisasi	Kategori 4
-----------------------	------------

	SkorTahapan	Bobot	Skor
Operasionalisasi BIOS	120	10%	12
Penyediaan Website	100	10%	10
Desain Sistem Informasi pada BLU	80	10%	8
Database terpusat / terintegrasi	100	15%	15
Dashboard	100	10%	10
Webservice	80	25%	20
SOP Pengelolaan IT	50	10%	5
Data Analitik	120	30%	36
Skor Penyelesaian Tahapan			116

Hal-hal yang telah dilaksanakan:

- 1. Telah membentuk tim untuk aplikasi BIOS yang menjadi penialaian modernisasi pengelolaan BLU, diharapkan agar dapat mencapai target yang diharapkan.
- 2. Berkoordinasi dengan PPKBLU untuk mendapatkan asistensi dan bimbingan untuk realisasi IKU ini
- 3. Menyelesaikan kewajiban pada penilaian IKU modernisasi pengelolaan BLU

### 19. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (12a-N)

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU ""Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran"" pada level Direktorat lingkup Kantor Pusat DJPb mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU ""Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran"" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian Output. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada komponen Realisasi anggaran, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Data Kontrak. Formula perhitungan capaian dan bobot atas komponen-komponen tersebut mengacu pada peraturan tentang Petunjuk Teknis penilaian IKPA kementerian/Lembaga yang berlaku."

#### Formula:

Nilai Pencapaian Komponen Target x 100%

#### Capaian IKU tersebut sebagai berikut:

BPDPKS	XII- Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal										
	12a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran										
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol /KP			
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	N4/			
Realisasi	97,86%	98,87%	98,87%	96,85%	96,85%	99,04%	99,04%	Max/ Avera			
Capaian	102,47%	103,52%	103,52%	101,42%	101,42%	103,71%	103,71%	ge			

# Rincian capaian:

	INDIKATOR IKU	вовот	NILAI	HASIL
A. NI	LAI IKPA			
1	Revisi DIPA	5%	100,00%	5,00%
2	Deviasi Halaman III DIPA	5%	99,97%	5,00%
3	Penyerapan Anggaran	15%	100,00%	15,00%
4	Penyelesaian Tagihan	10%	100,00%	10,00%
5	Dispensasi SP3B-BLU	5%	100,00%	5,00%
6	Capaian Output	25%	97,51%	24,38%
	TOTAL Nilai IKPA	<i>65%</i>	<i>597%</i>	64%
NILA	I CAPAIAN IKU PKPA Q4		99,04%	

## Penjelasan IKU:

- 1. Terdapat perubahan regulasi tata cara perhitungan IKU PKPA, Perdirjen Nomor Perdirjen-4/PB/2021 tgl 8 Maret 2021 dinyatakan tidak berlaku.
- 2. Tata cara/Juknis perhitungan PKPA tahun 2022 mengacu pada Perdirjen 5/PB/2022 tgl 18 Maret 2022, dimana terdapat perubahan yg signifikan semula 13 indicator menjadi 8 indikator.

- 3. Untuk TW III formula dihitung Capaian IKPA satker BLU atas 6 Indikator meliputi: Revisi DIPA, Deviasi Hal. III DIPA, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Dispensasi SP3B-BLU dan Capaian Output
- 4. Sesuai formula diatas Realisasi IKU PKPA BPDPKS untuk TW IV mencapai 99.04%.

#### Akar masalah:

- Potensi tidak tercapainya penilaian sesuai target yaitu untuk penilaian halaman III DIPA (Rencana Pengesahan Dana) yang diakibatkan Revisi DIPA BPDPKS menambah pagu DIPA untuk kebutuhan belanjanya, sehingga BPDPKS akan sering melakukan revisi RPD Hal. III DIPA.
- Tidak tercapainya volume untuk Capaian Rincian Output.

#### Tindakan yang telah dilaksanakan:

- Untuk permasalahan volume capaian output, dilakukan penyesuaian pada DIPA TA 2022, volume awal mengikuti nilai pagu anggaran, sehingga ketika pagu direvisi maka volume baru mengikuti.
- 2. Telah dilalukan Revisi DIPA dan revisi Rencana Pengesahan Dana (RPD) pada Hal. III DIPA mengikuti realisasi belanja pada BPDPKS. Pagu Anggaran BPDPKS semula Rp31.542.258.257.000,00 menjadi Rp35.442.258.257.000,00.

#### Rekomendasi rencana aksi:

- 1. Koordinasi dengan seluruh Direktorat terkait komponen-komponen penilaian IKPA yang memiliki keterkaitan langsung, contohnya penyelesaian tagihan dan capaian output serta penyerapan anggaran.
- Monitoring atas pelaksanaan rencana revisi DIPA 2022.

#### 20. Indeks ketepatan waktu penyelesaian Rencana Bisnis dan Anggaran (12b-N)

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara.

IKU ini mengukur ketepatan waktu dalam menyelesaikan Rencana Bisnis dan Anggaran sampai dengan ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Direksi BPDPKS.

#### Formula:

Penyelesaian Penyusunan RBA 2023 sebelum batas waktu yang ditentukan = 4;

Penyelesaian Penyusunan RBA 2023 tepat pada batas waktu yang ditentukan = 3; Penyelesaian Penyusunan RBA 2023 melebihi batas waktu yang ditentukan = 2.

Tujuan IKU ini adalah Mengukur ketepatan waktu penyelesaian dokumen RBA yang digunakan sebagai rencana dasar untuk alokasi anggaran di tahun berikutnya.

BPDPKS	XII- Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal										
	12b-N Indeks ketepatan waktu penyelesaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)										
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol /KP			
Target	-	-	-	-	-	3	3	N4/			
Realisasi	-	-	-	-	-	4	4	Max/ Avera			
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	ge			

BPDPKS menyusun RBA Indikatif berdasarkan RBT dan Renstra yang ditetapkan tahun sebelumnya, sesuai dengan proyeksi dan asumsi. Namun penetapan pagu awal dari Kementerian Keuangan ditetapkan sangat rendah dibanding usulan dari BPDPKS, dengan pertimbangan komposisi pagu BPDPKS terhadap pagu Kemenkeu yang sangat besar apabila dipenuhi seluruhnya.

Selain itu juga BLU dianggap memiliki fleksibilitas untuk melakukan revisi di tahun berjalan dengan memperhatikan penerimaan dan realisasi di tahun berjalan.

#### Tindakan yang telah dilaksanakan:

- 1. RBA Indikatif TA 2023 telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas sesuai ND Nomor 54/DPKS/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan usulan Target Penerimaan Rp41.823.922.000.000.- dan Pagu Belanja Rp42.620.890.000.000.-
- 2. Pembahasan terkait usulan target dan pagu belanja dengan DJPb dan Setjen Kemenkeu, diputuskan bahwa untuk pagu belanja awal TA 2023 akan menggunakan pagu awal Rp5.498.363.366.000,- sehingga akan dilakukan revisi secara bertahap kedepannya.
- 3. Telah disusun RBA Definitif TA 2023 dengan usulan Target Penerimaan Rp35.149.175.000.000,- dan Pagu Belanja Rp.5.498.363.366.000,-. Penurunan Target Penerimaan disebabkan menurunnya tarif layanan pungutan ekspor sawit pada BPDPKS.

#### Rekomendasi:

1. Penyusunan RBA Indikatif 2024 berdasarkan RBT dan Renstra yang ditetapkan tahun sebelumnya, sesuai dengan proyeksi dan asumsi.

# **B. REALISASI ANGGARAN**

Realisasi anggaran yang digunakan BPDPKS pada tahun 2022 untuk mencapai output adalah Rp 36.255.570.565.442,- dari anggaran sebesar Rp 36.286.458.257.000. Realisasi anggaran ini telah dapat mencapai seluruh output yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

		BELANJA			KELUARAN				
Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian	GAP
01	PELAYANAN UMUM	36,286,458,257,000.00	36,255,570,565,442.00	99.91%					
03	PELAYANAN UMUM	36,286,458,257,000.00	36,255,570,565,442.00	99.91%					
WA	Program Dukungan Manajemen	36,286,458,257,000.00	36,255,570,565,442.00	99.91%					
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	36,184,173,419,000.00	36,164,055,179,838.00	99.94%					
FAM	Hasil Kelolaan Dana	36,184,173,419,000.00	36,164,055,179,838.00	99.94%					
001	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	4,715,162,000.00	4,159,052,629.00	88.21%	29.4460	Milyar Rupiah	29.4460	100%	11.79%
002	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel	34,735,970,180,000.00	34,735,911,799,651.00	100%	1,000,000.0000	Kilo Liter	1,000,000.0000	100%	0%
003	Pendanaan untuk Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit	118,500,000,000.00	118,230,320,911.00	99.77%	50.0000	Penelitian	50.0000	100%	0.23%
004	Pendanaan untuk Promosi dan Kemitraan Sawit	121,000,000,000.00	120,778,281,350.00	99.82%	60.0000	Kegiatan	60.0000	100%	0.18%
005	Pendanaan untuk Peremajaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	1,052,988,077,000.00	1,046,872,470,701.00	99.42%	33.0140	Hektar	30.7590	93.17%	-6.25%
006	Pendanaan untuk SDM Perkebunan Kelapa Sawit	106,000,000,000.00	96,372,252,516.00	90.92%	1,500.0000	Orang	1,500.0000	100%	9.08%

007	Pendanaan untuk Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	45,000,000,000.00	41,731,002,080.00	92.74%	30.0000	Paket	15.0000	50%	-42.74%
4836	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	26,728,508,000.00	24,794,453,989.00	92.76%					
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	804,350,000.00	801,312,000.00	99.62%					
001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	804,350,000.00	801,312,000.00	99.62%	37.0000	Unit	37.0000	100%	0.38%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	25,714,374,000.00	23,836,733,249.00	92.7%					
002	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	3,070,370,000.00	2,981,028,369.00	97.09%	12.0000	Bulan Layanan	12.0000	100%	2.91%
994	Layanan Perkantoran	22,644,004,000.00	20,855,704,880.00	92.1%	12.0000	Bulan Layanan	12.0000	100%	7.9%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	14,000,000.00	0.00	0%					
001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	14,000,000.00	0.00	0%	40.0000	Unit	40.0000	100%	100%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	195,784,000.00	156,408,740.00	79.89%					
001	Rencana Kerja dan Anggaran Unit	20,841,000.00	0.00	0%	1.0000	Dokumen	1.0000	100%	100%
002	Laporan Keuangan Unit	24,943,000.00	6,606,000.00	26.48%	2.0000	Laporan	2.0000	100%	73.52%
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	150,000,000.00	149,802,740.00	99.87%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	0.13%
4837	Pengelolaan Organisasi dan SDM	71,406,678,000.00	62,703,868,211.00	87.81%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	69,009,953,000.00	60,319,161,595.00	87.41%					

001	Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	2,529,168,000.00	2,399,613,000.00	94.88%	1.0000	Rekomendasi	1.0000	100%	5.12%
994	Layanan Perkantoran	66,480,785,000.00	57,919,548,595.00	87.12%	12.0000	Bulan Layanan	12.0000	100%	12.88%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	2,396,725,000.00	2,384,706,616.00	99.5%					
001	Pengembangan SDM	2,396,725,000.00	2,384,706,616.00	99.5%	125.0000	Pegawai	125.0000	100%	0.5%
4838	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1,286,952,000.00	1,198,386,451.00	93.12%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,286,952,000.00	1,198,386,451.00	93.12%					
001	Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	1,286,952,000.00	1,198,386,451.00	93.12%	8.0000	Rekomendasi	8.0000	100%	6.88%
4839	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	2,862,700,000.00	2,818,676,953.00	98.46%					
FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2,862,700,000.00	2,818,676,953.00	98.46%					
003	Sistem Aplikasi Lainnya	2,862,700,000.00	2,818,676,953.00	98.46%	2.0000	Modul Aplikasi	2.0000	100%	1.54%

Dari realisasi tersebut diatas, meskipun secara kinerja tercapai semua akan tetapi masih terdapat output yang belum tercapai, hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi Direksi untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian output.

## C. PENGHARGAAN ORGANISASI

Pada tahun 2022, BPDPKS mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain:

1) Pada tanggal 14 Desember 2022, Sebagai rangkaian menyambut HUT ke -11 Majalah SAWIT INDONESIA mengadakan Talkshow Sawit Indonesia dan SAWIT INDONESIA AWARD 2022 pada Rabu 14 Desember 2022 di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat. Mereka Juga mengundang Menteri Perdagangan RI, Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. yang membuka dengan paparan "Kebijakan Kemendag Mengantisipasi Dampak Resesi Melalui Peningkatan Kinerja Ekspor Sawit". Dan juga Penyerahan Penghargaan SAWIT INDONESIA AWARD 2022 Kepada Menteri Perdagangan RI, Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. Pemotongan Tumpeng HUT Majalah Sawit Indonesia Ke-11.



Bapak Eddy Abdurrachman, Direktur Utama BPDPKS mendapatkan penghargaan dari SAWIT INDONESIA AWARD 2022 kategori Pemberdayaan UKMK dan Petani Sawit penghargaan tersebut diwakili diterima oleh Zaid Burhan Ibrahim selaku Direktur Keuangan Umum dan Manajemen Resiko.

SAWIT INDONESIA AWARD 2022 adalah kegiatan penghargaan kepada pelaku industri sawit dan supporting yang pertama kali diadakan berskala nasional berdasarkan penilaian tim internal Majalah SAWIT INDONESIA dan polling online kepada 2.000 pembaca. Penghargaan ini dapat menjadi indikator kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan sawit kepada perusahaan.

2) Pada tanggal 20 Desember 2022, Menghargai suksesnya peyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia tersebut, Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang seluruh pengampu working group pada Sherpa Track dan Finance Track, engagement group, kontributor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, untuk menghadiri acara Apresiasi Sukses Presidensi G20 Indonesia 2022 di Jakarta, Selasa (20/12).



Kesuksesan pelaksanaan 437 acara G20 di 24 kota di seluruh Indonesia dan ratusan pertemuan bilateral merupakan hasil jerih payah para pengampu di Kementerian/Lembaga dan seluruh pihak yang terlibat. Menko Airlangga menyampaikan Indonesia patut berbangga dengan kinerja luar biasa dari seluruh unsur yang menyiapkan perhelatan G20 pada tingkat working groups baik di Sherpa Track maupun Finance Track, engagement groups, dan penyelenggara logistik acara.

BPDPKS diwakili Direktur Perencanaan Kabul Wijayanto menerima apresiasi yang diserahkan secara langsung oleh Menko Ekon.

#### D. PERISTIWA PENTING TAHUN 2022



5 Januari 2021, Pemerintah memberikan keputusan bahwa minyak goreng disebar dengan harga Rp 14 ribu per liter di tingkat konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (5/1). Untuk mewujudkan itu, pemerintah akan menggelontorkan 1,2 miliar liter minyak goreng.

"Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) siap mendukung pemerintah," terang Eddy Abdurrachman, Direktur Utama BPDPKS.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan penyediaan minyak goreng dengan harga Rp14 ribu per liter, akan dilakukan sampai 6 bulan ke depan. Setelah itu, pemerintah akan melakukan evaluasi pada Mei untuk diperpanjang atau tidak. Keputusan itu merupakan hasil kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan anggaran sebesar Rp3,6 triliun.



**18 Januari 2022,** BPDPKS siap menindaklanjuti keputusan Pemerintah untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat.

Menindaklanjuti kebijakan sebelumnya, Pemerintah memastikan kembali agar masyarakat dapat memperoleh harga minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau Rp14.000 per liter. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter.

"Dalam rapat ini diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar 7,6 triliun rupiah," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memimpin Rapat Komite Pengarah BPDPKS, Selasa (18/1/2022).

.....



25 Januari 2022, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengadakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pertukaran Data dan Informasi antara BPDPKS dengan BPS yang mengangkat tema "Satu Data, Satu Suara Sawit Indonesia" yang dilaksanakan secara hybrid dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat pada Selasa, 25 Januari 2022, pukul 10.00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Jakarta Pusat. Adapun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan antara Bapak Eddy Abdurrachman, Direktur Utama BPDPKS dengan Bapak Atgo Mardiyanto, Sekretaris Utama BPS.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud sinergi antar Lembaga Pemerintah dalam mewujudkan "Satu Data, Satu Suara Sawit Indonesia". Kerjasama ini pun menggunakan "Mekanisme Nol Rupiah" yang artinya kerjasama antar Lembaga ini tidak dipungut biaya apa pun, serta pertukaran data Perkebunan Kelapa Sawit antara BPDPKS dan BPS ini adalah menggunakan Sistem Pertukaran Data yang disebut Transdata.

.....



**4 Februari 2022**, Sejalan dengan rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan Kementerian Keuangan, BPDPKS berkolaborasi dengan Kantor Wilayah DJPB Provinsi Banten. Menggelar kegiatan yang bertemakan "Sawit Berbakti Berbagi" bertempat di Kanwil DJPBN Provinsi Banten, Jum'at (04/02).

Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur KUKMR BPDPKS, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Banten, Kepala Kanwil DJKN Provinsi Banten, Kepala Kanwil DJBC Provinsi Banten, Kepala Kanwil DJP, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Soekarno Hatta Tangerang, Para Kepala Pelayanan Lingkup Provinsi Banten, Para Pejabat Administrator dan pengawas.

Edukasi dengan kolaborasi seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah ini khususnya Provinsi Banten, sebagai upaya nyata kehadiran BPDPKS di tengah pelaku usaha, masyarakat, dan seluruh stakeholder terkait untuk memberikan gambaran nyata tentang apa dan bagaimana komoditas kelapa sawit yang mampu mendorong perekonomian masyarakat.



24 Februari 2022, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang menjadi satu dari program utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kembali mendapatkan dorongan positif untuk pencapaiannya. Bekerjasama dengan tiga anak perusahaan sawit Sinar Mas Agribusiness and Food. Kamis, 24 Februari 2022 di Kandis Riau BPDPKS menunjukkan Kemitraan Strategis Perusahaan dan Petani Swadaya dengan total lahan seluas 2.100 hektar.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengusung tema "Penanaman Perdana Program Peremajaan Sawit Kemitraan Strategis".

Dalam kesempatan ini Menteri Airlangga selain menyempatkan melakukan penanaman Perdana, Panen Sawit dan pemupukan lahan juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak PSR BPDPKS, Bank Riau Kepri dan Gapoktan Pandan Jaya Riau.



4 Maret 2022, Program Sawit Rakyat (PSR), salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit nasional yang saat ini rata-rata sekitar 3-4 ton/hektare dan umur tanaman diatas 25 tahun. Disini peran serta BPDPKS menjadi ujung tombak keberhasilan program yang di arahkan oleh Bapak Presiden RI, untuk mencapai target-target yang telah ditentukan bersama.

Dalam rangka percepatan program Peremajaan sawit Rakyat BPDPKS terus berkolaborasi dengan berbagai stakeholders kelapa sawit. Pada tanggal 4 Maret 2022 telah dilakukan kegiatan Kegiatan penanaman perdana PSR di Kabupaten Muara Enim dengan melibatkan Kemenko Perekonomian, BPDPKS, dan Pengurus Besar NU. Rangkaian kegiatan diawali dengan penanaman perdana kelapa sawit, dilanjut acara inti yaitu sosialisasi program PSR kepada Gapoktan, petani, masyarakat dan para tokoh masyarakat. Serta penyerahan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kepada Koperasi Maju Bersama, Gapoktan Sepakat dan Koperasi Serasan Mulya Oleh Direktur Utama BPDPKS yang dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama 3 Pihak yang diserahkan ke Lembaga Pekebun.

Turut serta juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf, Ketua PWNU Sumatera Selatan K.H. Amiruddin Nahrawi, Bupati Muara Enim Nasrun Umar, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dan para tokoh masyarakat.

Selain itu, dalam rangka mendorong percepatan program PSR juga telah ditandangani MoU antara BPDPKS dan PBNU dalam akselerasi dan percepatan implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penguatan UKMK sawit dan edukasi sumber daya manusia perkebunan sawit.

.....



9 Maret 2022, BPDPKS menyelenggarakan Workshop Promosi Digitalisasi dan Hilirisasi Produk Sawit Skala UMKM Batch I di Balikpapan pada 1 s.d. 3 Maret 2022, untuk mengenalkan proses produksi produk hilir sawit skala UMKM kepada para Koperasi petani sawit agar memotivasi keterlibatan mereka dalam produksi produk hilir tersebut. Pengenalan proses produksi ini dilakukan melalui kolaborasi dengan institusi perguruan tinggi maupun dengan pelaku usaha UMKM sawit yang telah berhasil dalam mengembangkan produknya.

Tantangan penguatan kelembagaan petani sawit menjadi UMKM yang memproduksi produk hilir sawit tentunya bukan hanya dari aspek proses produksi, tetapi juga dari aspek pemasaran produk. Terkait aspek ini, terdapat peluang bagi UMKM sawit dengan memanfaatkan platform digital yang saat ini marak menjadi *marketplace* bagi produk-produk UMKM. Dalam kegiatan ini, BPDPKS juga melakukan pengenalan konsep digital marketing untuk mendorong peningkatan akses pasar produk-produk hilir sawit skala UMKM baik di dalam maupun luar negeri.



9 Maret 2022, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan tidak akan mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Melihat Indonesia sebagai produsen CPO, masyarakat harus mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Karena itu, Kementerian Perdagangan menggandeng Mabes Polri untuk menindak tegas setiap bentuk penyelewengan minyak goreng.

Hal tersebut disampaikan Mendag Lutfi dalam konferensi pers terkait minyak goreng hari ini, Rabu (9/3) secara virtual.



**10-11 Maret 2022,** Bersamaan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Universitas Lampung, BPDPKS sekaligus melakukan sosialisasi program-program yang ditugaskan yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan pada 10-11 Maret 2022 yang dilaksanakan kepada 8 Lembaga penelitian yang berlokasi di wilayah Sumatera, yaitu LPPM Universitas Lampung, LPPM Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, dan LPPM Universitas Sumatera Utara dan PPKS.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 11 maret 2022 yang dihadiri Wakil Rektor I dan IV Universitas Lampung Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S dan Prof. Ir. Suharso, Ph.D.bersama dengan Kelapa LPPM Unila Dr. Lusimelia Afriani dan Para Dekan dari setiap Fakultas di Unila yaitu Fakultas Pertanian, Teknik, Ekonomi dan Bisnis, Sosial dan Politik, serta peneliti yang ada di Univesitas Lampung.

------



17-19 Maret 2022, BPDPKS menyelenggarakan Edukasi Sawit Palm Oil Edu Talk untuk wilayah Jawa Timur pada tanggal 17 s.d. 19 Maret 2022 di Surabaya.

Kegiatan ini diikuti kurang lebih 200 orang perwakilan Guru dan Siswa dari Kab./Kota se Jawa Timur yang hadir secara online maupun offline. Para peserta memperoleh informasi tentang manfaat sawit dalam kehidupan sehari-hari, produksi produk-produk turunan sawit, manfaat sawit untuk peningkatan kehidupan sosial ekonomi petani sawit dan keluarganya, pengelolaan lingkungan hidup dan sosial di perkebunan kelapa sawit, serta sawit sebagai sumber energi terbarukan.

Materi disampaikan oleh narasumber Dr. Bandung Sahari Bidang Sustainability GAPKI, Donni Indra Bidang CSR PT Sinarmas Agrobusiness & Food, Goldameir Mektania Kepala Divisi Media Sosial DPP APKASINDO, Irma Rachmania Ketua Bidang Pemasaran APROBI, serta Hendy Firmanto & Sendy Peneliti dari Pusat Kopi dan Kakao Indonesia.



**23 Maret 2022,** Hasil penelitian periset kelapa sawit yang tergabung dalam Grant Riset Sawit (GRS) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan difasilitasi melalui hilirisasi hasil penelitian oleh Asosiasi Inventor Indonesia (AII).

13 inventor yang dihilirisasikan dalam suatu strategi peningkatan nilai tambah komoditasnya diharapkan dapat menarik investor baik perusahaan maupun perorangan untuk menjadi mitra inventor dalam komersialisasi hasil penelitian, seperti diungkapkan Ketua Umum AII Didiek Hadjar Goenadi.

Didiek mengungkapkan ada 13 inventor periset Grand Riset Sawit (GRS) untuk hilirisasi hasil penelitian, yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

------



**18 Maret 2022**, Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur, Teguh Sumarno pada kegiatan Palm Oil Edutalk Provinsi Jawa Timur dengan tema Kupas Tuntas Mitos dan Fakta Tentang Kelapa Sawit pada Jum'at (18/03/2022) di Surabaya menyampaikan, perkebunan sawit di Pulau Sumatera seperti di Provinsi Jambi, Palembang, dan Lampung menjadi sektor yang berkontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar dan perekonomian daerah.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur untuk promosi positif kelapa sawit kepada Insan Pendidikan. Kegiatan ini diikuti oleh Guru dan siswa dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur yang berlangsung secara *hybrid*.

"UMKM-UMKM bersama SMA, SMK, guru bisa menciptakan perubahan-perubahan ekonomi sehingga ini meningkatkan martabat kabupaten/kota di Indonesia, terutama yang menjadi sentra sawit," kata Teguh Sumarno.



**29-30 Maret 2022**, Pada tanggal 29-30 Maret 2022 telah dilakukan Rapat Pembahasan Teknis Dukungan IT – Transdata antara BPDPKS dengan BPS di Serpong, sebagai tindak lanjut dari penanda-tanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data dan Informasi Perkebunan Kelapa Sawit antara kedua lembaga tersebut yang sudah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022.

Langkah koordinasi ini dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi tata kelola data dan informasi untuk mewujudkan "the most valuable of data" yang berbasis pada "single source of truth" untuk mendukung pembangunan industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan.

Selain itu pertukaran data dan informasi Perkebunan Kelapa Sawit di antara kedua Lembaga ini tentunya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi seluruh program penyaluran dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang terdiri dari program pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan perkebunan kelapa sawit, pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

------



**30 Maret -1 April 2022**, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyelenggarakan kegiatan Workshop Promosi Digitalisasi dan Hilirisasi Produk Sawit Skala UMKM Batch II pada 30 Maret – 1 April 2022 di Padang, Sumatera Barat. Kegiatan bertujuan mendekatkan kelembagaan petani sawit dengan proses produksi produk hilir sawit dan lembaga pembiayaan serta akses ke platform digital untuk pemasaran produk. Hal ini sekaligus sebagai upaya mewujudkan inklusivitas pemasaran dan pembiayaan UMKM sawit untuk produksi produk hilir.

Dalam kegiatan ini dilaksanakan workshop pembuatan pupuk organik dari limbah sawit, produksi sabun dan cokelat berbahan sawit, produksi minyak goreng berbahan sawit, produksi bumbu mie instan berbahan sawit, talkshow platform digital untuk pemasaran produk dan akses pembiayaan UMKM sawit, dan pameran produk UMKM sawit. Kegiatan ini diikuti secara *offline* oleh 50 orang pengurus Koperasi Kelapa Sawit, UMKM, dan Mahasiswa wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi serta peserta secara *online* dari pelaku UMKM, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum.

Pameran produk-produk UMKM sawit menampilkan diantaranya hand sanitizer sawit, sabun cuci tangan sawit, produk pangan berbasis minyak sawit seperti mie instan, bumbu rendang, dan cokelat, hingga produk-produk kerajinan seperti kotak tisu dan *frame* cermin yang berbahan tandan kosong sawit dan lidi sawit. Produk-produk ini diproduksi oleh Koperasi SETARA DPP APKASINDO, UMKM binaan SBRC LPPM IPB University, dan UMKM binaan LPPM Universitas Andalas.



**7 Juni 2022**, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terus berkolaborasi untuk melakukan kegiatan promosi kelapa sawit baik skala regional, nasional, hingga internasional. Saat ini, kegiatan promosi kelapa sawit dilakukan melalui Pameran dan Talkshow Sinergi Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UKMK) Kemenkeu Satu Sektor Kelapa Sawit.

Dalam sambutannya, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya BPDPKS untuk berperan dalam Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu sebagaimana arahan Ibu Menteri Keuangan dalam Leader's Offsite Meeting (LOM) 2022 terkait optimalisasi sinergi pemberdayaan UMKM.

Pameran atau Expo Kemenkeu Satu merupakan kolaborasi dari Program Santripreneur Berbasis UKMK Sawit PEBS Universitas Indonesia; Program Desa Sawit Mandiri Berbasis UKMK AKPY Yogyakarta; Program UKMK Perempuan Berbasis Sawit SAMADE; Program UKMK Batik Sawir BRIN; Program Inkubasi Bisnis Berbasis UKMK Sawit Universitas Andalas; Program UKMK DJBC; Program UKMK LPEI; Program UKMK PKN STAN; Program UKMK PIP; serta Pojok UKMK Makanan dan Minuman Nusantara.

Kegiatan ini akan dilaksanakan di 4 kota secara berkala dengan rincian 4 kali Pameran dan 4 kali Kegiatan Talkshow dalam rangka mewujudkan kemitraan UKMK sawit melalui optimalisasi sinergi pemberdayaan UKMK. Rangkaian kegiatan akan dimulai di Jakarta pada 7 – 9 Juni 2022. Materi talkshow yang disampaikan terkait Sinergi Pemberdayaan UKMK Berbasis Sawit, Inkubasi Bisnis Berbasis UKMK Sawit, Peluang Usaha UKMK Berbasis Kelapa Sawit, dan Desa Sawit Mandiri Berbasis UKMK.

-------

# KUPAS TUNTAS MITOS DAN FAKTA TENTANG KELAPA SAWIT

18 Juni 2022, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melanjutkan rangkaian kegiatan Edukasi Sawit Palm Oi Edu Talk tahun 2022. Kali ini, kegiatan diselenggarakan untuk wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 18 Juni 2022 di Kota Makassar.

Kegiatan dihadiri oleh kurang lebih 200 orang peserta Guru, Siswa dan Mahasiswa perwakilan dari 24 Kab./Kota se Sulawesi Selatan, yang berpartisipasi secara hybrid, baik daring maupun luring. Dalam kegiatan ini disampaikan materi tentang fakta objektif kelapa sawit dari para narasumber praktisi sawit, perwakilan pemerintah, dan akademisi.

Disamping penyampaian materi, juga ditampilkan demo produksi sabun dan lilin aromatherapy berbahan minyak goreng bekas pakai atau minyak jelantah. Presentasi ini disampaikan oleh Tim LP2M Universitas Negeri Makassar yang dikoordinir oleh Dr. Moh. Ahsan S. Mandra



22 Juni 2022, Dalam rangka menyukseskan Indonesia sebagai Presidensi G20, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan beberapa kegiatan pendukung perhelatan dari sektor pangan dan agribisnis, dengan tema utama "Pangan Indonesia untuk Dunia yang Lebih Baik (Indonesian Food for a Better World)".

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan antara lain berupa exposure komoditas, ajang pertemuan bisnis, festival dan karnaval, serta talkshow, yang dilaksanakan di 3 lokasi, yakni hari ini di Jakarta sebagai Kick Off Events, kemudian diikuti dengan Labuan Bajo, dan yang terakhir di Borobudur, Magelang.

"Isu ketahanan pangan sangat penting. Kita harus betul-betul berkonsentrasi terhadap ketersediaan pangan dalam negeri. Jadi kuncinya hanya tiga hal, yakni mengamankan supply side, diversifikasi pangan, dan efisiensi," ujar Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan pada acara Kick Off Events yang mengusung sub tema "Pangan Nusantara" di Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus berkomitmen untuk mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional. "Dalam kegiatan ini BPDPKS membawa produk-produk sawit yang dapat menjadi sumber pangan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan dunia lebih baik," terang Kabul Wijayanto PLT Direktur Kemitraan BPDPKS.



4 Juli 2022, Dalam rangka mengoptimalkan peran Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk berkontribusi dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan, kesehatan, pertanian dalam arti luas dan infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Barat, perwakilan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan Koordinasi dan Konsultasi ke BPDPKS di Jakarta pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022.

Dengan peserta dari Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut: 1. Pj. Bupati Kotawaringin Barat; 2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; 4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Kotawaringin Barat; 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Kotawaringin Barat; 6. Sekretaris DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat; 7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat; 8. Kepala Dinas TPHP Kabupaten Kotawaringin Barat; 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat; 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat; 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat; 12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat; 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

Secara khusus dalam kunjungan kerja tersebut dibahas beberapa kegiatan yang bersumber dari dana BPDPKS di Kabupaten Kotawaringin Barat. Antara lain PSR seluas 1.000 ha, pendanaan sarana prasarana serta pengembangan SDM antara lain diklat pekebun dan pendamping sebanyak 300 peserta.



5 Juli 2022, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman bertemu dengan Pengurus DPP dan DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang dipimpin langsung oleh Kerua Umum APKASINDO Gulat ME Manurung pada Selasa 05 Juli 2022 di Kantor BPDPKS.

sebanyak 18 orang ketua DPW dari 22 Propinsi di Indonesia beraudiensi dalam pertemuan tersebut membahas antara lain kondisi dan situasi harga TBS dan pemberitaan di media massa mengenai permasalahan yang terjadi saat ini yang bermula dari kelangkaan dan mahalnya harga Minyak Goreng dan petani sawit lah yang paling dirugikan sebagai akibatnya. Dimana harga TBS Petani sudah berada pada titik terendah sejak 3 bulan terakhir.

Selain itu Apkasindo juga menyampaikan permintaan untuk kemudahaan dana beasiswa serta pembuatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) petani yang kajiannya utuk tiga PKS diserahkan oleh Apkasindo langsung ke Dirut BPDP.



**14-16 Juli 2022**, Pengenalan proses produksi produk hilir sawit skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kepada para koperasi petani sawit dilakukan untuk memotivasi keterlibatan mereka dalam produksi produk hilir tersebut. Tidak hanya itu, penguatan kelembagaan petani sawit serta akses ke platform digital dan lembaga pembiayaan turut direalisasikan untuk membuka peluang masuk ke dalam sistem rantai pasok global melalui pasar ekspor bagi pelaku UMKM sawit di Indonesia.

"UMKM Sawit yang memproduksi produk kebutuhan masyarakat berbahan sawit dapat terlibat dan memanfaatkan platform digital sebagai sarana penjualan dan pemasaran produknya tidak hanya untuk pasar dalam negeri, namun juga untuk pasar ekspor," kata Kepala Divisi UKMK Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Helmi Muhansyah dalam kegiatan Workshop Promosi Prosedur, Pembiayaan, dan Penerapan Digitalisasi dalam Proses Ekspor Produk Kelapa Sawit dan Turunannya Skala UMKM pada 14 s.d. 16 Juli 2022 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPPDKS yakni Workshop Promosi Hilirisasi dan Digitalisasi Produk Sawit Skala UMKM Batch I di Balikpapan dan Batch II di Padang. Tujuannya yaitu mengenalkan prosedur ekspor bagi pelaku Koperasi dan UMKM sawit untuk memperluas akses pasar produk-produknya.

------



**4 Agustus 2022**, Pemerintah terus mendorong hilirisasi produk sawit untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani. Kedepan, Indonesia tak lagi hanya menyediakan bahan mentah untuk industri negara lain, tetapi sudah dalam bentuk produk jadi.

Demikian disampaikan Eddy Abdurrachman Sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam pembukaan Focus Group Discussion [FGD], 'Mempercepat Hilirisasi Kebun Sawit Rakyat Melalui Kemitraan Petani Sawit dengan Pelaku Industri Sawit yang diselanggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa sawit [GAPKI] Sumatera Utara bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Medan Sumatera Utara, 4/8/2022.

Menurut Eddy, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan dengan tujuan untuk mendorong hilirisasi sawit yang akan dapat memberikan value edit atau nilai tambah, tentunya ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan keberlanjutan usaha perkebunan sawit.

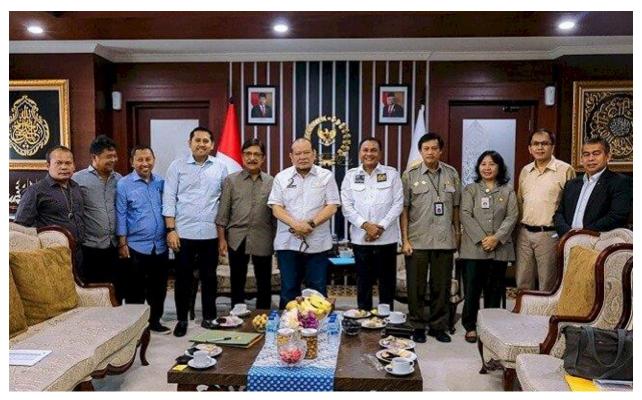
Selain itu, lanjut Eddy, pemerintah terus mendorong peningkatan produktifitas perkebunan sawit melalui Program Peremajaan sawit Rakyat [PSR] yang telah dimulai sejak 2016.



**5-7 Agustus 2022,** Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan tim Kemenkeu Satu kembali menggelar Festival UMKM Merah Putih. Kali ini kegiatan tersebut digelar di Kota Madiun, mulai 5 sampai 7 Agustus 2022.

Adapun tim Kemenkeu Satu Madiun di antaranya Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Madiun, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dan Kantor Pajak Pratama Madiun.

.....



**11 Agustus 2022**, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sepakat menaikkan dukungan dana dalam program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) yang diberikan kepada pekebun dengan luas maksimal 4 hektare per NIK (Nomor Induk Kependudukan). Dengan besaran sekitar Rp 60 juta per hektare.

Hanya saja, kenaikan ini belum disetujui oleh Komite Pengarah yang terdiri dari para menteri, dengan ketua Menko Perekonomian. Sehingga BPDPKS statusnya akan mengusulkan kenaikan tersebut.

Hal itu terungkap dalam rapat antara petani kelapa sawit dengan BPDPKS dan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian yang difasilitasi Ketua DPD RI.

Pada pertemuan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung, Bustami Zainuddin, M Syukur (Jambi) dan Abdullah Puteh (Aceh), serta Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin.

Dari petani, hadir Kobar Sembiring dan Soaduon Sitorus dari Jaringan Petani Sawit Nasional dan Pahala Sibuea dari Persatuan Organisasi Petani Sawit (POPSI).

Hadir pula Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, Direktur Keuangan Zaid Burhan Ibrahim dan Kepala Divisi USDM Adi Sucipto. Sedangkan Kementan diwakili Plt Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan Kementan, Baginda Siagian dan Sub Koordinator Pemasaran Domestik Ditien Perkebunan Kementan. Elvy Risma.



15-19 Agustus 2022, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam Jambore Nasional (Jamnas) XI, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Sosialisasi ini diselenggarakan mulai 15-19 Agustus 2022 yang diikuti pramuka penggalang utusan kwartir cabang (kabupaten/kota) di Tanah Air dan Gudep yang berpangkalan di KBRI, serta utusan organisasi pramuka di kawasan Asia Pasifik.

"Pengenalan penggunaan biodiesel kepada Pramuka sudah dilakukan semenjak 2016. Tidak hanya dilakukan di acara Jamnas melainkan dalam kegiatan Pramuka lainnya seperti kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional tahun lalu di Jambi," ujar Paulus Tjakrawan, Ketua Harian APROBI, Selasa (15 Agustus 2022).

Paulus menjelaskan bahwa Pramuka memiliki peranan penting dalam kegiatan distribusi informasi biodiesel supaya mengetahui sumber bahan baku biodiesel dan manfaatnya kepada masyarakat. Distribusi informasi kepada anak-anak Pramuka di jenjang Penggalang diharapkan mampu meng-counter isu negatif sawit termasuk biodiesel.



29 Agustus 2022, Pemerintah melalui Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tetap berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Dalam rapat Komite Pengarah (Komrah) BPDPKS pada Minggu (28/08), diperoleh keputusan yang telah menyetujui lima hal yakni Perpanjangan Tarif Pungutan Ekspor (PE) sebesar US\$0 untuk semua produk s.d. 31 Oktober 2022, Penambahan Alokasi Biodiesel Tahun 2022, Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah (3M), Dukungan Percepatan Peningkatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). "Perpanjangan Tarif PE sebesar US\$0 dimaksudkan untuk menjaga momentum saat ini, di mana harga Crude Palm Oil (CPO) mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar (TBS) yang mulai meningkat, sehingga

membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat yang diselenggarakan secara virtual tersebut.



6 September 2022, Peneliti dari Politeknik Negeri Media Kreatif Gema Sukmawati Auryadi telah berhasil menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku tinta. Peneltian ini berjudul "Sintesis dan Aplikasi Green Varnish Berbahan Minyak Sawit Pada Tinta Cetak Offset Lithography". Penelitian ini telah dilakukan sejak tahun 2020 melalui pendaanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinta ini dapat memenuhi nilai standar warna yang ditargetkan dalam SNI ISO Cetak Ofset. Selain itu tinta sawit ini memiliki nilai Volatile Organic Compound (VOC) yang lebih rendah daripada tinta cetak offset konvensional, sehingga lebih ramah lingkungan.

Penelitian ini telah menghasilkan dua produk luaran utama, yaitu *green varnish* dan tinta cetak ofset. Tinta cetak ofset yang dihasilkan berbahan minyak sawit yang memiliki karakteristik sesuai dengan standar SNI untuk proses cetak dan dapat digunakan pada mesin cetak offset yang telah beredar umum di pasaran. Varnish yang telah dikembangkan menggunakan solvent berbahan turunan minyak sawit. Kemudian green varnish tersebut menjadi bahan baku penyusun tinta

cetak ofset yang berperan sebagai *vehicle*, membawa bahan pewarna dari bak tinta pada mesin cetak mengalir dengan baik hingga ke permukaan bahan cetak", kata Gema

------



21 September 2022, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyelenggarakan Penandatangan Perjanjian Kerjasama Program Penelitian Pengambangan (Litbang) dan Beasiswa Pendidikan, untuk periode penetapan Tahun 2022. Penandatangan perianiian Keriasama Penelitian Pengembangan dilakukan 18 Lembaga Penelitian dan Pengembangan yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Tadulako, Universitas Lambung Mangkurat, AKPY STIPER, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Universitas Syah Kuala, Universitas Airlangga, Universitas Lampung, Institut Teknologi Indonesia, Institut Teknologi Kalimantan, Universitas Jambi, Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Universitas Langlangbuana dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pada hari yang sama juga ditandatangani perjanjian Kerjasama Dukungan pendanaan beasiswa dengan 7 lembaga penyelenggara beasiswa pendidikan, yaitu AKPY STIPER, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, Politeknik LPP, Politeknik Kampar, Institut Teknologi Sawit Indonesia, ITSB dan INSTIPER.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman telah menyetujui dukungan pendaanan penelitian dan pengembangan tahun 2022 ini sekitar **Rp167,4 Milyar** dengan pendanaan multiyear sampai dengan 3 tahun dan dukungan pendanaan beasiswa pendidikan sebesar **Rp122 Milyar** dengan pendanaan multiyear mulai dari Diploma 1,2,3, 4 dan Strata 1.

------



21 September 2022, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah melakukan penandatangan kerjasama penelitian dengan Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) Institut Teknologi Bandung, terkait dengan pelaksanaan penelitian Inovasi Lanjut Katalis & Teknologi Bensin Sawit dan Pengembangan Teknologi Produksi Percontohan Mixed Industrial Vegetable Oil (MIVO) dan Minyak Makan Sehat dari Kelapa Sawit. Seremoni penandatangan perjanjian dilakukan bersamaan dengan penandatangan 46 perjanjian kerjasama penelitian dengan 24 lembaga penelitian dan pengembangan serta Lembaga Pendidikan oleh Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman pada tanggal 21 September 2022 di Bogor.

Lingkup kerjasama penelitian yang akan dilakukan antara BPDPKS dengan LPIK ITB antara lain : Optimasi teknoogi produksi bensin sawit (bensa) dan penggunaan ragam umpan yang lebih fleksibel untuk mendapatkan bensa dengan harga yang lebih kompetitif; Pengembangan teknologi percontohan Mixed Industri Vegetable Oil (MIVO) dan minyak makan sehat kapasitas 5 ton TBS/jam; Evaluasi Keekonomian dan Model Bisnis Produk Pangan Bernutrisi Tinggi; Pengujian karakteristik dan organoleptik Minyak Makan Sehat dan MIVO. Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama waktu 18 bulan yang dilakukan melalui konsorsium peneliti dari LPIK ITB, PT. Kemurgi Indonesia dan Seafast IPB.



21 September 2022, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 7 (tujuh) lembaga penyelenggara pendidikan pada tanggal 21 September 2022 di Bogor. Program Beasiswa tahun 2022 ini dilakukan pada jenjang Pendidikan Program D1, D2, D3, D4 dan S1.

Sejak tahun 2021 dalam pelaksanaan Program Pengembangan SDM PKS BPDPKS bersinergi dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), Kementerian Pertanian. Dimana BPDPKS mendapatkan amanat untuk melakukan penetapan lembaga penyelenggara program pengembangan SDM PKS sesuai Kepdirjenbun 130 Tahun 2022 dan Ditjenbun akan menyampaikan rekomendasi teknis terkait penerima program pengembangan SDM PKS kepada BPDPKS.



26 September 2022, Dr. Ir. I Dewa Gede Arsa Putrawan peneliti dari ITB telah berhasil menemukan inovasi pemanfaatan PFAD untuk membuat stabiliser termal pipa PVC (polyvinyl chloride). Stabiliser termal adalah aditif yang digunakan dalam pembuatan pipa PVC. Penelitian ini dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Penelitian telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan penelitian fokus pada pembuatan dalam skala laboratorium dan dilanjutkan dalam skala bench dengan kapasitas 3-5 kg per batch pada tahun 2018.

Pembuatan stabiliser termal PVC dari PFAD dilakukan dalam dua tahap, esterifikasi PFAD menjadi merkaptoetil palmat kemudian reaksi merkaptoetil palmat dengan timah organik menjadi stabiliser termal PVC. Penambahan stabiliser termal ke dalam resin PVC membuat resin PVC tahan panas dan dapat dicetak menjadi pipa. Stabiliser termal yang dihasilkan memiliki efek stabilisasi yang baik. Dengan dosis hanya 1,0 hingga 1,5%, resin PVC mampu menahan panas dan tetap cerah pada 1900C selama 45-60 menit. Kualitas dan efek stabilisasi yang dihasilkan bersaing dengan stabiliser termal dari jenis yang sama yang ada di pasaran.

BPDPKS mendorong hasil penelitian yang telah didanai dapat dimanfaatkan oleh Industri kelapa sawit, pemerintah dan masyarakat, baik sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan industri kelapa sawit dan produk-produk tertentu serta untuk pengambilan kebijakan untuk keberlanjutan industri sawit yang lebih baik.



27 September 2022, Road Test campuran biodiesel berbasis sawit sebanyak 40% dengan minyak solar atau tren disbeut B40 telah dilaksanakan oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" dengan melibatkan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui pendanaan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Untuk bahan bakar B0 dan HVO disediakan oleh Pertamina Grup (PT Kilang Pertamina Internasional) dan untuk B100 oleh APROBI.

Berdasarkan pengujian sampai dengan saat ini, hasil uji kualitas bahan bakar B0 dan D100 masih memenuhi spesifikasi yang ditetapkan serta untuk B100 memenuhi spesifikasi usulan Komite Teknis 27-04 Bioenergi Cair.

Progres uji layak B40 yakni jarak tempuh per tanggal 22 September 2022 yang terjauh mencapai 26.316 km untuk kategori kendaraan di bawah 3,5 ton dan 15.319 km untuk kategori kendaraan di atas 3,5 ton.

Saat ini juga sedang dilakukan persiapan terhadap pelaksanaan uji Cold Startability, dimana jumlah kendaraan yang digunakan sebanyak 24 unit kendaraan. Pelaksanaan uji tersebut akan dilakukan di Resort Agrowisata Perkebunan Tambi dengan Ketinggian 1400 mdpl. Direncanakan pengujian dimulai pada tanggal 27 September 2022 serta penyaksian startability oleh stakeholder terkait pada tanggal 26 Oktober 2022 dini hari.



28-30 September 2022, BPDPKS berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu Jawa Timur mengadakan kegiatan Festival UKMK Kemenkeu satu Jawa Timur bertempat di kantor Wilayah Bea Cukai I dan Kantor DJP jawa timur pada 28 sd 30 September 2022 dengan tema UMKK Jatim Bangkit Ekonomi Melejit.Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendorong ekonomi Jawa Timur Bangkit dan mensosalisasikan kebijakan kementerian keuangan dalam mendorong dan mengembangkan UKMK. Rangkain Kegiatan meliputi seremoni pembukaan, Lomba Anak dan Sawit, talkshow Peluang Usaha berbasis UKMK Sawit, Pengenalan Minyak sawit Merah, Workshop UKMK Berani Ekspor, Pameran Produk-Produk UKMK Binaan Kemenkeu satu Jawa Timur dan Mitra UKMK BPDPKS, Fun Bike, Bakti Sosial, Live lelang dan Pentas Seni.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas antara BPDPKS perwakilan stakeholders Pekebun Sawit, Perguruan Tinggi, **UKM** Sawit Perusahaan, Asosiasi Pengusaha. Asosiasi Petani dan Perbankan. Hadir dalam Kegiatan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia, Bupati Gresik, Direktur Utama BPDPKS, Kepala-Kepala kantor Kementerian Keuangan di Jawa Timur serta Perwakilan asosisasi-Asosiasi petani Sawit.

\_\_\_\_\_\_



18-20 Oktober 2022, BPDPKS berkolaborasi dengan Kemenkeu Satu Lampung mengadakan kegiatan Kemenkeu Satu Sinergi dan Kolaborasi Pemberdayaan UKMK Berkelanjutan bertempat di Kantor Wilayah Pajak Lampung dan Bengkulu di Bandar Lampung pada tanggal 18 sampai 20 Oktober 2022. Kegiatan ini adalah salah satu upaya Kemenkeu Satu dalam mendorong penguatan UKMK dan mensosialisasikan kebijakan Kementerian Keuangan khususnya di Wilayah Lampung. Rangkaian kegiatan meliputi Seremoni Pembukaan, Pemilihan Muli Mekhani Sawit, Talk show sosialisasi limbah sawit untuk industry kreatif, Talk show seminar perpajakan, dongeng anak dan sawit, Sosialisasi minyak sawit merah, demo memasak dengan minyak sawit merah, lomba menggambar dan mewarnai terkait sawit, Cerdas cermat APBN dan Kelapa Sawit, dan Kemenkeu Got Talent serta Fun Bike.

Dalam kegiatan ini ditampilkan Booth-Booth Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) binaan kantor perwakilan Kementerian Wilayah Lampung dan BPDPKS, atara lain Booth DJPB, DJKN, DJBC, DJP, Dekranasda Lampung, POPSI, Booth Kemenkeu satu dan Booth Himbara.

.....



19- 23 Oktober 2022, Merujuk laporan penutupan pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-37 yang digelar secara luring pada 19—23 Oktober 2022, mencatat terdapat 10 produk yang paling diminati TEI ke-37, yakni minyak kelapa sawit dengan total transaksi sebesar US\$ 577,2 juta atau 20,43 persen, kertas dan produk kertas (US\$ 380,8 juta atau 13,48 persen), produk pertanian (US\$ 361 juta atau 12,78 persen).

Diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, secara umum pameran dagang terbesar di Indonesia ini berhasil membukukan potensi transaksi sementara sebesar US\$ 2,94 miliar atau senilai Rp 45,8 triliun.

"Hasil TEI ke-37 ini berhasil membukukan potensi transaksi sementara sebesar US\$ 2,94 miliar atau senilai Rp 45,8 triliun. Nilai transaksi ini masih akan bertambah, mengingat TEI 2022 akan terus berlangsung secara daring hingga 19 Desember 2022. Capaian ini patut kita syukuri di tengan di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan," ujar Mendag Zulkifli Hasan dalam Konferensi Pers Hasil Sementara TEI 2022 Luring di International Convention Center (ICE), BSD, Tangerang, Banten pada Minggu (23/10/2022).

------



**26 Oktober 2022**, Setelah dilaunching oleh Menteri ESDM pada 27 Juli 2022, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui pendanaan oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus melakukan berbagai rangkaian uji kelayakan B40 (campuran 40 persen biodiesel pada bahan bakar solar) sebagai bahan baku penggerak mesin diesel.

Hasilnya, saat dilakukan uji Cold Startability (kemudahan penyalaan kendaraan pada temperatur rendah) oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi "Lemigas" dan Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE dapat dinyalakan dengan baik dimana masih memenuhi standar yang ditetapkan yaitu kurang dari 5 detik.

Selain melakukan uji cold startability, dilakukan pula beberapa pengujian. Salah satunya melakukan pengujian kualitas mutu bahan bakar dan pelumas yang bertujuan untuk mememastikan kualitas mutu bahan bakar sebelum dan sesudah dicampur sampai masuk ke dalam engine sesuai dengan kualitas mutu yang dipersyaratkan. Di samping itu, analisa pelumas untuk memastian dan membandingkan kualitas pelumas pada awal dan pelumas bekasnya.

Tim teknis uji jalan bahan bakar biodiesel B40 pada kendaraan bermesin diesel juga telah menyelesaikan beberapa pengujian antara lain analisis konsumsi bahan bakar, uji kualitas mutu bahan bakar dan pelumas, uji kinerja engine, uji stabilitas penyimpanan bahan bakar dan uji startability.

\_\_\_\_\_\_



29 Oktober 2022, Perayaan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-76 yang diperingati sebagai hari terbentuknya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditutup dengan kegiatan Family Gathering di Jakarta pada Sabtu (29/10). Acara yang di hadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi jajaran Kemenkeu atas kerja keras dalam menghadapi 2,5 tahun pandemi Covid-19. "APBN, uang negara, keuangan negara adalah salah satu instrumen yang selalu diandalkan untuk bisa menjaga Indonesia, menjaga rakyatnya, dan menjaga agar kita tetap terus bisa mencapai tujuan bernegara. Jadi tugas kita semuanya sungguh luar biasa," ungkap Menkeu.

Dalam acara tersebut seluruh satker Badan layanan Umum (BLU) dan Special Mission Vehicle (SMV) hadir menyediakan booth untuk menunjukan produk dan atau layanan yang mereka lakukan tek terkecuali Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit (BPDPKS). Booth BPDPKS yang memamerkan produk-produk turunan hasil kelapa sawit sejak pagi sudah di kunjungi oleh peserta family gathering untuk melihat produk sawit dan mengikuti kuis-kuis yang telah disediakan oleh pejaga booth BPDPKS.

\_\_\_\_\_\_



**3-4 November 2022,** Bertempat di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua Bali berlangsung bersamaan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke -18 2022 dan G20 Sustainable Vegetables Oil Conference (SVOC) pertama. Dalam IPOC 2022 yang digelar secara *hybrid* di Nusa Dua Bali, Kamis (03/11), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa saat ini, luas areal yang telah tersertifikasi ISPO mencapai 3,6 juta hektar. Selain ISPO, juga terdapat Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, yang akan menjadi peta jalan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendukung rencana bauran Biodiesel 40% atau B40. Program biodiesel dinilai sangat penting mendukung keberlanjutan industri sawit nasional. "Program biodiesel akan mendukung penyerapan sawit yang sangat signifikan terhadap penyerapan sawit di dalam negeri," ujar Eddy Abdurrachman, Direktur Utama BPDPKS, saat berbicara dalam IPOC 2022, Kamis (3/11).

Sementara itu G20 Sustainable Vegetable Oils Conference (G20 SVOC) yang juga digelar di Nusa Dua Bali, Kamis (13/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual menjelaskan tentang pentingnya peran industri kelapa sawit bagi perekonomian dan dalam merespon tantangan iklim global.



**6 November 2022**, KONFERENSI perubahan iklim dunia atau COP-27 di Sharm El Sheikh, Mesir, secara resmi dibuka Minggu 06 November 2022 pukul 15.00 WIB atau 10.00 waktu Mesir. Di forum ini, Sawit Indonesia akan menunjukkan kepada dunia sebagai yang terdepan dalam aksi perubahan iklim.

Dipimpin Kementrian Kordinator Bidang Perekonomian dan didukung penuh oleh BPDPKS, perhelatan COP-27 akan menjadi ajang pembuktian aksi nyata sawit Indonesia dalam mendukung perubahan iklim dunia.

Penyampaian mengenai wujud dukungan sawit Indonesia akan disampaikan melalui talkshow oleh narasumber yang dikirimkan ke Paviliun Indonesia di COP-27. Topik yang diangkat antara lain update mengenai Program biodiesel Indonesia sebagai komitmen kuat sawit Indonesia memberikan dampak positif berupa penurunan emisi dan pengembangan ekonomi.

\_\_\_\_\_



14 November 2022, Sebanyak 331 mahasiswa yang terdiri dari 310 mahasiswa program Diploma I Beasiswa Sawit dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan 21 mahasiswa/i penerima Kartu Indonesia Pintar mengikuti Kuliah Umum dalam rangka pembinaan mental, fisik, disiplin dan kenal kebun untuk mahasiswa baru Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY – Stiper). Kegiatan yang dikenal dengan Bintalfisdisbun ini, menjadi kegiatan wajib bagi mahasiswa baru sebelum menapaki bidang yang akan dipelajari di kampus.

Seperti diketahui, BPDPKS melalui program pengembangan SDM kelapa sawit bekerjasama dengan tujuh lembaga pendidikan salah satunya dengan AKPY – Stiper (Yogyakarta). Di tahun ini, BPDPKS memberikan dukungan dana (beasiswa) bagi 1.000 mahasiswa yang sudah mendapatkan rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal Perkebunan – Kementerian Pertanian.

------



19 November 2022, 2nd Oil Palm Marathon yang diselenggarakan tanggal 19 November 2022. Kebun PTPN 4 Kabupaten Sergai Sumatera Utara menjadi saksi bisu kegigihan pelari yang terdiri dari 4 kategori itu yaitu 5k, 10k, 21k, dan 42k. Badan Layanan Umum di bawah naungan Kementerian Keuangan yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkolaborasi dengan Gapki Sumut dan Perkebunan Nusantara untuk menyelenggarakan kegiatan

Dengan menggunakan tagline "Run for Sustainable Palm", Oil Palm Marathon ingin mendekatkan kepada masyarakat bahwa kelapa sawit adalah komoditi yang berkelanjutan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati dan mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Ini merupakan kegiatan kedua yang mana sebelumnya telah diselenggarakan pada tahun 2019.



18 November 2022, Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas meminta agar Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merata bagi seluruh petani sawit di Indonesia. Sebab, ia mendapati tidak meratanya pembagian Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Sumatera Selatan (Sumsel), di mana yang lebih dominan memperoleh PSR adalah Plasma Perusahaan, ketimbang Petani Sawit

"Ini ada beberapa kendala, saya kira, di Sumsel. Bahwa yang dapat program ini kebanyakan adalah plasma, plasma dari perusahaan. Sementara, (plasma untuk) petani sawit mandiri itu masih banyak kendala. Ada juga kendala yang selama ini terjadi yaitu lahan dengan HGU, lahan hutan produksi dan hutan lindung sawit," kata Bertu kepada *Parlementaria*, dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (18/11/2022).

\_\_\_\_\_



18 November 2022, Pencapaian positif program-program Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi serapan informasi bagi para anggota Komisi XI DPR RI sangat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Medan, 18 November 2022.

"Salah satu pencapaian yang sangat positif adalah penyaluran dana di bidang riset dan pengembangan hilir kelapa sawit" jelas Kabul Wijayanto, Direktur Perencanaan BPDPKS saat menerima para anggota dewan di Prime Plaza Hotel, Kualanamu, Medan.

Lebih lanjut, Puteri mengungkapkan pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan Komisi II dan juga Komisi IV sebagai komisi yang lebih intensif membahas terkait permasalahan tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU). "Hal ini jadi nanti tentu kita akan menyampaikan ke teman-teman kita di fraksi kita masing-masing yang bertugas di Komisi IV dan II terkait dengan permasalahan ini supaya mereka bisa menyuarakan ini bersama dengan Mitra kerjanya," tutur Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Diakhir, Puteri juga menyampaikan fokus kedepan yang harus di kawal bersama oleh Komisi XI adalah bagaimana dana pengelolaan di BPDPKS tersebut bisa memberikan manfaat sebesarbesarnya untuk petani sawit, selain juga membuktikan pada dunia bahwa sawit dari Indonesia tidak merusak lingkungan.

------



**21-23 November 2022**, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia berkolaborasi menggelar kegiatan Bimbingan Teknis UMKM Bikopra bagi anggota Aspekpir Provinsi Riau.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru pada 21 hingga 23 November 2022, dimana acara dibuka secara resmi oleh Gubernur Riau, Syamsuar, dan dihadiri Kepala Divisi UKMK BPDPKS, Helmi Muhansyah, Ketua Penasehat Aspekpir Gamal Nasir dan Ketua Dewan Pengawas Aspekpir, Rusman Heriawan.

Bikopra merupakan singkatan dari Bangun Industri UMKM Sejahtera yang digagas untuk mengembangkan wirausaha dengan memanfaatkan potensi limbah kelapa sawit menjadi bernilai ekonomis.

Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta yang berasal dari koperasi-koperasi anggota ASPEKPIR Provinsi Riau, perwakilan dari dinas provinsi Riau serta dinas-dinas kabupaten di daerah Riau.

\_\_\_\_\_\_



23-25 November 2022, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Sawitsetara kembali memperkenalkan produk-produk UKMK (Usaha Kecil Menengah Koperasi) berbahan sawit kepada mahasiswa dan pelaku UMKM di Bali. Kegiatan ini berlangsung selama 23-25 November 2022 dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Mayjen TNI (Purn) Erro Kusnara, Dewan Pembina DPP APKASINDO, menjelaskan bahwa dalam pidato Presiden Joko Widodo telah disebutkan dunia akan menghadapi tantangan luar biasa di tahun depan. Untuk itulah, Indonesia perlu waspada karena pandemi belum usai dan tensi global terus meningkat sebagai dampak konflik Ukraina Rusia yang akan berdampak kepada persoalan pangan dan energi.

Workshop dan Eksibisi ini bertemakan "Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Koperasi Untuk Mendorong Kreativitas Sektor UKMK Guna Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Petani Kelapa Sawit".

------



29-30 November 2022, Forum Sawit Indonesia (FoSI) 2022 memiliki peranan strategis dalam meningkatkan daya saing komoditas kelapa sawit. Targetnya, memberikan masukan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan daya saing dan keberlanjutan industri kelapa sawit menuju Sawit Indonesia 2045. Hal ini diungkapkan Eddy Abdurrachman, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) saat menjadi pembicara Forum Sawit Indonesia (FoSI) 2022, di Grha Instiper Yogyakarta, Selasa (29 November 2022).

Menurutnya, FoSI 2022 yang mengambil tema "Sawit Indonesia Menuju 2045", sangatlah tepat sebagai forum diskusi kritis perkelapasawitan. Target dari forum ini diharapkan dapat memberikan masukan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan daya saing dan keberlanjutan industri kelapa sawit menuju Sawit Indonesia 2045.

\_\_\_\_\_



8 Desember 2022, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) terus melakukan uji coba penerapan biodiesel sawit yang dicampur dengan bahan bakar minyak solar, sampai akhir Desember 2022. Rencananya penerapan campuran itu di 2023 akan melakukan campuran biodiesel 40%, namun rupanya rencana itu berubah.

Diungkapkkan Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, keputusan penerapan campuran biodiesel 35% dengan minyak solar (B35), sudah melalui pertimbangan yang matang.

Kendati Dadan mengakui, pemerintah sudah melakukan uji coba pada B40 dan menunjukkan hasil yang positif, baik dari hasil uji laboratorium maupun uji jalan. "Kita memang melakukan uji coba B40, dan hasilnya positif, baik di uji lab maupun uji jalan," ungkapnya seperti dilansir *CNBC Indonesia*, Kamis (8/12/2022).

\_\_\_\_\_\_



22 Desember 2022, Sektor sawit di Indonesia yang melibatkan 2,4juta petani swadaya dan 16juta tenaga kerja, dapat terus mendorong PDB di sektor perkebunan pada angka yang positif, sehingga PDB Indonesia di TW3 2022 dapat bertumbuh positif di angka 5,72%. Industri kelapa sawit ini telah berkontribusi pada pendapatan pemerintah, keuntungan bagi perusahaan, lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan bagi petani kecil." terang Eddy Abdurachman, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada press conference akhir tahun BPDPKS Kamis, 22 Desember 2022 di Hotel Grand Hyatt Jakarta.

"Sebagai lembaga pengelola dana, BPDPKS memastikan prinsip "from palm oil to palm oil" diterapkan di setiap program. Kinerja penghimpunan dana BPDPKS di tahun 2022 dari pungutan ekspor sawit diperkirakan mencapai Rp34,5triliun, sedangkan kinerja imbal hasil dana kelolaan di tahun 2022 sebesar Rp800miliar. Dana kelolaan tersebut digunakan untuk menjalankan programprogram yang meliputi pemberian dukungan untuk program mandatori biodiesel, peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana dan prasarana kelapa sawit, penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia, serta program promosi dan kemitraan," lanjut Eddy.

## BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan atas kinerja organisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang telah diuraikan sebelumnya adalah:

- Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) merupakan Badan Layanan Umum non-eselon yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam merencanakan dan menghitung kinerja organisasi, BPDPKS menginduk kepada Manajer Kinerja Organisasi (MKO) Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Posisi BPDPKS adalah Sub Manajer Kinerja Organisasi yang berada pada koordinasi MKO Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Kontrak Kinerja (KK) BPDPKS tahun 2022 ditetapkan melalui Kontrak Kinerja Nomor 01/DPKS/2022. Di dalam KK tersebut ditetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis organisasi dalam 4 (empat) pespektif Balanced Scorecard yang diturunkan dalam 20 (Dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi.
- Nilai Kinerja Organisasi BPDPKS tahun 2022 adalah sebesar 113,20 lebih kecil dari tahun 2021 sebesar 113.82 akan tetapi masih lebih besar dari NKO BPDPKS tahun 2020 sebesar 112.45
- Dari 20 (dua puluh) IKU yang ditetapkan, terdapat 19 IKU yang tercapai/IKU Hijau dan 1 (satu) IKU yang tidak tercapai, yaitu Persentase penyaluran dana peremajaan sawit rakyat
- Realisasi anggaran BPDPKS pada tahun 2022 adalah Rp 36.255.570.565.442,- dari pagu Rp 36.286.458.257.000,-. Meskipun seluruh IKU tercapai, akan tetapi terdapat beberapa Output yang belum tercapai antara lain Output Peremajaan Sawit rakyat (PSR) dan Sarana dan Prasarana.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2022, dimana Sebagian besar target kinerja tercapai dan satu IKU yang tidak tercapai yaitu Peremajaan Sawit rakyat (PSR), BPDPKS berupaya meningkatkan kinerja yang belum optimal.

Jakarta, 27 Januari 2023 Direktur Utama BPDPKS



Ditandatangani secara elektronik

Eddy Abdurrachman



# **LAMPIRAN**

# Formulir Pengukuran Kinerja BPDPKS Tahun 2022 Sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014

No	SS	IKU	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SS1 Pengelolaan dana kelapa sawit yang berkelanjutan	Persentase tingkat harga CPO	100%	156.14%	120.00%
2	SS2 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan	3.4	3.52	103.53%
3	SS3 Penghimpunan dana kelapa sawit yang optimal	dana mal Indeks ketepatan waktu penyelesaian restitusi dan kurang bayar		3,67	120,00%
4	SS4 Komunikasi publik dan	Persentase persepsi positif dari media massa terhadap sawit Indonesia	60%	69.01%	115.02%
5	kemitraan yang efektif	Jumlah Program Promosi dan Kemitraan yang dikelola	50	148	120.00%
6		Persentase penyelesaian kerjasama dalam rangka perluasan pasar ekspor sawit baru	100%	116%	116.00%
7		Persentase penyaluran dana peremajaan sawit rakyat	100%	80.76%	80.76%
8	SS5 Pengembangan perkebunan sawit yang berkelanjutan	Jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Sawit	3.000	4.480	120.00%
9	berkelarijulari	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit	100%	100%	100.00%
10	SS6 Imbal hasil pengembangan dana yang optimal	Persentase imbal hasil dana kelolaan	100.00%	127%	120%
11	SS7 Pelaksanaan program mandatori biodiesel yang berkelanjutan	volume penyaluran biodiesel	8.700.000	10.359.544	119.08%
12	SS8 Pengelolaan penelitian dan pengembangan sawit yang berkesinambungan	jumlah riset yang dikelola	75	115	120.00%
13	SS9 Pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akuntabel	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP yang telah ditindaklanjuti	89.5%	93%	103.93%

No	SS	IKU	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14		Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPKBLU	90%	100%	111.11%
15		Indeks ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP)	3	4	120%
16	SS10 Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja	Nilai rata-rata hard competency pegawai	78	97.10	120%
17	Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focus Organization	84.5	85.77	101.50%
18	SS11 Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	Persentase modernisasi pengelolaan BLU	100%	116%	116%
19	SS12 Penguatan	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95.5%	99%	103.71%
20	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	Indeks ketepatan waktu penyelesaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)	3	4	120%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022 : Rp 36.286.458.257.000,-Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022 : Rp 36.255.570.565.442,-

### KONTRAK KINERJA NOMOR: KK-o\/DPKS/2022



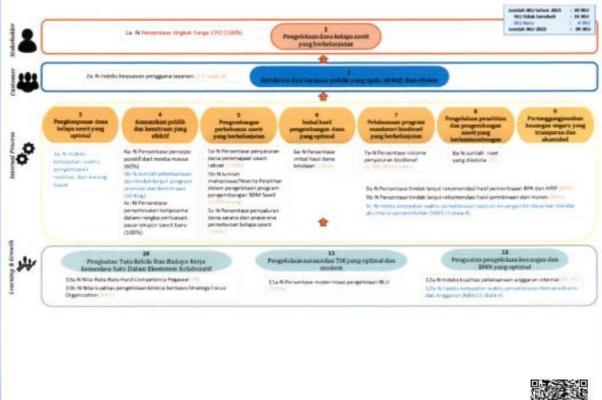
# DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2022

## Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, saya akan:

- Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
- 2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
- 3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Peta Strategi





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
(1)	(2)		(3)	(4)	
1	Pengelolaan dana kelapa sawit yang berkelanjutan	1a-N	Persentase tingkat harga CPO	100%	
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	3.4 (skala 4)	
3	Penghimpunan dana kelapa sawit yang optimal	3a-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian restitusi dan kurang bayar	3 (skala 4)	
4	Komunikasi publik dan kemitraan yang efektif	4a-N	Persentase persepsi positif dari media massa terhadap sawit Indonesia	60%	
		4b-N	Jumlah program promosi dan kemitraan yang dikelola	50 Keg	
		4c-N	Persentase penyelesaian kerjasama dalam rangka perluasan pasar ekspor sawit baru	100%	
Pengembangan perkebunan 5 sawit yang berkelanjutan		5a-N	Persentase penyaluran dana peremajaan sawit rakyat	100%	
		5b-N	Jumlah orang/peserta program pengembangan SDM Sawit	3.000 oran	
		5c-N	Persentase penyaluran dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit	100%	
6	Imbal hasil pengembangan dana yang optimal	6a-N	Persentase imbal hasil dana kelolaan	100%	
7	Pelaksanaan program mandatori biodiesel yang berkelanjutan	7a-N	Volume penyaluran biodiesel	8.700.000 kiloliter	
8	Pengelolaan penelitian dan pengembangan sawit yang berkesinambungan	8a-N	Jumlah riset yang dikelola	75 riset	
9	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP	89,5%	
	akuntabel	9b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dari Direktorat PPKBLU	90%	
		9c-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian Iaporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (SAP)	3 (skala 4)	
10	Penguatan Tata Kelola Dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu		Nilai Rata-Rata Hard Competency Pegawai	78	
	Dalam Ekosistem Kolaboratif	10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focus Organization	84,5	
11	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	11a-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU.	100%	

12	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	12a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.5%
		12b-N	Indeks ketepatan waktu penyelesaian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)	3 (skala 4)

	Vaciates	
	Kegiatan	Anggaran
1.	Imbal hasil kelolaan dana BLU	Rp5.000.000
2.	Pendanaan untuk volume penyaluran selisih harga biodiesel	Rp4.107.462.180.000
3.	Pendanaan untuk penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit	Rp115.000.000.000
4.	Pendanaan untuk promosi dan kemitraan	Rp75.000.000.000
5.	Pendanaan untuk peremajaan lahan perkebunan kelapa sawit	Rp1.202.988.077.000
6.	Pendanaan untuk SDM perkebunan kelapa sawit	Rp115.000.000.000
7.	Pendanaan untuk sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit	Rp117.000.000.000
8.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum	Rp25.468.225.000
9.	Pengelolaan organisasi dan SDM	Rp71.297.027.000
10.	Pengelolaan risiko, pengendalian, dan pengawasan internal	Rp1.795.288.000
11.	Pengelolaan sistem informasi dan teknologi	Rp1.439.460.000

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

Hadwand

Jakarta, 31 Januari 2022

Direktur Utama BPDPKS,

Eddy Abdurrachman